PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

2025 – 2029



Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029 dapat disusun sebagai pedoman strategis dalam mengarahkan pembangunan kependudukan daerah secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dokumen ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menempatkan penduduk sebagai subjek sekaligus tujuan utama pembangunan, sehingga setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan benar-benar berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan kependudukan memiliki posisi fundamental dalam keseluruhan sistem pembangunan daerah. Dinamika jumlah, struktur umur, kualitas sumber daya manusia, persebaran dan mobilitas penduduk, serta ketahanan keluarga memiliki implikasi langsung terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, PJPK ini disusun dengan berlandaskan pada Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah 2025–2045 serta selaras dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029, khususnya dalam mendukung pelaksanaan program prioritas daerah: Betang Maju, Betang Makmur, Betang Cerdas, Betang Sehat, Betang Harmoni, serta implementasi Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS).

Melalui pendekatan pembangunan kependudukan berbasis SDM unggul dan nilai-nilai Huma Betang, PJPK ini diarahkan untuk mewujudkan transformasi wilayah yang inklusif, hijau, dan berkeadilan menuju Kalimantan Tengah Tangguh 2045. Nilai kebersamaan, gotong royong, toleransi, dan harmoni sosial menjadi landasan moral sekaligus sosial dalam pelaksanaan pembangunan kependudukan di daerah ini. Dengan demikian, pembangunan kependudukan tidak hanya berorientasi pada pencapaian indikator kuantitatif, tetapi juga pada penguatan kohesi sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Kami meyakini bahwa keberhasilan implementasi Peta Jalan ini sangat ditentukan oleh sinergi dan kolaborasi seluruh perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, perguruan tinggi, serta partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, setiap pemangku kepentingan diharapkan menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara konsisten, terukur, dan akuntabel, sehingga pembangunan kependudukan benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan daya saing daerah.

Akhir kata, semoga dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029 ini menjadi pedoman kerja yang kuat, inspiratif, dan implementatif dalam memperkuat fondasi pembangunan manusia dan keluarga di Bumi Tambun Bungai. Bersama-sama, kita wujudkan Kalimantan Tengah yang tangguh, bermartabat, maju, dan berkelanjutan menuju tahun 2045.

Palangka Raya, Desember 2025

Plt. Sekretaris Daerah,
Provinsi Kalimantan tengah

Leonard S. Ampung

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR TABEL v
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan 3
C. Dasar Hukum 4
D. Batasan Pengertian 5
E. Analisis Situasi dan Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah 6
F. Analisis Isu Strategis dan Respon Kebijakan menggunakan Metode PSRI (Pressure, State, Respon, Impact) 21
G. Isu Strategis Kependudukan 51
BAB II SASARAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN 56
A. Sasaran 1 – Pengelolaan Kuantitas Penduduk 56
B. Sasaran 2 – Peningkatan Kualitas Penduduk 57
C. Sasaran 3 – Pembangunan Keluarga 59
D. Sasaran 4 – Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk 60
E. Sasaran 5 – Penataan Administrasi Kependudukan 62
BAB III RENCANA AKSI 64
A. Tata Kelola Pembangunan Kependudukan 64
B. Rencana Aksi PJPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 - 2029 65
C. Kerangka Kelembagaan dan Pembagian Peran Perangkat Daerah dalam Pencapaian Indikator PJPK 90
BAB IV PENUTUP 94
PENUTUP 94
A. Monitoring Pelaksanaan Peta Jalan dan Rencana Aksi 94
B. Evaluasi Pelaksanaan Peta Jalan dan Rencana Aksi 95
C. Pelaporan Pelaksanaan Peta Jalan dan Rencana Aksi 95
DAFTAR PUSTAKA 97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Tren Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2024 7
Gambar 2. Grafik Tren Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 - 2024 8
Gambar 3. Grafik Tren ASFR 15 – 19 Provinsi Kalimantan Tengah 2022 – 2024 10
Gambar 4. Grafik Tren Indikator KB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 – 2024 11
Gambar 5. Grafik Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Tengah 2020 - 2024 12
Gambar 6. Grafik Tren Prevalensi Stunting Provinsi Kalimantan Tengah 2020 – 2024 13
Gambar 7. Grafik Tren Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Kalimantan Tengah 2020 – 2024 14
Gambar 8. Grafik Tren Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Tengah 2020 - 2024 15
Gambar 9. Grafik Tren Indeks Pembangunan Keluarga Provinsi Kalimantan Tengah 2021 – 2024 16
Gambar 10. Grafik Tren Persentase Rumah Tangga dengan Rumah Layak Huni Prov Kalteng Tahun 2020 - 2024 17

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Matriks Analisis PSRI Provinsi Kalimantan Tengah 24
Tabel 2. Target Sasaran Pengelolaan Kuantitas Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah 2025 - 2029 56
Tabel 3. Target Sasaran Peningkatan Kualitas Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah 2025 - 2029 58
Tabel 4. Target Sasaran Pembangunan Keluarga Provinsi Kalimantan Tengah 2025 - 202959
Tabel 5. Target Sasaran Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk 61
Tabel 6. Target Sasaran Penataan Administrasi Kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah 2025 - 2029 62
Tabel 7. Matriks Rencana Aksi PJPK Provinsi Kalimantan Tengah 2025 – 2029 66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kependudukan merupakan determinan utama keberhasilan pembangunan daerah karena kualitas, struktur, dan persebaran penduduk menentukan kapasitas transformasi sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Dalam konteks Provinsi Kalimantan Tengah, penduduk diposisikan sebagai subjek sekaligus modal strategis pembangunan. Oleh sebab itu, Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) disusun untuk memastikan bahwa dinamika demografi dikelola secara terencana, terukur, dan berorientasi pada pembentukan sumber daya manusia yang unggul, produktif, sehat, dan berkarakter sebagai fondasi daya saing daerah.

Secara konseptual, arah pembangunan kependudukan mengacu pada Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2045 yang menetapkan lima pilar strategis, yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan mobilitas penduduk, serta penataan administrasi kependudukan. Kelima pilar tersebut menegaskan bahwa pengelolaan kependudukan harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari pengendalian fertilitas dan penguatan struktur umur produktif hingga optimalisasi bonus demografi dan penguatan tata kelola data. PJPK menjadi instrumen operasional yang menerjemahkan kerangka jangka panjang tersebut ke dalam kebijakan lima tahunan yang selaras dengan RPJMD.

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029 menetapkan prioritas pembangunan daerah melalui agenda Betang Maju, Betang Makmur, Betang Cerdas, Betang Sehat, Betang Harmoni, serta implementasi Kartu Huma Betang Sejahtera sebagai instrumen perlindungan sosial terpadu. Seluruh agenda tersebut memiliki korelasi langsung dengan dimensi kependudukan. Peningkatan daya saing ekonomi memerlukan tenaga kerja produktif dan terampil; penguatan pendidikan dan kesehatan membutuhkan perencanaan berbasis struktur umur dan persebaran penduduk; sementara perlindungan sosial adaptif mensyaratkan akurasi data kependudukan. Dengan demikian, pembangunan kependudukan menjadi tulang punggung pencapaian target pembangunan lima tahunan.

Orientasi utama pembangunan kependudukan adalah pembentukan sumber daya manusia unggul sebagai prasyarat transformasi ekonomi dan sosial. SDM unggul tidak

hanya diukur melalui capaian Indeks Pembangunan Manusia, tetapi juga melalui kualitas karakter, literasi, kesehatan, produktivitas, dan kemampuan adaptif terhadap perubahan global. Dalam konteks bonus demografi, optimalisasi penduduk usia produktif harus diiringi investasi pada pendidikan berkualitas, pelatihan vokasi, layanan kesehatan merata, serta penguatan kewirausahaan berbasis potensi lokal. Tanpa perencanaan demografis yang presisi, peluang demografi berisiko berubah menjadi tekanan sosial dan ekonomi.

Pembangunan kependudukan Kalimantan Tengah juga berakar pada nilai-nilai Huma Betang sebagai fondasi sosial dan kultural masyarakat. Nilai kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan keadilan yang terkandung di dalamnya memberikan arah bahwa pembangunan harus inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi wilayah maupun sosial. Dalam kerangka PJPK, nilai tersebut diterjemahkan melalui kebijakan pemerataan akses layanan dasar, perlindungan kelompok rentan, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan demikian, pendekatan teknokratik dalam perencanaan tetap berpijak pada penguatan kohesi sosial sebagai modal ketahanan daerah.

Transformasi wilayah menuju pembangunan yang inklusif, hijau, dan berkelanjutan menjadi dimensi penting dalam pengelolaan kependudukan. Kalimantan Tengah memiliki bentang alam luas dengan daya dukung lingkungan yang harus dijaga secara berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi berbasis hilirisasi dan penguatan sektor unggulan harus berjalan seiring dengan pengendalian urbanisasi dan penataan persebaran penduduk agar tidak menimbulkan tekanan ekologis baru. Pendekatan ini selaras dengan arah pembangunan kewilayahan dalam RPJMD yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Dimensi kewilayahan berbasis klaster dan koridor pertumbuhan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD mengharuskan pengelolaan mobilitas dan distribusi penduduk secara strategis. PJPK perlu memetakan kepadatan, arus migrasi, dan struktur penduduk antarwilayah untuk mencegah ketimpangan spasial serta memastikan pemerataan pusat-pusat pertumbuhan baru. Integrasi kebijakan kependudukan dengan tata ruang, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi wilayah menjadi prasyarat tercapainya keseimbangan pembangunan antar kabupaten/kota.

Akhirnya, penataan administrasi kependudukan dan integrasi data menjadi fondasi perencanaan berbasis bukti (evidence-based planning). Transformasi digital dan reformasi tata kelola pemerintahan yang menjadi agenda strategis RPJMD menuntut sistem data

kependudukan yang mutakhir, terintegrasi, dan interoperabel. Akurasi data tidak hanya meningkatkan efektivitas kebijakan dan ketepatan sasaran program, termasuk Kartu Huma Betang Sejahtera, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan efisiensi belanja publik.

Berdasarkan kerangka normatif GDPK, arah kebijakan RPJMD, serta nilai-nilai Huma Betang sebagai fondasi sosial-budaya, penyusunan PJPK Provinsi Kalimantan Tengah menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa dinamika kependudukan dikelola secara terencana, terintegrasi, dan berkeadilan. PJPK dirancang sebagai dokumen yang mengharmonisasikan pendekatan teknokratik berbasis data dengan nilai kebersamaan dan inklusivitas, sehingga pembangunan kependudukan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan statistik, tetapi juga memperkuat martabat, kesejahteraan, dan keberlanjutan masyarakat Kalimantan Tengah menuju tahun 2045.

B. Tujuan

1. *Tujuan Umum*

   Tujuan umum penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Provinsi Kalimantan Tengah adalah mewujudkan pengelolaan pembangunan kependudukan yang terintegrasi, terarah, dan berkelanjutan sebagai fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan transformasi wilayah menuju Kalimantan Tengah yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing hingga tahun 2045.

2. *Tujuan Khusus*

   Secara khusus, PJPK Provinsi Kalimantan Tengah bertujuan untuk:

   - Menjabarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan lima tahunan yang selaras dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029 serta kerangka jangka panjang GDPK 2025–2045.
   - Mengintegrasikan lima pilar pembangunan kependudukan (pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan mobilitas penduduk, serta penataan administrasi kependudukan) ke dalam perencanaan pembangunan daerah secara sistematis dan operasional.
   - Mewujudkan sinkronisasi kebijakan lintas perangkat daerah dalam pengelolaan isu-isu strategis kependudukan, termasuk bonus demografi, ketimpangan wilayah, kemiskinan, stunting, kualitas pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan sosial adaptif.
   - Mengoptimalkan pemanfaatan struktur penduduk usia produktif melalui peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan produktivitas tenaga kerja berbasis potensi unggulan daerah.

- Memperkuat pembangunan keluarga sebagai unit dasar pembentukan sumber daya manusia unggul melalui penguatan ketahanan keluarga, pengasuhan, perlindungan perempuan dan anak, serta pemberdayaan lansia.
- Meningkatkan kualitas tata kelola administrasi dan data kependudukan sebagai dasar perencanaan berbasis bukti (*evidence-based planning*) dan peningkatan presisi kebijakan perlindungan sosial.

C. Dasar Hukum

Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029 berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional, penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan kependudukan, serta kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah. Adapun dasar hukum dimaksud meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2045.
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029.
10. Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2045.

D. Batasan Pengertian

Untuk memberikan kejelasan konseptual dan menghindari perbedaan interpretasi dalam implementasi kebijakan, berikut batasan pengertian dalam PJPK Provinsi Kalimantan Tengah:

1. Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) adalah dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang memuat arah kebijakan, strategi, indikator, dan tahapan implementasi pembangunan kependudukan yang terintegrasi dengan RPJMD serta mengacu pada GDPK Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pembangunan Kependudukan adalah upaya terencana dan sistematis untuk mengelola kuantitas, kualitas, persebaran, mobilitas, serta administrasi kependudukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
3. Pengelolaan Kuantitas Penduduk adalah kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk, struktur umur, dan daya dukung wilayah melalui program keluarga berencana, pengaturan fertilitas, dan penguatan kesehatan reproduksi.
4. Peningkatan Kualitas Penduduk adalah proses peningkatan derajat pendidikan, kesehatan, keterampilan, produktivitas, dan karakter penduduk sepanjang siklus kehidupan (*life cycle approach*).
5. Pembangunan Keluarga adalah upaya sistematis untuk memperkuat ketahanan, kesejahteraan, dan fungsi keluarga sebagai unit sosial dasar dalam pembentukan sumber daya manusia.
6. Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk adalah kebijakan pengelolaan distribusi dan arus perpindahan penduduk agar selaras dengan kebijakan tata ruang, pembangunan kewilayahan, dan keseimbangan daya dukung lingkungan.
7. Penataan Administrasi Kependudukan adalah upaya peningkatan cakupan, akurasi, integrasi, dan pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pelayanan publik.
8. Bonus Demografi adalah kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia non-produktif yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi apabila dikelola secara optimal melalui investasi pada pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.
9. Sumber Daya Manusia Unggul adalah penduduk yang memiliki kapasitas intelektual, keterampilan, kesehatan, integritas, serta daya saing tinggi yang mendukung transformasi ekonomi dan sosial daerah.
10. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki kemampuan fisik, ekonomi, sosial, dan psikologis untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan secara mandiri dan adaptif.

11. Pembangunan Inklusif adalah pendekatan pembangunan yang menjamin akses dan kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi wilayah, gender, usia, atau kondisi sosial-ekonomi.
12. Pembangunan Berkelanjutan adalah proses pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang, dengan menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
13. Perangkat Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan lembaga teknis daerah lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
14. Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan, peran, atau pengaruh terhadap penyelenggaraan pembangunan kependudukan, yang meliputi pemerintah daerah, instansi vertikal, lembaga legislatif, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, media, serta masyarakat secara luas.

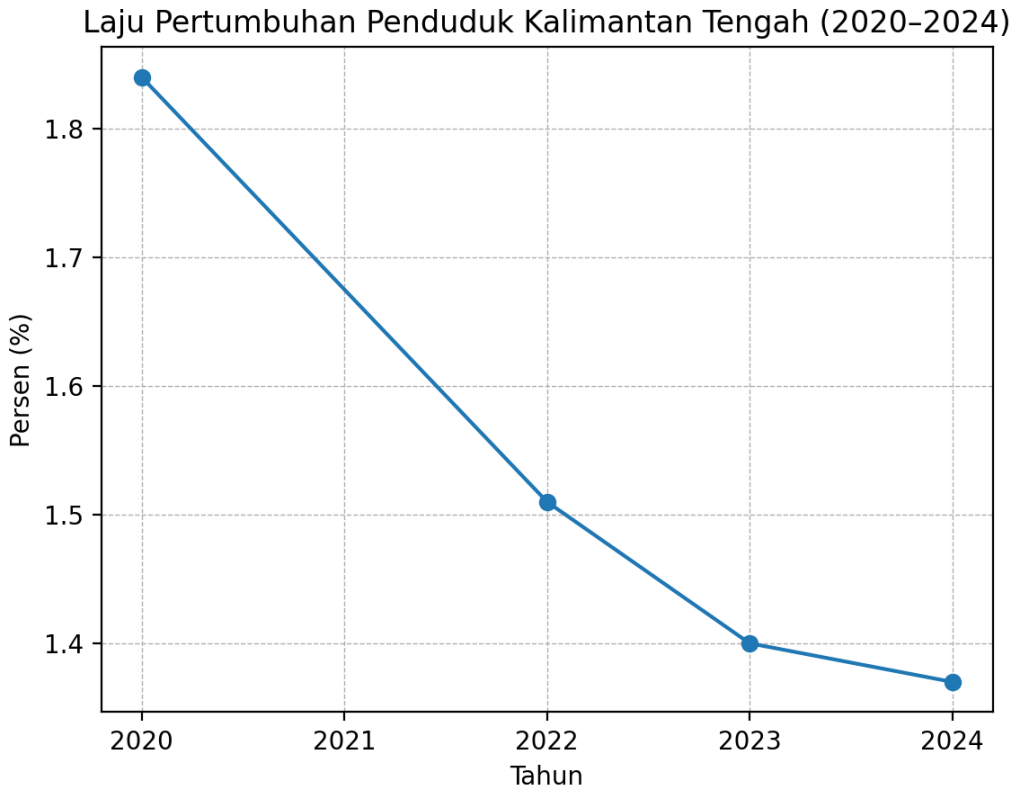
E. Analisis Situasi dan Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah

1. Gambaran Umum Kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi dengan wilayah terluas di Indonesia, dengan luas sekitar 153.564 km², namun dihuni oleh penduduk sebanyak 2.809.700 jiwa pada tahun 2024. Karakter wilayah yang sangat luas dengan kepadatan penduduk rata-rata hanya sekitar 18 jiwa/km² menciptakan tantangan struktural dalam penyediaan layanan dasar, konektivitas antarwilayah, dan efisiensi belanja publik. Kepadatan rendah bukan berarti tekanan pembangunan rendah; justru dalam konteks wilayah luas dan sebaran permukiman yang terpencar, biaya penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar menjadi relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah padat.

Secara demografis, jumlah penduduk meningkat dari 2.669.969 jiwa (2020) menjadi 2.809.700 jiwa (2024), dengan laju pertumbuhan menurun dari 1,84% menjadi 1,37%. Tren ini menunjukkan pengendalian kuantitas penduduk relatif moderat dan stabil. Namun, dalam kerangka kewilayahan, pertumbuhan penduduk tidak selalu merata. Kabupaten/kota dengan basis ekonomi perkebunan, pertambangan, dan perdagangan cenderung mengalami konsentrasi pertumbuhan dan arus migrasi masuk, sementara wilayah pedalaman tertentu menghadapi stagnasi atau bahkan potensi out-migration.

Ketimpangan spasial ini menjadi akar penting yang harus dibaca dalam pengelolaan kependudukan.

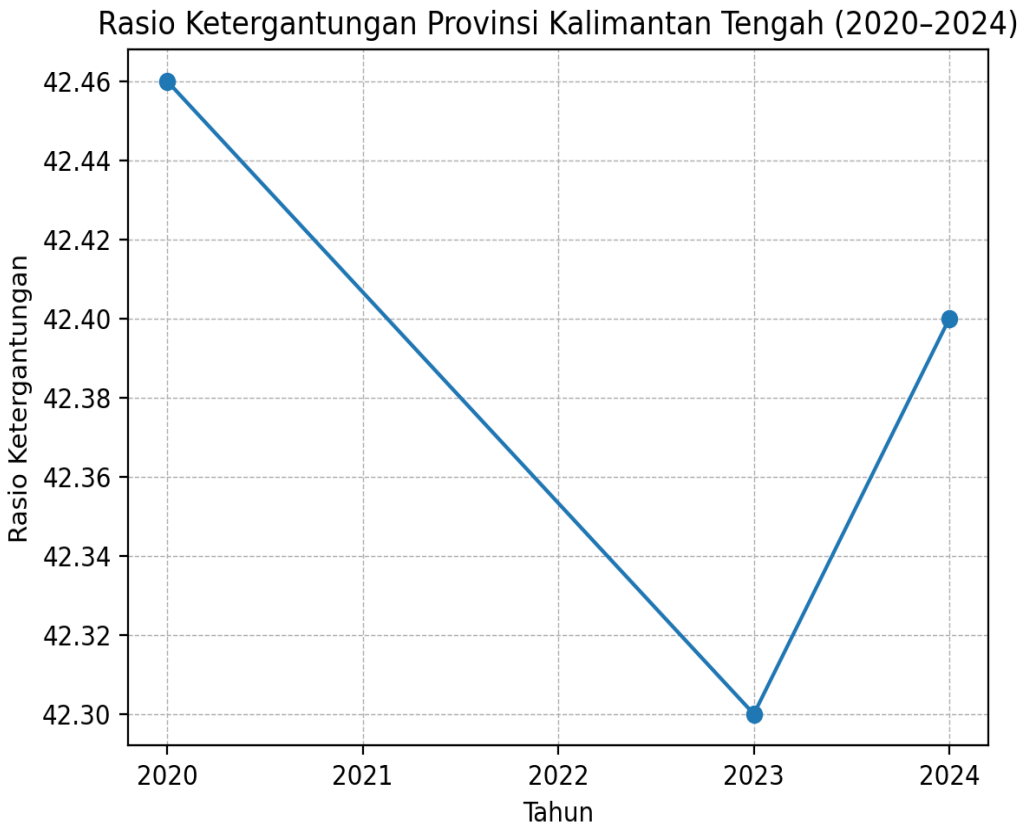


Gambar 1. Grafik Tren Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2024
Sumber : BPS

Rasio jenis kelamin tahun 2024 sebesar 106,77 mencerminkan dominasi relatif penduduk laki-laki, yang berkorelasi erat dengan struktur ekonomi berbasis sektor primer seperti perkebunan kelapa sawit, kehutanan, dan pertambangan. Pola ini menunjukkan bahwa dinamika kependudukan Kalimantan Tengah sangat dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi ekstraktif dan agroindustri. Ketergantungan pada sektor primer berimplikasi pada fluktuasi ekonomi regional, sensitivitas terhadap harga komoditas global, serta pola migrasi tenaga kerja yang cenderung maskulin dan temporer.

Struktur umur penduduk menunjukkan rasio ketergantungan sekitar 42,4 pada tahun 2024, yang menandakan proporsi usia produktif masih dominan. Kondisi ini membuka peluang optimalisasi bonus demografi. Namun, proporsi lansia yang meningkat menjadi 8,81% (2024) mengindikasikan percepatan transisi menuju masyarakat menua. Dengan demikian, Kalimantan Tengah berada dalam fase simultan: memanfaatkan bonus demografi sekaligus mempersiapkan sistem dukungan sosial bagi populasi lansia. Tantangan strukturalnya adalah memastikan bahwa usia

produktif benar-benar terserap dalam lapangan kerja berkualitas dan tidak terjebak dalam pekerjaan informal atau berproduktivitas rendah.



Gambar 2. Grafik Tren Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 - 2024
Sumber : BPS

Dari sisi sosial-ekonomi, indikator makro menunjukkan dinamika yang relatif stabil namun masih menyisakan tantangan. Tingkat Pengangguran Terbuka berada pada kisaran 4,01% (2024), Gini Ratio sekitar 0,301, dan angka kemiskinan sekitar 5,17%. Meskipun ketimpangan relatif rendah dibanding rata-rata nasional, disparitas antarwilayah dan antar kelompok sosial masih terlihat, terutama antara wilayah perkotaan dan perdesaan serta antara kawasan yang terkoneksi infrastruktur dengan kawasan terpencil. Struktur ekonomi yang masih bertumpu pada sektor primer juga berimplikasi pada volatilitas pendapatan rumah tangga, khususnya ketika terjadi fluktuasi harga komoditas.

Kondisi sosial-ekonomi tersebut berpengaruh langsung terhadap dinamika keluarga dan keputusan reproduksi. Di wilayah dengan tingkat kemiskinan lebih tinggi atau akses pendidikan menengah yang terbatas, risiko perkawinan usia muda dan fertilitas remaja cenderung lebih tinggi. Hal ini tercermin dalam indikator ASFR 15–19 yang masih berada pada 38,4 (2024). Dengan demikian, persoalan fertilitas remaja bukan

semata isu kesehatan reproduksi, melainkan terkait erat dengan ketahanan ekonomi keluarga, akses pendidikan, norma sosial, dan literasi kesehatan.

Selain itu, urbanisasi yang meningkat hingga sekitar 43,65% (2024) menunjukkan pergeseran pola permukiman dan aktivitas ekonomi. Perpindahan penduduk ke pusat-pusat kota dan kawasan pertumbuhan ekonomi memicu kebutuhan perumahan layak, sanitasi aman, dan lapangan kerja formal. Tanpa pengelolaan yang terintegrasi, urbanisasi dapat menciptakan tekanan baru berupa kawasan permukiman tidak layak, pekerja informal, dan kerentanan sosial di wilayah perkotaan.

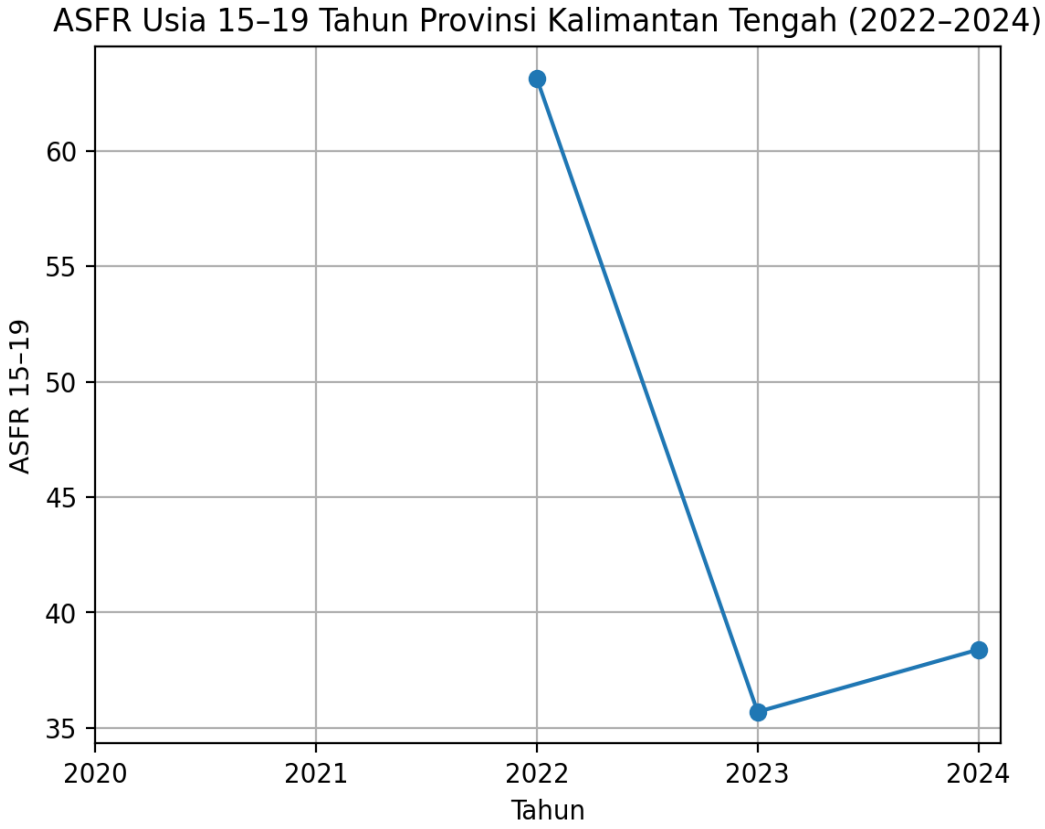
Dalam kerangka pembangunan daerah 2025–2029, kondisi demografi Kalimantan Tengah harus dibaca sebagai kombinasi peluang dan risiko. Wilayah luas dengan sumber daya alam melimpah memberikan basis ekonomi yang kuat, tetapi memerlukan tata kelola demografi yang presisi agar pertumbuhan ekonomi tidak menciptakan ketimpangan sosial dan degradasi lingkungan. Struktur usia produktif yang masih dominan merupakan momentum strategis, namun hanya akan menjadi modal pembangunan apabila disertai peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan penguatan keluarga. Oleh karena itu, analisis situasi kependudukan dalam PJPK harus selalu mengintegrasikan dimensi demografi, kewilayahan, dan sosial-ekonomi secara simultan, sehingga arah kebijakan yang dirumuskan benar-benar menjawab akar persoalan pembangunan di Kalimantan Tengah.

2. *Perkembangan dan Situasi Kependudukan Berdasarkan Sasaran Pembangunan Kependudukan*

a) Sasaran 1 : Pengelolaan Kuantitas Penduduk

Pengelolaan kuantitas penduduk dalam PJPK diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara dinamika pertumbuhan penduduk dengan kapasitas wilayah dalam menyediakan layanan dasar, kesempatan kerja, serta ketahanan sosial-lingkungan. Kerangka GDPK menempatkan pengendalian kuantitas penduduk sebagai pilar pertama yang secara eksplisit memuat indikator jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, struktur umur (rasio ketergantungan), proporsi lansia, fertilitas (TFR/ASFR), serta indikator KB (CPR/MCPR, unmet need, putus pakai, MKJP). Dalam konteks Kalimantan Tengah yang memiliki karakter wilayah luas, kepadatan rendah, dan sebaran permukiman yang tersebar, pengelolaan kuantitas penduduk perlu dibaca bukan hanya sebagai “menekan angka”, melainkan sebagai upaya mengarahkan transisi demografi agar memperkuat kualitas SDM dan ketahanan keluarga.

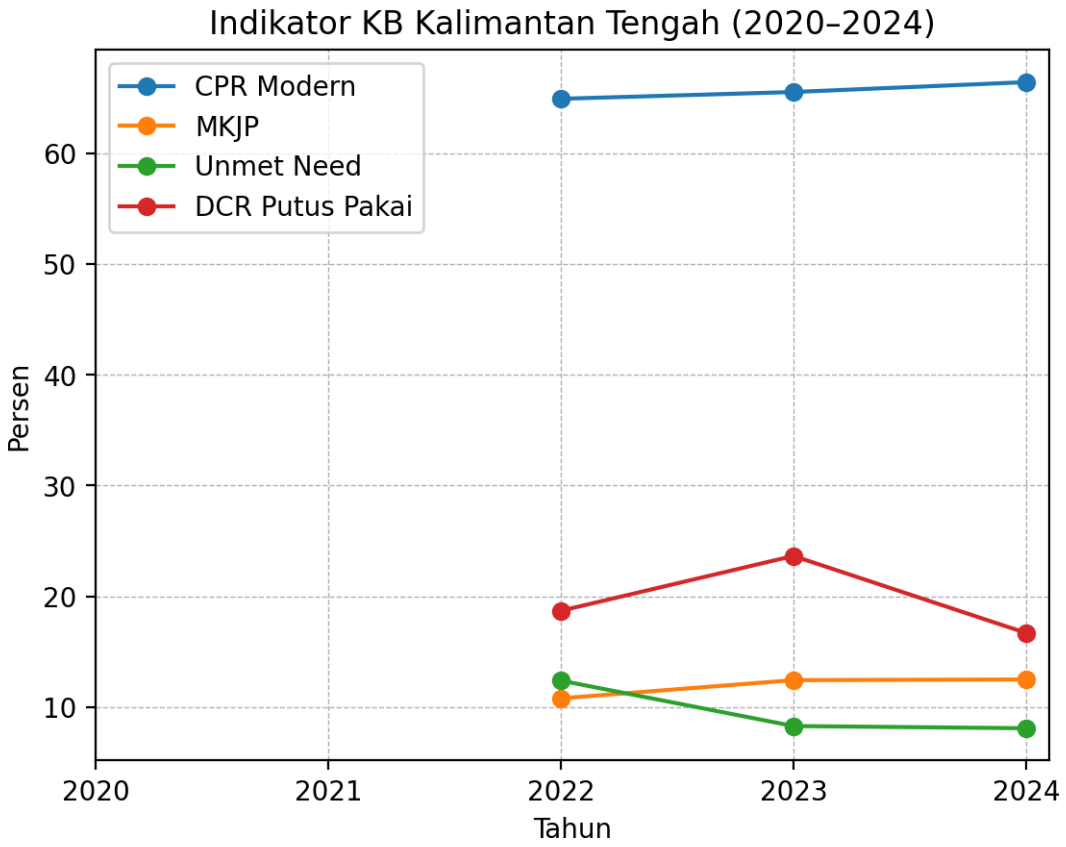
Data capaian menunjukkan bahwa TFR menurun ke 2,26 (2024), yang menunjukkan kecenderungan menuju tingkat fertilitas lebih terkendali. Namun, ASFR 15–19 (38,4 pada 2024) mengindikasikan bahwa fertilitas remaja masih menjadi titik rawan—yang umumnya berkaitan dengan kombinasi faktor: akses informasi kesehatan reproduksi, ketimpangan pendidikan (khususnya transisi ke pendidikan menengah), norma sosial terkait perkawinan/relasi gender, dan kerentanan ekonomi. Peningkatan median umur kawin pertama menjadi 20,9 (2024) adalah sinyal baik, tetapi belum otomatis menurunkan risiko kehamilan remaja; artinya intervensi harus menargetkan perilaku dan lingkungan sosial remaja (sekolah, keluarga, komunitas), bukan hanya usia kawin.



Gambar 3. Grafik Tren ASFR 15 – 19 Provinsi Kalimantan Tengah 2022 – 2024
Sumber : LF SP2020, Pendataan Keluarga 2023 – 2024

Selanjutnya, kinerja KB memperlihatkan modern CPR 66,4 (2024), MKJP 12,5 (2024), dan unmet need 8,1 (2024). Penurunan unmet need dari 12,4 (2022) ke 8,1 (2024) patut diapresiasi, namun akar masalah yang sering menentukan keberhasilan jangka panjang adalah continuation rate (keberlanjutan pemakaian). Fluktuasi DCR (18,7 pada 2022; 23,65 pada 2023; 16,7 pada 2024) menunjukkan bahwa putus pakai masih terjadi dan dapat mengembalikan risiko kehamilan tidak direncanakan. Ini biasanya terkait kualitas konseling, manajemen efek samping, ketersediaan alat/obat, jarak

layanan, serta kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan—yang pada wilayah luas dan akses terbatas menjadi determinan krusial.



Gambar 4. Grafik Tren Indikator KB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 – 2024
Sumber : Pendataan Keluarga

Sasaran pengelolaan kuantitas penduduk harus diposisikan sebagai "penjaga keseimbangan" antara pertumbuhan, kualitas, dan keberlanjutan wilayah. Agenda prioritas daerah menuntut penguatan layanan dasar, perlindungan sosial berbasis integrasi data, serta pembangunan yang merata antarwilayah. Karena itu, intervensi kuantitas penduduk perlu diarahkan pada penguatan layanan primer (khususnya kesehatan reproduksi dan KB), penguatan pengasuhan dan literasi keluarga, serta pencegahan risiko fertilitas remaja melalui ekosistem pendidikan dan komunitas. Dengan pendekatan demikian, pengendalian kuantitas penduduk tidak menjadi "program sektoral", melainkan instrumen strategis untuk memastikan bahwa pertumbuhan penduduk berjalan selaras dengan peningkatan kualitas manusia dan kohesi sosial masyarakat Kalimantan Tengah.

b) Sasaran 2 : Peningkatan Kualitas Penduduk

Peningkatan kualitas penduduk merupakan inti dari transformasi pembangunan daerah, karena kualitas sumber daya manusia menentukan produktivitas ekonomi,

ketahanan sosial, dan daya saing wilayah. Dalam kerangka pembangunan jangka menengah daerah, penguatan kualitas penduduk diarahkan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, memperpanjang harapan hidup, memperluas akses pendidikan, menurunkan stunting, serta memperkuat kapasitas tenaga kerja. Sasaran ini tidak hanya bersifat sektoral (pendidikan atau kesehatan semata), tetapi merupakan integrasi lintas dimensi pembangunan manusia sepanjang siklus kehidupan.

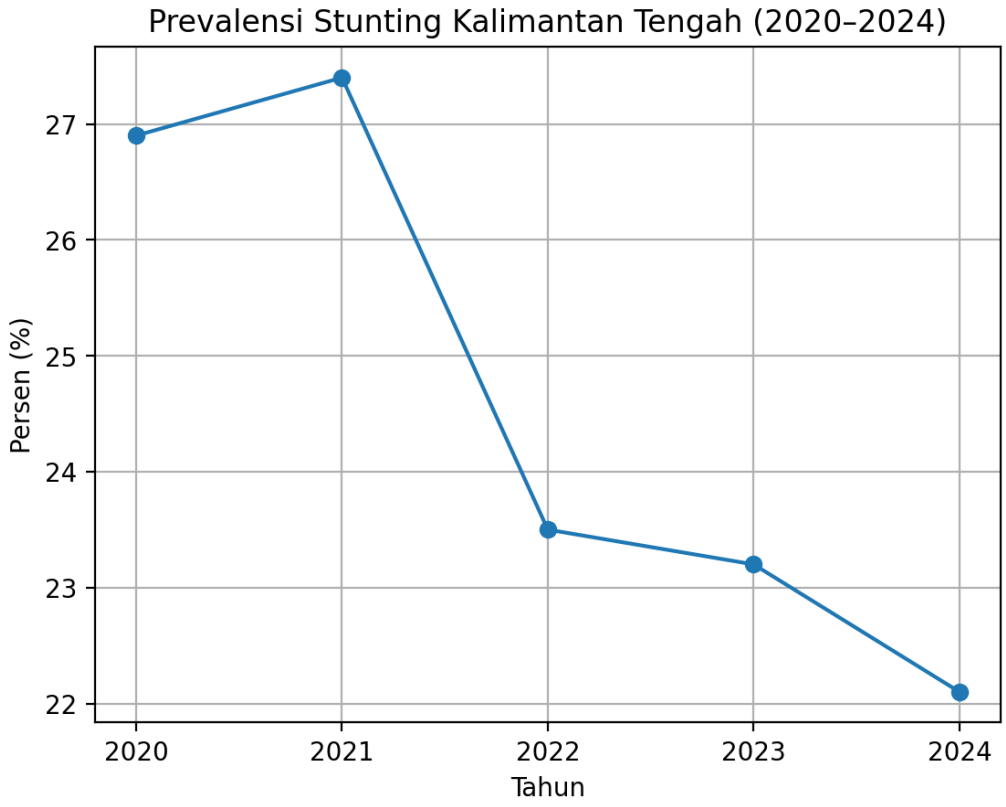
IPM Kalimantan Tengah meningkat dari 71,99 (2020) menjadi 74,28 (2024). Tren ini menunjukkan kemajuan konsisten dalam pembangunan manusia. Namun, kenaikan IPM yang gradual perlu dibaca lebih dalam: peningkatan angka tidak selalu identik dengan pemerataan kualitas. Kesenjangan antarwilayah dan antar kelompok sosial masih menjadi tantangan, terutama pada wilayah pedalaman dengan akses pendidikan dan kesehatan terbatas. Dengan luas wilayah yang besar dan kepadatan rendah, peningkatan IPM membutuhkan strategi afirmatif berbasis kewilayahan agar tidak terjadi dualisme kualitas antara kawasan perkotaan dan perdesaan terpencil.



Gambar 5. Grafik Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Tengah 2020 - 2024
Sumber : BPS

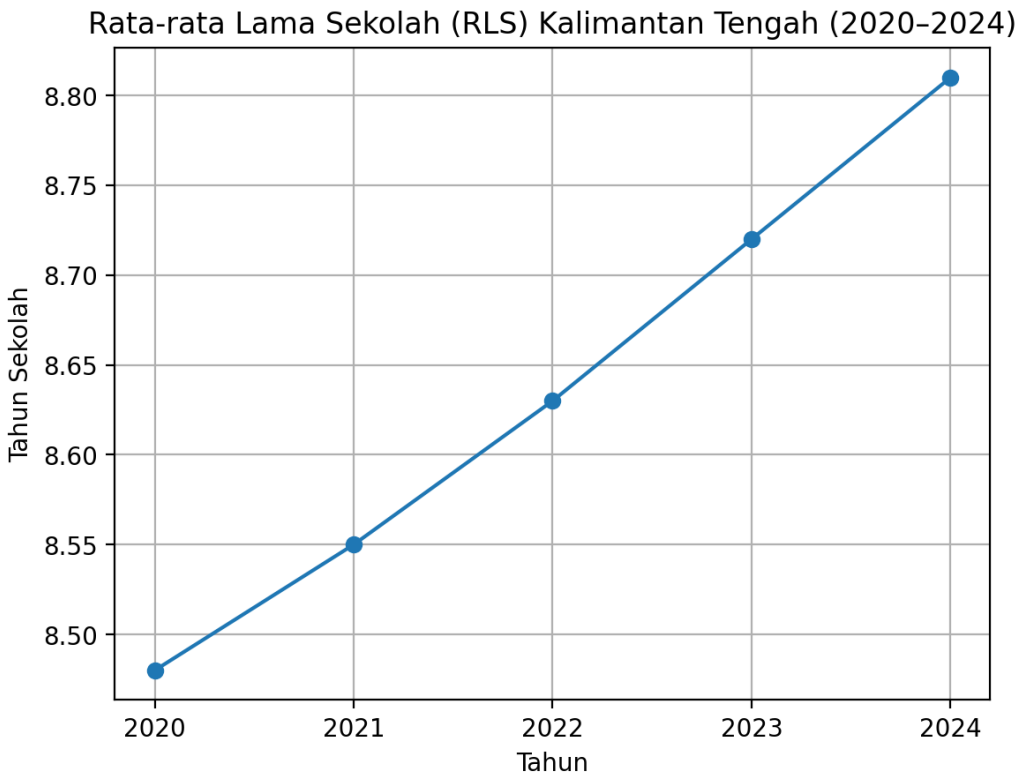
Pada dimensi kesehatan, Angka Harapan Hidup meningkat dari 72,83 tahun (2020) menjadi 73,73 tahun (2024), yang mencerminkan perbaikan layanan kesehatan dan kualitas hidup. Namun, prevalensi stunting masih berada pada 22,1% (2024).

Meskipun menurun dibanding 2020 (26,9%), angka ini menunjukkan bahwa masalah gizi kronis belum sepenuhnya teratasi. Akar persoalan stunting bukan semata akses layanan kesehatan, melainkan keterkaitan antara kemiskinan, sanitasi, kualitas air minum, pola asuh, literasi gizi, serta kondisi sosial-ekonomi keluarga. Dengan struktur ekonomi berbasis sektor primer dan sebaran permukiman terpencar, intervensi gizi memerlukan pendekatan berbasis keluarga dan komunitas yang terintegrasi dengan sanitasi dan perlindungan sosial.



Gambar 6. Grafik Tren Prevalensi Stunting Provinsi Kalimantan Tengah 2020 – 2024
Sumber : SSGI / SKI

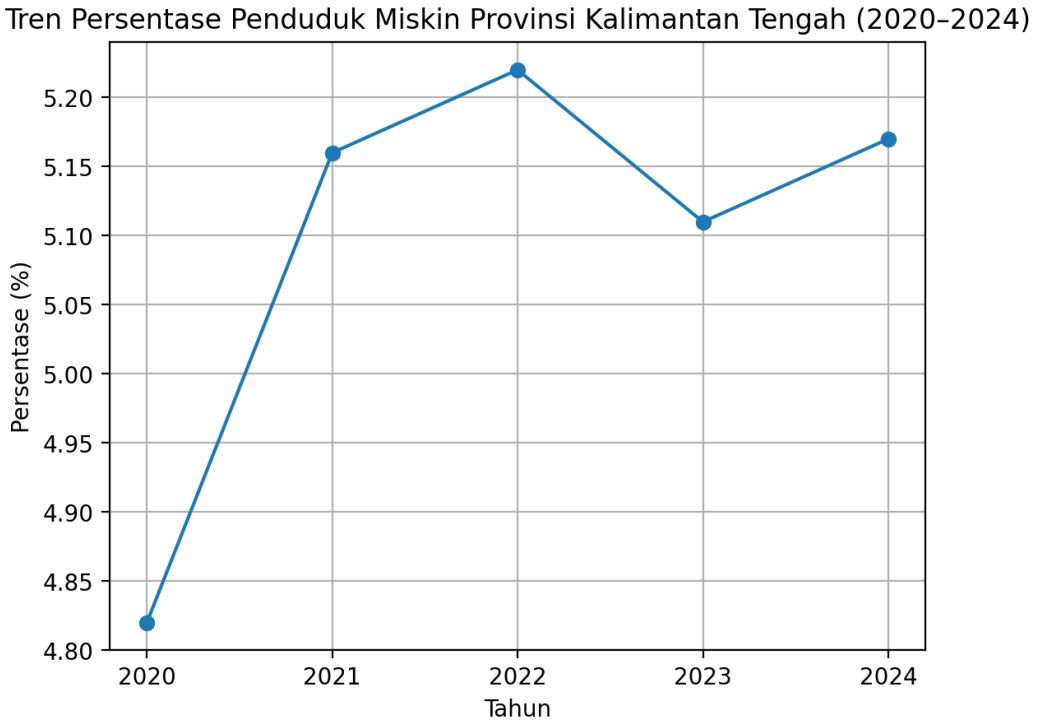
Pada dimensi pendidikan, Rata-rata Lama Sekolah meningkat dari 8,48 tahun (2020) menjadi 8,81 tahun (2024). Peningkatan ini menunjukkan perbaikan akses pendidikan, tetapi masih mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk belum menyelesaikan pendidikan menengah penuh. Dalam konteks pembangunan jangka panjang, peningkatan RLS harus diiringi dengan peningkatan kualitas pembelajaran dan transisi ke pendidikan menengah atas serta pendidikan vokasi. Tantangan geografis, jarak sekolah, dan keterbatasan infrastruktur pendidikan di wilayah terpencil menjadi akar masalah yang mempengaruhi capaian indikator pendidikan.



Gambar 7. Grafik Tren Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Kalimantan Tengah 2020 – 2024
Sumber : SSGI / SKI

Selanjutnya dari sisi ekonomi menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kalimantan Tengah berada pada kisaran 5,17%–5,26% pada periode 2024–2025, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 145–149 ribu jiwa tergantung periode pengukuran semesteran serta fluktuasi capaian yang cukup kentara dari tahun 2020. Kondisi ini menegaskan bahwa kemiskinan belum sepenuhnya teratasi meskipun berbagai indikator pembangunan manusia menunjukkan tren perbaikan. Secara struktural, kemiskinan di Kalimantan Tengah bersifat multidimensional, dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap lapangan kerja yang berkualitas, rendahnya produktivitas tenaga kerja, serta dominasi pekerjaan informal berpenghasilan rendah. Tingkat pengangguran terbuka yang relatif rendah (sekitar 4%) tidak serta-merta mencerminkan kualitas kesempatan kerja yang memadai, karena sebagian penduduk bekerja dalam sektor informal atau pekerjaan dengan nilai tambah rendah yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Ketergantungan pada sektor primer seperti perkebunan dan pertambangan semakin memperkuat kerentanan tersebut, terutama ketika terjadi guncangan harga komoditas global, sehingga kemampuan rumah tangga untuk

memenuhi kebutuhan dasar dan keluar dari garis kemiskinan menjadi sangat dipengaruhi oleh stabilitas dan diversifikasi struktur ekonomi daerah.



Gambar 8. Grafik Tren Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Tengah 2020 - 2024
Sumber : BPS

c) Sasaran 3 : Pembangunan Keluarga

Sebagaimana telah ditegaskan pada sasaran sebelumnya, kualitas penduduk pada akhirnya bermuara pada kapasitas keluarga sebagai unit dasar pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan keluarga tidak dapat diposisikan sebagai agenda sektoral, melainkan sebagai simpul strategis yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan lingkungan hunian. Dalam konteks Provinsi Kalimantan Tengah, indikator utama yang merepresentasikan kondisi pembangunan keluarga adalah Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga).

Berdasarkan dokumen capaian indikator provinsi, nilai iBangga Kalimantan Tengah meningkat signifikan dari 51,6 (2021) menjadi 54,2 (2022), lalu melonjak menjadi 62,6 (2023) dan relatif stabil pada 62,7 (2024). Kenaikan tajam periode 2022–2023 menunjukkan penguatan dimensi ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Namun demikian, stabilisasi pada 2024 mengindikasikan bahwa fase berikutnya bukan lagi sekadar ekspansi program, melainkan konsolidasi kualitas intervensi agar peningkatan indeks bersifat struktural dan berkelanjutan.



Gambar 9. Grafik Tren Indeks Pembangunan Keluarga Provinsi Kalimantan Tengah 2021 – 2024
Sumber : Pendataan Keluarga

Meskipun indeks menunjukkan perbaikan, pembangunan keluarga tidak dapat dilepaskan dari kondisi objektif lingkungan tempat keluarga tinggal. Lingkungan fisik yang sehat merupakan prasyarat ketahanan keluarga. Dalam hal ini, persentase rumah tangga dengan rumah layak huni meningkat dari 51,97% (2020) menjadi 59,92% (2024). Tren ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas hunian, namun fakta bahwa sekitar 40% rumah tangga belum sepenuhnya berada dalam kategori layak huni menjadi catatan penting dalam agenda pembangunan keluarga.



Gambar 10. Grafik Tren Persentase Rumah Tangga dengan Rumah Layak Huni Prov Kalteng Tahun 2020 - 2024
Sumber : Susenas

Lebih lanjut, kualitas lingkungan keluarga juga tercermin dari akses terhadap sanitasi layak. Data menunjukkan peningkatan dari 72,31% (2020) menjadi 78,15% (2024). Peningkatan ini sejalan dengan upaya percepatan akses sanitasi berbasis komunitas. Namun demikian, masih terdapat lebih dari 20% rumah tangga yang belum menikmati sanitasi layak, yang berpotensi memengaruhi risiko penyakit berbasis lingkungan, kualitas tumbuh kembang anak, serta produktivitas keluarga secara keseluruhan.

Lebih jauh lagi, dinamika demografi Kalimantan Tengah yang menunjukkan peningkatan proporsi lansia hingga 8,81% pada tahun 2024 menuntut perhatian khusus terhadap Indeks Lansia Berdaya. Peningkatan jumlah lansia bukan hanya isu kesehatan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan dukungan sosial dan ekonomi dalam keluarga. Ketika keluarga usia produktif harus menopang anak sekaligus orang tua lanjut usia, maka tekanan ekonomi dan psikososial dapat meningkat. Oleh sebab itu, pembangunan keluarga harus diarahkan untuk memastikan lansia tetap sehat, produktif, dan terlibat dalam kehidupan sosial, sehingga tidak sepenuhnya menjadi beban ketergantungan dalam rumah tangga.

d) Sasaran 4 : Pemerataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Penataan persebaran dan mobilitas penduduk merupakan dimensi strategis dalam pembangunan kependudukan, terutama bagi provinsi dengan karakteristik geografis

luas dan kepadatan rendah seperti Kalimantan Tengah. Dengan luas wilayah yang sangat besar dan distribusi penduduk yang tidak merata, tantangan utama bukan semata pertumbuhan jumlah penduduk, tetapi bagaimana penduduk tersebar secara seimbang agar pembangunan tidak terpusat dan tidak menimbulkan ketimpangan antarwilayah. Oleh karena itu, sasaran ini menitikberatkan pada penguatan basis komunitas melalui Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri serta pengelolaan dinamika kepadatan penduduk secara adaptif.

Indikator pertama, Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri, merepresentasikan kapasitas wilayah dalam mengintegrasikan layanan keluarga secara mandiri dan berkelanjutan. Pada tahun 2024, persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri Provinsi Kalimantan Tengah tercatat sebesar 18,78%, yang masih jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 32,26%. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa transformasi kampung dari tahap berkembang menuju tahap mandiri di Kalimantan Tengah masih menghadapi tantangan struktural yang signifikan.

Secara substantif, angka 18,78% tersebut mengindikasikan bahwa kurang dari seperlima kampung di Kalimantan Tengah telah memiliki kapasitas kelembagaan, integrasi program, dan keberlanjutan kegiatan yang memenuhi kriteria mandiri. Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, terdapat selisih lebih dari 13 poin persentase, yang mencerminkan perlunya akselerasi penguatan kelembagaan kampung, integrasi lintas perangkat daerah, serta dukungan pembiayaan yang lebih sistematis. Kondisi ini tidak terlepas dari karakteristik geografis Kalimantan Tengah yang luas, kepadatan rendah, serta tantangan aksesibilitas wilayah pedalaman.

Lebih lanjut, rendahnya proporsi kampung mandiri memiliki implikasi langsung terhadap pemerataan kualitas pembangunan keluarga. Pada wilayah dengan kapasitas kampung yang belum mandiri, integrasi layanan seperti edukasi keluarga, kesehatan reproduksi, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi belum berjalan optimal dan cenderung bersifat programatik jangka pendek. Sebaliknya, kampung yang telah mencapai status mandiri menunjukkan kemampuan mengelola intervensi secara berkelanjutan dan partisipatif. Oleh karena itu, peningkatan persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri menjadi instrumen penting dalam strategi penataan persebaran pembangunan berbasis keluarga.

Sementara itu, indikator kedua, Kepadatan Penduduk, memberikan gambaran objektif mengenai distribusi penduduk dalam ruang wilayah. Berdasarkan data capaian

provinsi, kepadatan penduduk Kalimantan Tengah meningkat dari 17,39 jiwa/km² (2020) menjadi 18,06 jiwa/km² (2023) dan relatif stabil pada 18 jiwa/km² (2024). Angka ini menunjukkan bahwa secara agregat provinsi masih berada dalam kategori kepadatan rendah dibandingkan rata-rata nasional. Namun, angka rata-rata provinsi tersebut menyembunyikan konsentrasi penduduk yang tinggi di wilayah perkotaan seperti Palangka Raya dan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi.

Fenomena tersebut mengindikasikan adanya kecenderungan urbanisasi yang secara perlahan meningkatkan tekanan pada kawasan perkotaan, sementara sebagian wilayah pedalaman tetap mengalami keterbatasan akses layanan dasar. Dengan demikian, tantangan penataan persebaran penduduk bukan hanya mendorong migrasi, tetapi memastikan bahwa pusat-pusat pertumbuhan baru berkembang secara merata sehingga mobilitas penduduk tidak terkonsentrasi pada satu wilayah saja.

Keterkaitan antara kepadatan penduduk dan Kampung Keluarga Berkualitas menjadi penting dalam konteks ini. Pada wilayah dengan kepadatan rendah, pelayanan publik menghadapi tantangan jarak dan biaya distribusi layanan. Sebaliknya, pada wilayah dengan kepadatan tinggi, tekanan terhadap infrastruktur, sanitasi, dan hunian dapat meningkat. Oleh karena itu, penguatan Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri dapat berfungsi sebagai instrumen desentralisasi layanan sosial dan kependudukan, sehingga kualitas keluarga tidak hanya bergantung pada kedekatan dengan pusat kota.

Selain itu, dinamika migrasi risen dan migrasi seumur hidup yang tercatat dalam sensus sebelumnya juga menunjukkan bahwa mobilitas penduduk di Kalimantan Tengah dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan peluang kerja. Jika tidak diantisipasi melalui kebijakan persebaran penduduk yang terarah, maka konsentrasi ekonomi dan penduduk di wilayah tertentu dapat memperlebar ketimpangan pembangunan. Dalam konteks ini, sasaran penataan persebaran penduduk harus dikaitkan dengan kebijakan pengembangan kawasan strategis, penyediaan infrastruktur dasar, dan penguatan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah.

Dengan demikian, analisis kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa penataan persebaran dan mobilitas penduduk di Kalimantan Tengah memerlukan pendekatan dualistik: di satu sisi memperkuat basis keluarga melalui Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri sebagai simpul pembangunan sosial, dan di sisi lain mengelola distribusi penduduk melalui kebijakan kewilayahan yang adaptif terhadap karakter

geografis provinsi. Tanpa integrasi kedua dimensi tersebut, risiko ketimpangan spasial dan ketidakseimbangan pembangunan akan terus berulang dalam siklus pembangunan jangka panjang.

e) Sasaran 5 : Penataan Administrasi Kependudukan

Sasaran kelima dalam PJPK Provinsi Kalimantan Tengah menitikberatkan pada penguatan sistem administrasi kependudukan dan integrasi data sebagai fondasi tata kelola pembangunan yang efektif. Administrasi kependudukan bukan sekadar pencatatan sipil, melainkan infrastruktur dasar kebijakan publik. Tanpa data kependudukan yang lengkap, akurat, dan mutakhir, intervensi pembangunan berisiko tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, analisis situasi pada sasaran ini berfokus pada indikator cakupan dokumen kependudukan, perlindungan sosial, serta indeks pembangunan berwawasan kependudukan.

Indikator pertama yang krusial adalah Cakupan Akta Kelahiran (Usia 0–17 Tahun). Berdasarkan data capaian provinsi, cakupan akta kelahiran meningkat dari 86,96% (2021) menjadi 91,38% (2024). Capaian ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam perlindungan hak sipil anak. Namun demikian, masih terdapat sekitar 8–9% anak yang belum memiliki akta kelahiran, yang berpotensi menghambat akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial. Tantangan utama terletak pada wilayah terpencil dengan akses layanan pencatatan sipil yang terbatas serta rendahnya literasi administrasi di sebagian masyarakat.

Selanjutnya, Cakupan Akta Nikah tercatat sebesar 88,26% (2023). Dokumen ini memiliki implikasi langsung terhadap perlindungan hukum keluarga, hak waris, hingga akses program sosial. Masih adanya pasangan yang belum tercatat secara resmi menunjukkan perlunya sinergi antara pencatatan sipil dan layanan keagamaan/adat agar administrasi pernikahan lebih inklusif, terutama pada komunitas adat dan wilayah pedalaman.

Dari perspektif tata kelola yang lebih luas, indikator IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan) meningkat dari 55,1 (2020) menjadi 63,6 (2024). Peningkatan ini menunjukkan semakin kuatnya integrasi isu kependudukan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Namun demikian, capaian tersebut masih berada pada kategori menengah, sehingga memerlukan konsolidasi kebijakan

lintas sektor agar perspektif kependudukan benar-benar menjadi arus utama (mainstreaming) dalam perencanaan dan penganggaran.

Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa Kalimantan Tengah telah mengalami kemajuan dalam cakupan dokumen kependudukan dan integrasi perspektif kependudukan dalam pembangunan. Namun, masih terdapat gap pada aspek universalitas layanan, integrasi data antar sektor, serta peningkatan literasi kependudukan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan administrasi kependudukan harus diarahkan pada digitalisasi layanan, interoperabilitas data lintas perangkat daerah, serta perluasan akses pelayanan hingga ke wilayah terpencil. Tanpa fondasi data yang kuat, keberlanjutan seluruh sasaran pembangunan kependudukan akan sulit dicapai secara optimal dan berkeadilan.

F. Analisis Isu Strategis dan Respon Kebijakan menggunakan Metode PSRI (Pressure, State, Respon, Impact)

Dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan kependudukan yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah, diperlukan suatu pendekatan analitis yang mampu menjelaskan keterkaitan logis antara dinamika demografi, kondisi riil masyarakat, serta bentuk intervensi kebijakan yang ditempuh pemerintah daerah. Oleh karena itu, Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah mengadopsi pendekatan *Pressure–State–Response–Impact* (PSRI) sebagai kerangka analisis yang sistematis, komprehensif, dan terstruktur dalam memahami persoalan kependudukan secara menyeluruh.

Pendekatan PSRI memungkinkan analisis kependudukan tidak berhenti pada pemaparan angka dan statistik semata, melainkan menggali faktor-faktor pendorong yang melatarbelakangi munculnya permasalahan, menilai kondisi objektif masyarakat secara faktual, mengevaluasi respons kebijakan yang telah dan perlu dikembangkan, serta menelaah dampak yang ditimbulkan terhadap kualitas hidup penduduk. Dengan demikian, analisis kependudukan bergerak dari pendekatan deskriptif menuju pendekatan yang lebih strategis, kontekstual, dan berorientasi pada transformasi jangka panjang.

Secara konseptual, komponen *Pressure* menggambarkan berbagai tekanan demografis, sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang memengaruhi dinamika penduduk di Kalimantan Tengah. Tekanan tersebut dapat bersumber dari fertilitas usia muda, ketimpangan akses pendidikan dan layanan kesehatan, keterbatasan kesempatan kerja produktif, pola

mobilitas dan urbanisasi, hingga belum optimalnya pencatatan administrasi kependudukan. Seluruh tekanan ini tidak dipandang sebagai gejala yang berdiri sendiri, melainkan sebagai hasil interaksi antara keluarga, struktur sosial, karakter kewilayahan yang luas, serta kapasitas tata kelola pemerintahan.

Komponen *State* merepresentasikan kondisi aktual kependudukan yang diukur melalui indikator kuantitatif maupun kualitatif. Struktur umur penduduk, tingkat fertilitas, kualitas pendidikan, derajat kesehatan, ketenagakerjaan, tingkat kesejahteraan, serta kualitas kehidupan keluarga dianalisis untuk memberikan gambaran objektif mengenai situasi yang berlangsung. Tahapan ini menjadi dasar evidensial dalam menentukan urgensi permasalahan sekaligus menetapkan prioritas kebijakan yang berpijak pada data dan realitas lapangan.

Selanjutnya, komponen *Response* menggambarkan kebijakan, program, dan strategi yang dirancang oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan sebagai bentuk tanggapan terhadap tekanan dan kondisi yang dihadapi. Respons tersebut diwujudkan melalui penguatan layanan dasar, intervensi berbasis keluarga dan komunitas, peningkatan kapasitas kelembagaan desa dan kelurahan, integrasi program lintas sektor, serta optimalisasi pemanfaatan data kependudukan dalam perencanaan pembangunan. Dalam konteks ini, respons berfungsi sebagai jembatan antara analisis situasi dan rencana aksi yang operasional serta implementatif.

Adapun komponen *Impact* menunjukkan perubahan yang diharapkan maupun yang telah dicapai sebagai konsekuensi dari implementasi kebijakan. Dampak tersebut tercermin pada meningkatnya kualitas kesehatan dan pendidikan, menurunnya risiko sosial pada kelompok rentan, menguatnya ketahanan keluarga, berkurangnya kesenjangan antarwilayah, serta semakin tertib dan terintegrasinya pengelolaan data kependudukan. Analisis dampak menjadi instrumen evaluatif untuk menilai efektivitas kebijakan dalam mendorong kesejahteraan yang inklusif dan berkeadilan.

Dengan demikian, penerapan pendekatan PSRI dalam Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah bertujuan memastikan bahwa kebijakan dirumuskan secara utuh dan tidak parsial, dengan mempertimbangkan keterkaitan antara individu, keluarga, komunitas, dan wilayah dalam satu kesatuan sistem pembangunan. Melalui hubungan yang runtut antara pressure, state, response, dan impact, dokumen ini diharapkan menghasilkan arah kebijakan dan rencana aksi yang lebih terukur, tepat

sasaran, serta selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan visi transformasi jangka panjang Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun matriks analisis PSRI PJPK Provinsi Kalimantan Tengah dipaparkan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 1. Matriks Analisis PSRI Provinsi Kalimantan Tengah

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
SASARAN 1 : PENGELOLAAN KUANTITAS PENDUDUK					
1	Total Fertility Rate (TFR)	- Disparitas akses layanan KB modern antarwilayah, khususnya pedalaman dan kawasan sungai, menyebabkan penurunan fertilitas tidak merata dan memperlambat konvergensi menuju tingkat penggantian. Ketimpangan ini menunjukkan tantangan pemerataan layanan dalam kerangka transformasi wilayah berkeadilan. - Tingginya angka putus pakai kontrasepsi mencerminkan masalah keberlanjutan layanan dan kualitas konseling, sehingga kebutuhan KB tidak terpenuhi secara stabil. Kondisi ini meningkatkan risiko kehamilan tidak direncanakan yang menjaga TFR tetap relatif tinggi. - Perkawinan usia muda dan norma sosial terkait ukuran keluarga masih mempengaruhi preferensi fertilitas, terutama di wilayah dengan literasi kesehatan reproduksi yang terbatas. Hal ini memperlihatkan dimensi kultural yang perlu diintervensi berbasis nilai Huma Betang. - Keterbatasan akses pendidikan dan peluang kerja perempuan muda dapat mempercepat transisi ke pernikahan dan kelahiran pertama. Struktur peluang ini berkorelasi dengan dinamika fertilitas jangka menengah. - Ketahanan ekonomi keluarga yang belum kuat di beberapa wilayah memengaruhi kemampuan perencanaan kelahiran secara sehat dan rasional. Tekanan ekonomi dapat memperbesar volatilitas perilaku reproduksi.	TFR Kalimantan Tengah tahun 2024 tercatat 2,26, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional 2,12, dengan selisih 0,14 poin. Artinya, fertilitas provinsi masih berada di atas rata-rata nasional dan memerlukan intervensi yang lebih tersegmentasi wilayah untuk menurunkannya secara berkelanjutan.	- Penguatan layanan KB pascapersalinan dan pascakeguguran melalui standar pelayanan terpadu di seluruh fasilitas kesehatan akan diprioritaskan dalam kerangka Betang Sehat. - Optimalisasi distribusi dan keberlanjutan metode kontrasepsi modern, termasuk MKJP, akan diperluas ke wilayah pedalaman melalui pendekatan jemput bola dan dukungan logistik daerah. - Integrasi edukasi kesehatan reproduksi dalam program Betang Cerdas akan diperkuat melalui sekolah dan komunitas agar preferensi fertilitas selaras dengan peningkatan kualitas SDM. Intervensi ini mengedepankan pendekatan keluarga berbasis nilai Huma Betang. - Sinkronisasi program pemberdayaan ekonomi keluarga dalam skema Betang Makmur dan KHBS (Kartu Huma Betang Sejahtera) akan memperkuat kapasitas keluarga dalam merencanakan kelahiran secara sehat dan bertanggung jawab. - Penguatan sistem monitoring dan evaluasi lintas perangkat daerah akan memastikan intervensi fertilitas berjalan terkoordinasi dan berbasis data. Pendekatan ini memperkuat tata kelola pembangunan kependudukan yang adaptif. - Pelibatan tokoh adat/agama untuk perubahan norma fertilitas tinggi.	Penurunan TFR secara terukur akan meningkatkan investasi keluarga pada pendidikan dan kesehatan anak, mempercepat pembentukan SDM unggul, serta memperkuat fondasi bonus demografi Kalimantan Tengah menuju 2045.

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
2	Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun	- Tingginya kehamilan remaja menunjukkan masih lemahnya perlindungan dan literasi kesehatan reproduksi pada kelompok usia 15–19 tahun. Fenomena ini berdampak langsung pada kualitas pendidikan dan kesehatan generasi muda. - Putus sekolah pada remaja perempuan meningkatkan risiko perkawinan dan kehamilan dini, terutama di wilayah dengan akses pendidikan menengah yang terbatas. Hal ini memperlihatkan keterkaitan erat antara indikator pendidikan dan fertilitas remaja. -Keterbatasan layanan kesehatan ramah remaja menyebabkan akses informasi dan konseling tidak optimal. Kondisi ini memperbesar risiko perilaku seksual berisiko tanpa pendampingan. - Faktor sosial-ekonomi keluarga rentan dapat melemahkan fungsi pengasuhan dan pengawasan remaja. Ketahanan keluarga yang rendah berkorelasi dengan peningkatan fertilitas usia muda. - Koordinasi lintas sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu desain intervensi remaja. Fragmentasi kebijakan memperlambat penurunan ASFR.	- ASFR 15–19 tahun Kalimantan Tengah tahun 2024 sebesar 38,4, jauh lebih tinggi dibandingkan nasional 20,88. Selisih sebesar 17,52 poin menunjukkan fertilitas remaja menjadi isu krusial kualitas penduduk provinsi. - Secara tren, ASFR 15 - 19 di Kalimantan Tengah juga selalu menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi daripada angka nasional. Menunjukkan bahwa Perkawinan Usia Anak atau kehamilan bagi PUS usia remaja masih menjadi tantangan yang besar di Kalimantan Tengah.	- Pencegahan putus sekolah melalui afirmasi akses pendidikan menengah dalam program Betang Cerdas akan diperkuat sebagai instrumen protektif terhadap kehamilan dini. - Pengembangan layanan kesehatan ramah remaja di seluruh puskesmas akan diintegrasikan dalam kerangka Betang Sehat untuk memastikan konseling yang aman dan tidak diskriminatif. - Pendampingan keluarga berbasis nilai Huma Betang akan diperluas untuk memperkuat komunikasi orang tua–remaja dan membangun ketahanan keluarga. - Intervensi tersegmentasi pada kabupaten/kota dengan ASFR tinggi akan dilaksanakan melalui program terpadu pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak. - Integrasi dukungan sosial melalui KHBS akan menyasar keluarga rentan agar remaja tetap memiliki akses pendidikan dan layanan kesehatan secara berkelanjutan. - Penguatan Kampung KB sebagai pusat edukasi keluarga. - Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan & tokoh adat/agama. - Penguatan Forum Anak, PIK-R & Forum GenRe untuk edukasi remaja.	Penurunan ASFR remaja secara signifikan akan meningkatkan keberlanjutan pendidikan perempuan, menurunkan risiko kematian ibu-bayi, dan memperkuat daya saing SDM Kalimantan Tengah.

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
3	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi (*Demand satisfied*)	- Tingginya angka putus pakai kontrasepsi menunjukkan tantangan keberlanjutan penggunaan metode modern yang berpengaruh langsung terhadap stabilitas pemenuhan kebutuhan KB. - Ketimpangan ketersediaan metode kontrasepsi modern antarwilayah terutama pada daerah terpencil memperbesar potensi unmet need. - Kualitas konseling dan manajemen efek samping yang belum merata meningkatkan risiko penghentian penggunaan metode. - Hambatan geografis dan keterbatasan konektivitas memperlemah kunjungan ulang dan kontrol lanjutan layanan KB modern. - Koordinasi pembiayaan dan tata kelola lintas perangkat daerah dalam pelayanan KB belum sepenuhnya terintegrasi.	Indikator kebutuhan KB terpenuhi dalam RPJMD tercatat 88,80 sebagai basis perencanaan, dengan mCPR Kalimantan Tengah tahun 2024 sebesar 66,4% dibanding nasional 62,94%, namun tetap menghadapi tantangan unmet need nasional sebesar 11,92% sebagai pembanding struktural.	- Peningkatan kualitas konseling dan tindak lanjut pengguna kontrasepsi akan diperkuat dalam kerangka Betang Sehat guna menekan angka putus pakai. - Distribusi metode kontrasepsi modern termasuk MKJP akan diperluas melalui pelayanan mobile dan dukungan logistik daerah untuk menjamin pemerataan akses. - Edukasi perencanaan keluarga berbasis komunitas Huma Betang akan diperkuat untuk meningkatkan penerimaan sosial terhadap KB modern. - Sinergi dengan pembangunan konektivitas dan infrastruktur dasar RPJMD - Monitoring berbasis data lintas sektor akan ditingkatkan untuk memastikan capaian demand satisfied meningkat secara terukur dan konsisten.	Peningkatan demand satisfied akan menurunkan kehamilan tidak diinginkan, memperbaiki kesehatan ibu-anak, dan memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi transformasi demografi hijau dan berkeadilan.
SASARAN 2 : PENINGKATAN KUALITAS PENDUDUK					

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
4	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	- Ketimpangan akses pendidikan menengah dan tinggi antarwilayah, terutama pada daerah pedalaman dan wilayah berbasis sungai, menyebabkan akumulasi tahun sekolah tidak merata dan menahan peningkatan kualitas SDM provinsi. - Putus sekolah pada jenjang SMP dan SMA masih terjadi pada kelompok keluarga rentan akibat tekanan ekonomi dan keterbatasan dukungan sosial. - Keterbatasan infrastruktur pendidikan, tenaga pendidik berkualitas, dan konektivitas digital mempengaruhi efektivitas pembelajaran terutama di wilayah terpencil. - Rendahnya transisi lulusan SMA ke pendidikan tinggi atau vokasi berdampak pada stagnasi peningkatan rata-rata lama sekolah. - Ketimpangan gender dan beban domestik pada remaja perempuan di beberapa wilayah.	Rata-Rata Lama Sekolah Kalimantan Tengah tahun 2024 tercatat 8,87 tahun, masih berada di bawah rata-rata nasional sekitar 9,22 tahun, menunjukkan selisih yang mencerminkan perlunya akselerasi peningkatan akses dan keberlanjutan pendidikan menengah sebagai bagian dari transformasi SDM unggul.	- Penguatan akses dan afirmasi pendidikan menengah dalam program Betang Cerdas akan difokuskan pada wilayah dengan RLS rendah melalui dukungan biaya, transportasi, dan fasilitas asrama. - Integrasi Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) untuk keluarga rentan akan memastikan keberlanjutan pendidikan anak melalui bantuan pendidikan berbasis data terpadu. - Pengembangan pembelajaran berbasis digital dan penguatan konektivitas sekolah akan dipercepat untuk menutup kesenjangan wilayah dalam kerangka transformasi digital daerah. - Peningkatan kualitas dan distribusi tenaga pendidik akan dilakukan melalui skema insentif dan redistribusi berbasis kebutuhan wilayah. - Penguatan kolaborasi dengan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja.	Peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas mencapai target RPJMD, serta penurunan angka putus sekolah dan peningkatan akses pendidikan menengah

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
5	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi	- Keterbatasan akses perguruan tinggi di beberapa wilayah menyebabkan partisipasi pendidikan tinggi terkonsentrasi di kota tertentu dan menciptakan kesenjangan antarwilayah. - Hambatan ekonomi keluarga masih menjadi faktor dominan yang menahan lulusan SMA melanjutkan pendidikan tinggi. - Rendahnya literasi perencanaan karier dan minimnya informasi beasiswa mengurangi aspirasi melanjutkan pendidikan tinggi pada remaja. - Ketidaksesuaian program studi dengan kebutuhan pasar kerja daerah dapat menurunkan minat masyarakat terhadap pendidikan tinggi. - Faktor geografis dan biaya hidup di kota pendidikan menjadi beban tambahan bagi mahasiswa dari wilayah terpencil.	APK Pendidikan Tinggi Kalimantan Tengah tahun 2024 berada pada kisaran 27,49%, masih relatif di bawah rata-rata nasional yang telah mencapai 32%, menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan tinggi provinsi memerlukan percepatan untuk meningkatkan daya saing SDM.	- Afirmasi pendidikan tinggi dalam kerangka Betang Cerdas akan diperluas melalui skema beasiswa daerah dan kemitraan dengan perguruan tinggi nasional. - Penguatan program “satu keluarga satu sarjana” akan didorong melalui integrasi dukungan KHBS bagi keluarga berpenghasilan rendah untuk mendukung meningkatnya akses pendidikan tinggi, secara khusus bagi keluarga berpenghasilan rendah. - Pengembangan pendidikan vokasi dan politeknik berbasis kebutuhan industri lokal akan dipercepat untuk meningkatkan relevansi pendidikan tinggi. - Kerja sama antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam skema magang terintegrasi akan meningkatkan daya tarik pendidikan tinggi. - Pemanfaatan pembelajaran daring dan hybrid akan diperluas untuk menjangkau mahasiswa dari wilayah terpencil secara lebih inklusif.	- Peningkatan APK Pendidikan Tinggi akan memperkuat daya saing SDM Kalteng serta mendorong inovasi daerah. - Meningkatnya jumlah mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang dapat mengakses pendidikan tinggi sehingga terjadi peningkatan proporsi penduduk berpendidikan tinggi untuk mendukung pembangunan daerah.

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
6	Persentase Penduduk Bersertifikat Kompetensi / Proxy : Jumlah Tenaga Kerja Tersertifikasi	- Rendahnya proporsi tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi membatasi daya saing tenaga kerja daerah dalam menghadapi transformasi ekonomi. - Keterbatasan akses pelatihan berbasis kompetensi dan lembaga sertifikasi di wilayah tertentu memperlebar kesenjangan kualitas tenaga kerja. - Ketidaksesuaian keterampilan lulusan pendidikan formal dengan kebutuhan industri daerah menghambat produktivitas dan penyerapan tenaga kerja. - Minimnya budaya peningkatan kompetensi berkelanjutan pada sektor informal mengurangi adaptabilitas tenaga kerja terhadap perubahan teknologi. - Transformasi digital dan ekonomi hijau menuntut standar kompetensi baru yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh sistem pelatihan daerah.	Persentase penduduk bersertifikat kompetensi Kalimantan Tengah tahun 2024 tercatat sekitar 8,74%, masih di bawah rata-rata nasional yang telah melampaui 10%, menunjukkan kebutuhan percepatan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui sertifikasi berbasis standar nasional.	- Penguatan pelatihan vokasi dan sertifikasi berbasis kebutuhan industri dalam kerangka Betang Makmur akan diprioritaskan pada sektor unggulan daerah seperti agroindustri dan energi terbarukan. - Kolaborasi dengan dunia usaha dan lembaga sertifikasi profesi akan diperluas untuk meningkatkan akses uji kompetensi bagi tenaga kerja muda. - Integrasi program pelatihan kerja dengan dukungan KHBS akan menyasar keluarga rentan agar memperoleh akses peningkatan kompetensi secara inklusif. - Pengembangan balai latihan kerja berbasis wilayah klaster pembangunan akan mempercepat pemerataan peningkatan keterampilan. - Peningkatan literasi digital dan sertifikasi berbasis teknologi akan dipercepat untuk mendukung transformasi ekonomi hijau dan digital provinsi.	Peningkatan tenaga kerja bersertifikat kompetensi di Kalimantan Tengah akan memperkuat produktivitas, meningkatkan investasi daerah, dan mempercepat transformasi ekonomi Kalimantan Tengah menuju wilayah yang maju dan berkeadilan.

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
7	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	- Ketimpangan akses layanan gizi, sanitasi, dan air minum layak antarwilayah menyebabkan risiko stunting lebih tinggi pada kabupaten dengan infrastruktur dasar terbatas. - Pola asuh dan literasi gizi keluarga yang belum optimal masih mempengaruhi kecukupan asupan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan. - Ketahanan ekonomi keluarga rentan berdampak pada kualitas konsumsi pangan dan keberlanjutan pemenuhan gizi anak. - Kehamilan usia muda dan jarak kelahiran yang terlalu dekat meningkatkan risiko bayi lahir dengan berat badan rendah. - Koordinasi lintas sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem intervensi berbasis data. - Akses pelayanan kesehatan ibu dan anak di wilayah pedalaman yang bergantung pada transportasi sungai atau darat jarak jauh memperbesar risiko keterlambatan deteksi gangguan pertumbuhan. - Ketimpangan akses terhadap pangan bergizi beragam akibat distribusi logistik dan harga pangan di wilayah terpencil meningkatkan risiko defisit nutrisi kronis pada anak.	Prevalensi stunting Kalimantan Tengah tahun 2024 berada pada kisaran 22,1%, masih lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sekitar 19,8%, menunjukkan perlunya percepatan konvergensi intervensi gizi secara tersegmentasi wilayah.	- Penguatan intervensi spesifik dan sensitif gizi dalam kerangka Betang Sehat akan diprioritaskan pada desa dengan prevalensi tinggi berbasis data by name by address. - Integrasi program sanitasi dan air minum layak melalui sinergi dengan kebijakan infrastruktur dasar RPJMD akan memperbaiki determinan lingkungan stunting. - Penguatan edukasi gizi dan pola asuh berbasis keluarga Huma Betang akan diperluas melalui kader desa dan posyandu. - Dukungan sosial melalui Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) akan difokuskan pada keluarga berisiko untuk menjamin kecukupan pangan dan akses layanan kesehatan ibu-anak. - Intensifikasi program pemberian TTD bagi remaja putri / ibu hamil dan juga pemberian makanan tambahan (PMT) - Monitoring konvergensi lintas sektor akan diperkuat untuk memastikan penurunan stunting berlangsung konsisten dan terukur.	- Prevalensi stunting terus mengalami penurunan sehingga mencapai target nasional 14,2% di tahun 2029 - Perbaikan gizi anak-anak dan balita sehingga tumbuh menjadi SDM berkualitas

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
8	Angka Kematian Bayi (AKB)	- Ketimpangan kualitas layanan neonatal dan imunisasi dasar antarwilayah mempengaruhi angka kelangsungan hidup bayi. - Prevalensi stunting dan gizi buruk masih menjadi faktor risiko yang meningkatkan kerentanan bayi terhadap penyakit infeksi. - Akses air minum dan sanitasi layak yang belum merata berkontribusi terhadap tingginya risiko penyakit pada bayi. - Rendahnya cakupan pemeriksaan bayi baru lahir dan kunjungan neonatal memperbesar risiko keterlambatan deteksi gangguan kesehatan. - Kondisi sosial-ekonomi keluarga rentan mempengaruhi kemampuan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas.	- AKB Kalimantan Tengah berdasarkan LF Sensus Penduduk 2020 berada pada kisaran 17,95 per 1.000 kelahiran hidup, masih sedikit lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang berada pada kisaran 16,85 per 1.000 kelahiran hidup, sehingga menunjukkan perlunya penguatan intervensi kesehatan dasar ibu dan anak.	- Penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak dalam kerangka Betang Sehat akan diprioritaskan pada wilayah dengan AKB tinggi. - Integrasi program penurunan stunting dan perbaikan gizi keluarga akan diperluas melalui pendekatan lintas sektor. - Percepatan akses air minum dan sanitasi layak akan dilakukan melalui sinergi dengan kebijakan infrastruktur dasar RPJMD. - Peningkatan cakupan imunisasi dan kunjungan neonatal akan diperkuat melalui monitoring berbasis data desa. - Dukungan sosial melalui KHBS akan memastikan keluarga rentan memiliki akses layanan kesehatan bayi secara berkelanjut.	- Penurunan AKB di Kalimantan Tengah secara konsisten - Meningkatknya kualitas generasi masa depan dan memperkuat indikator kesehatan
9	Angka Kematian Ibu (AKI)	- Keterbatasan akses layanan obstetri emergensi di wilayah terpencil meningkatkan risiko kematian ibu terutama pada kasus komplikasi persalinan. - Kualitas pemeriksaan kehamilan dan deteksi dini risiko tinggi belum sepenuhnya merata antarwilayah. - Faktor sosial-ekonomi dan keterlambatan pengambilan keputusan dalam keluarga masih mempengaruhi keterlambatan rujukan medis. - Jarak tempuh dan keterbatasan transportasi menuju fasilitas kesehatan menjadi faktor struktural dalam penanganan kasus darurat. - Kehamilan usia muda dan jarak kelahiran yang terlalu dekat berkontribusi terhadap peningkatan risiko maternal.	AKI Kalimantan Tengah berdasarkan LF SP 2020 tercatat sekitar 200 kematian per 100.000 kelahiran hidup, masih di atas rata-rata nasional yang telah menurun ke kisaran 189 per 100.000 kelahiran hidup, menunjukkan perlunya penguatan sistem rujukan maternal provinsi.	- Penguatan layanan obstetri dan neonatal emergensi komprehensif akan dipercepat dalam kerangka Betang Sehat melalui peningkatan kapasitas rumah sakit rujukan. - Optimalisasi sistem rujukan terintegrasi berbasis digital akan dilakukan untuk mempercepat respons kasus kegawatdaruratan maternal. - Edukasi perencanaan kehamilan dan jarak kelahiran akan diperkuat melalui integrasi layanan KB dalam pendekatan keluarga Huma Betang. - Penyediaan rumah tunggu kelahiran di wilayah terpencil akan diperluas untuk mengurangi risiko keterlambatan persalinan aman. - Integrasi dukungan sosial KHBS akan membantu keluarga rentan mengakses layanan kesehatan maternal tanpa hambatan biaya.	- Penurunan AKI di Kalimantan Tengah secara konsisten - Meningkatknya harapan hidup perempuan, dan mendukung pembangunan SDM unggul secara berkelanjutan.

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
10	Tingkat Kemiskinan	- Keterbatasan persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap serta konektivitas antar klaster pembangunan menyebabkan biaya distribusi barang dan mobilitas tenaga kerja tetap tinggi sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi wilayah tertinggal. - Belum meratanya pembangunan jembatan, dermaga sungai, dan akses transportasi darat pada wilayah pedalaman memperlemah integrasi ekonomi antar kabupaten dan memperbesar kesenjangan kesejahteraan. - Keterbatasan jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian yang memadai menahan produktivitas sektor pangan dan perkebunan rakyat sehingga pendapatan petani sulit meningkat secara signifikan. - Struktur ekonomi daerah yang masih didominasi sektor ekstraktif menyebabkan penciptaan lapangan kerja formal bernilai tambah tinggi belum optimal. - Rasio elektrifikasi dan kualitas pasokan listrik yang belum stabil di beberapa wilayah membatasi pengembangan usaha produktif berbasis pengolahan hasil pertanian dan UMKM lokal. - Infrastruktur digital dan konektivitas internet yang belum merata membatasi akses masyarakat miskin terhadap informasi pasar, layanan keuangan, dan peluang kerja berbasis ekonomi digital. - Kerentanan terhadap kebakaran hutan, banjir, dan degradasi lingkungan pada wilayah tertentu memperlemah ketahanan ekonomi rumah tangga berbasis lahan serta memperbesar risiko kemiskinan berulang.	Persentase penduduk miskin Kalimantan Tengah tahun 2024 tercatat sekitar 5,17%, relatif lebih rendah dibanding rata-rata nasional sekitar 8,57%, namun masih menyisakan kantong kemiskinan struktural pada wilayah tertentu.	- Percepatan peningkatan persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap serta penguatan konektivitas antar klaster pembangunan akan diprioritaskan. - Pembangunan dan rehabilitasi jembatan strategis, dermaga sungai, serta akses transportasi darat menuju sentra produksi akan dipercepat. - Penguatan jaringan irigasi, infrastruktur pertanian, dan fasilitas pascapanen akan diintegrasikan dalam program Betang Makmur. - Peningkatan rasio elektrifikasi dan stabilitas pasokan listrik akan diprioritaskan pada wilayah dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi untuk mendukung pengembangan UMKM dan industri pengolahan lokal. - Percepatan akses air minum layak dan sanitasi aman melalui sinergi lintas perangkat daerah. - Program rehabilitasi rumah tidak layak huni dan peningkatan kualitas hunian. - Perluasan infrastruktur digital dan konektivitas internet pada wilayah blank spot akan dipercepat. - Penguatan infrastruktur mitigasi bencana, rehabilitasi lahan, dan pengelolaan lingkungan berbasis ekonomi hijau.	Penurunan kemiskinan secara berkelanjutan akan memperkuat stabilitas sosial, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mempercepat transformasi wilayah inklusif.

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita	- Kesenjangan akses perempuan terhadap pekerjaan formal bernilai tambah tinggi masih dipengaruhi oleh struktur ekonomi daerah yang didominasi sektor primer berbasis tenaga kerja laki-laki. - Beban kerja domestik dan tanggung jawab pengasuhan yang tidak seimbang membatasi waktu dan fleksibilitas perempuan untuk berpartisipasi dalam pasar kerja. - Ketimpangan akses pendidikan vokasi dan sertifikasi kompetensi antarwilayah menghambat peningkatan daya saing tenaga kerja perempuan. - Keterbatasan infrastruktur pendukung seperti layanan penitipan anak dan transportasi publik yang terjangkau membatasi mobilitas kerja perempuan terutama di wilayah perkotaan dan penyangga industri. - Norma sosial dan budaya yang masih menempatkan perempuan pada peran domestik memperlambat transformasi partisipasi ekonomi perempuan secara struktural.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Wanita Kalimantan Tengah tahun 2024 tercatat sebesar 49,60%, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 56,42%, dengan selisih sebesar 6,82 poin persentase, yang menunjukkan bahwa partisipasi ekonomi perempuan di provinsi ini masih tertinggal secara signifikan dan memerlukan intervensi struktural untuk meningkatkan akses, kualitas, dan inklusivitas kesempatan kerja perempuan.	- Penguatan pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi bagi perempuan dalam kerangka Betang Makmur. - Pengembangan dukungan layanan pengasuhan anak dan ruang kerja ramah perempuan akan didorong melalui sinergi Betang Harmoni dan kebijakan ketenagakerjaan inklusif. - Afirmasi akses pendidikan tinggi dan pelatihan digital bagi perempuan akan diperluas dalam kerangka Betang Cerdas untuk meningkatkan kesiapan memasuki sektor formal. - Penguatan kewirausahaan perempuan berbasis UMKM dan koperasi akan difasilitasi melalui akses pembiayaan dan pendampingan usaha. - Integrasi perlindungan sosial melalui KHBS akan memastikan perempuan kepala keluarga memperoleh dukungan untuk mempertahankan partisipasi kerja secara berkelanjutan.	Peningkatan TPAK Wanita Kalimantan Tengah yang dapat memperkuat daya beli keluarga, meningkatkan produktivitas ekonomi daerah, dan mempercepat transformasi pembangunan inklusif berbasis nilai Huma Betang.

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
12	Persentase Pekerja Informal	- Struktur ekonomi Kalimantan Tengah yang masih bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan, dan usaha mikro menyebabkan proporsi pekerja informal relatif tinggi. - Keterbatasan akses sertifikasi kompetensi dan pendidikan vokasi mempersempit peluang transisi pekerja informal menuju sektor formal. - Infrastruktur industri dan kawasan ekonomi yang belum merata antarwilayah membatasi penciptaan lapangan kerja formal berkualitas. - Rendahnya akses pembiayaan dan legalitas usaha membuat pelaku usaha kecil tetap berada dalam kategori informal tanpa perlindungan kerja memadai. - Ketimpangan literasi keuangan dan administrasi usaha menghambat proses formalisasi usaha mikro dan kecil.	Persentase pekerja informal di Kalimantan Tengah tahun 2024 tercatat sebesar 69,35%, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 75,39%, yang menunjukkan bahwa meskipun struktur ketenagakerjaan provinsi relatif lebih formal dibanding rata-rata nasional, proporsi pekerja tanpa perlindungan kerja formal masih sangat dominan dan mencerminkan tantangan produktivitas serta jaminan sosial tenaga kerja.	- Pengembangan kawasan industri dan klaster ekonomi berbasis kewilayahan. - Program sertifikasi kompetensi dan pelatihan kerja akan diperluas untuk memfasilitasi transisi pekerja informal ke sektor formal. - Fasilitasi legalitas usaha, digitalisasi UMKM, dan akses pembiayaan formal akan diperkuat untuk mendorong formalisasi usaha kecil. - Integrasi pekerja informal dalam skema perlindungan sosial dan JKN akan diperluas untuk meningkatkan keamanan kerja. - Penguatan literasi keuangan dan administrasi usaha berbasis desa akan dilakukan untuk meningkatkan kesiapan usaha mikro menjadi formal.	Penurunan proporsi pekerja informal di Kalimantan Tengah akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memperluas basis pajak daerah, dan memperkuat stabilitas ekonomi keluarga.
13	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	- Keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan vokasi inklusif bagi penyandang disabilitas menghambat kesiapan memasuki pasar kerja formal. - Infrastruktur publik dan tempat kerja yang belum sepenuhnya aksesibel membatasi partisipasi penyandang disabilitas dalam sektor formal. - Stigma sosial dan rendahnya kesadaran dunia usaha terhadap inklusi disabilitas mempersempit peluang kerja yang setara. - Keterbatasan data ketenagakerjaan disabilitas berbasis wilayah menghambat perencanaan intervensi yang tepat sasaran. - Minimnya insentif bagi perusahaan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas membatasi implementasi kebijakan afirmatif.	Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal di Kalimantan Tengah tahun 2024 tercatat sebesar 13,16%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 8,21%, dengan selisih 4,95 poin persentase, yang menunjukkan bahwa tingkat inklusi kerja formal bagi penyandang disabilitas di provinsi ini relatif lebih progresif dibanding capaian nasional, meskipun secara absolut proporsinya masih tergolong rendah dan memerlukan penguatan kualitas pekerjaan, aksesibilitas, serta keberlanjutan perlindungan kerja.	- Penguatan pelatihan vokasi inklusif dan sertifikasi kompetensi bagi penyandang disabilitas akan diprioritaskan dalam kerangka Betang Makmur dan Betang Cerdas. - Peningkatan aksesibilitas infrastruktur publik dan tempat kerja akan diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan fisik RPJMD. - Pemberian insentif dan fasilitasi kepada perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas akan didorong melalui regulasi daerah. - Integrasi data disabilitas dalam sistem ketenagakerjaan berbasis digital akan diperkuat untuk mendukung perencanaan intervensi. - Penguatan kampanye inklusi kerja berbasis nilai Huma Betang akan dilakukan untuk mengurangi stigma dan meningkatkan kesadaran dunia usaha.	Peningkatan partisipasi penyandang disabilitas di sektor formal sehingga memperkuat prinsip keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan, dan memperkokoh transformasi wilayah inklusif menuju Kalteng Tangguh 2045.

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
14	Gini Ratio	- Ketimpangan struktur ekonomi antara wilayah berbasis perkebunan/pertambangan dan wilayah dengan diversifikasi ekonomi rendah menyebabkan distribusi pendapatan tidak merata antar kabupaten/kota. - Konsentrasi investasi dan aktivitas ekonomi pada klaster tertentu memperlebar jarak kesejahteraan antara pusat pertumbuhan dan wilayah hinterland. - Keterbatasan akses UMKM terhadap pembiayaan formal dan teknologi produksi menahan peningkatan pendapatan kelompok usaha kecil. - Ketimpangan kepemilikan lahan dan aset produktif mempersempit peluang mobilitas ekonomi vertikal bagi rumah tangga berpendapatan rendah. - Infrastruktur pasar dan rantai distribusi yang belum merata menyebabkan margin keuntungan lebih besar terkonsentrasi pada pelaku usaha skala besar. - Perbedaan kualitas pendidikan dan kompetensi tenaga kerja antarwilayah memperlebar kesenjangan upah. - Akses layanan keuangan dan literasi keuangan yang belum merata meningkatkan ketergantungan pada pembiayaan informal berbiaya tinggi. - Transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan industri hilir lokal membatasi pemerataan nilai tambah ekonomi.	Rasio Gini Kalimantan Tengah tahun 2024 tercatat sebesar 0,30, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 0,38, dengan selisih 0,08 poin, yang menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di provinsi ini relatif lebih baik dibanding nasional, namun tetap memerlukan penguatan pemerataan pembangunan antarwilayah dan sektor ekonomi agar distribusi manfaat pertumbuhan tidak terkonsentrasi pada klaster tertentu saja.	- Pengembangan hilirisasi komoditas unggulan dalam kerangka Betang Makmur akan dipercepat untuk meningkatkan distribusi nilai tambah di tingkat lokal. - Penguatan akses pembiayaan UMKM melalui koperasi dan lembaga keuangan daerah akan diperluas untuk mendorong pemerataan kesempatan usaha. - Pengembangan klaster ekonomi berbasis kewilayahan RPJMD akan diarahkan untuk mengurangi konsentrasi pertumbuhan pada satu pusat kota. - Peningkatan sertifikasi kompetensi dan pelatihan kerja akan dilakukan untuk mempersempit kesenjangan upah antarwilayah. - Penguatan literasi dan inklusi keuangan berbasis desa akan didorong untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. - Percepatan pembangunan infrastruktur pasar dan rantai distribusi akan mendukung peningkatan margin usaha masyarakat kecil. - Integrasi program KHBS akan memastikan kelompok rentan memperoleh akses peluang ekonomi secara berkelanjutan. - Monitoring ketimpangan berbasis data wilayah akan diperkuat untuk menjaga konvergensi distribusi pendapatan secara terukur.	Penurunan ketimpangan yang dapat memperkuat stabilitas sosial, meningkatkan kohesi masyarakat Huma Betang, dan mempercepat transformasi ekonomi berkeadilan wilayah.

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
15	PDRB Perkapita	- Struktur ekonomi Kalimantan Tengah yang masih didominasi sektor primer berbasis sumber daya alam menyebabkan nilai tambah ekonomi belum sepenuhnya terdistribusi secara luas kepada masyarakat. - Ketergantungan pada komoditas perkebunan dan pertambangan membuat PDRB per kapita sensitif terhadap fluktuasi harga global dan volatilitas pasar internasional. - Hilirisasi industri lokal yang belum optimal membatasi penciptaan nilai tambah di dalam wilayah sehingga sebagian besar keuntungan ekonomi tidak sepenuhnya dinikmati masyarakat lokal. - Ketimpangan pembangunan infrastruktur antarwilayah menyebabkan aktivitas ekonomi produktif terkonsentrasi pada klaster tertentu dan memperlemah konvergensi pertumbuhan daerah. - Kualitas SDM dan tingkat sertifikasi kompetensi tenaga kerja yang masih terbatas menghambat transformasi menuju sektor ekonomi bernilai tambah tinggi dan berbasis teknologi.	PDRB per kapita Kalimantan Tengah tahun 2024 tercatat sebesar Rp79,3 juta, sedikit lebih tinggi dibandingkan PDB per kapita nasional sebesar Rp78,6 juta, dengan selisih sekitar Rp0,7 juta, yang menunjukkan bahwa secara agregat kapasitas ekonomi provinsi relatif berada di atas rata-rata nasional, namun keunggulan tersebut masih perlu diikuti dengan penguatan pemerataan antarwilayah dan transformasi struktur ekonomi agar pertumbuhan tidak hanya tinggi secara nominal tetapi juga inklusif dan berkelanjutan.	- Percepatan hilirisasi komoditas unggulan daerah seperti kelapa sawit, hasil hutan, dan mineral akan diprioritaskan dalam kerangka Betang Makmur untuk meningkatkan nilai tambah lokal. - Pengembangan kawasan industri dan klaster ekonomi berbasis kewilayahan RPJMD akan diperluas guna mendorong diversifikasi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja formal. - Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi dan sertifikasi kompetensi akan diperkuat dalam kerangka Betang Cerdas untuk mendukung transformasi ekonomi bernilai tambah tinggi. - Percepatan pembangunan infrastruktur jalan, energi, dan konektivitas digital dalam kerangka Betang Maju akan diarahkan untuk menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing wilayah. - Penguatan ekonomi hijau dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan akan diintegrasikan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi selaras dengan prinsip pembangunan inklusif dan berkeadilan wilayah menuju Kalteng Tangguh 2045.	Peningkatan PDRB per kapita yang disertai pemerataan distribusi pendapatan dan penguatan nilai tambah lokal akan memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga, serta mempercepat transformasi wilayah Kalimantan Tengah

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
16	Tingkat Pengangguran Terbuka	- Ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja daerah membatasi daya serap tenaga kerja produktif. - Ketergantungan ekonomi pada sektor primer dengan nilai tambah rendah membatasi penciptaan lapangan kerja formal berkualitas. - Rendahnya proporsi tenaga kerja bersertifikat kompetensi mengurangi daya saing dalam menghadapi transformasi ekonomi digital dan hijau. - Disparitas pembangunan antarwilayah menyebabkan peluang kerja terkonsentrasi pada klaster tertentu. - Perubahan struktur ekonomi akibat transformasi teknologi menuntut adaptasi cepat yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh sistem pelatihan daerah.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Tengah tahun 2024 tercatat sebesar 4,01%, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 4,91%, dengan selisih 0,90 poin persentase, yang menunjukkan bahwa secara kuantitatif pasar kerja provinsi relatif lebih mampu menyerap angkatan kerja dibanding rata-rata nasional, namun tetap memerlukan penguatan kualitas pekerjaan, peningkatan produktivitas, dan perluasan sektor formal.	- Penguatan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri dalam kerangka Betang Makmur akan diprioritaskan pada sektor unggulan seperti agroindustri dan energi terbarukan. - Pengembangan kawasan ekonomi berbasis klaster pembangunan RPJMD akan diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja formal di luar pusat kota. - Integrasi sertifikasi kompetensi dan program magang dengan dunia usaha akan diperluas untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja muda. - Dukungan kewirausahaan berbasis UMKM akan diperkuat untuk mendorong penciptaan lapangan kerja mandiri. - Sinkronisasi data ketenagakerjaan lintas perangkat daerah akan memastikan intervensi pengurangan pengangguran berbasis kebutuhan riil wilayah.	Penurunan TPT yang disertai peningkatan kualitas pekerjaan akan memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga, dan mendukung agenda Betang Makmur yang inklusif.

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
17	Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi / Proxy : Persentase peningkatan pajak daerah hasil ekstensifikasi	- Basis pajak daerah yang belum sepenuhnya terpetakan secara akurat terutama pada sektor kendaraan bermotor, alat berat, dan objek pajak baru membatasi optimalisasi penerimaan dari ekstensifikasi. - Ketimpangan literasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak antarwilayah menyebabkan potensi pajak belum tergali secara maksimal terutama di daerah penyangga perkebunan dan pertambangan. - Infrastruktur digital dan integrasi data perpajakan lintas perangkat daerah yang belum sepenuhnya optimal memperlambat proses pendataan dan penagihan objek pajak baru. - Mobilitas usaha dan kendaraan antar kabupaten yang tinggi tanpa pembaruan data berkala menimbulkan kebocoran potensi pajak daerah. - Transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkembang cepat belum sepenuhnya diikuti dengan penyesuaian basis pajak dan sistem pengawasan yang adaptif.	Rata-rata pertumbuhan pajak daerah Kalimantan Tengah tahun 2020 - 2024 sebesar 18,65%, dimana secara umum mengalami rasio pajak daerah pada 2022 - 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlunya upaya ekstra oleh pemerintah daerah dalam menggenjot pendapatan yang berasal dari pajak, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi.	- Digitalisasi dan integrasi data objek pajak berbasis sistem informasi terpadu akan diperkuat untuk mempercepat identifikasi dan validasi wajib pajak baru dalam kerangka modernisasi tata kelola fiskal daerah. - Optimalisasi pendataan kendaraan bermotor dan objek pajak potensial pada sektor perkebunan dan pertambangan akan dilakukan melalui sinergi lintas perangkat daerah dan kerja sama kabupaten/kota. - Penguatan literasi dan edukasi perpajakan berbasis komunitas serta pendekatan jemput bola akan diperluas untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak baru. - Peningkatan pengawasan dan pemanfaatan teknologi berbasis data analytics akan dilakukan untuk meminimalkan kebocoran potensi pajak. - Pengenaan pajak alat berat dan pajak mineral bukan logam / batuan mulai 2026	Peningkatan pajak daerah hasil ekstensifikasi yang akan memperkuat kapasitas fiskal provinsi, memperluas ruang pembiayaan pembangunan infrastruktur dan layanan sosial.
SASARAN 3 : PEMBANGUNAN KELUARGA					

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
18	Indeks Pembangunan Keluarga (i-bangga)	- Ketimpangan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ketahanan ekonomi keluarga antarwilayah menyebabkan capaian pembangunan keluarga belum sepenuhnya merata terutama pada daerah pedalaman dan berbasis sungai. - Tingginya proporsi pekerja informal dan fluktuasi pendapatan berbasis komoditas primer mempengaruhi stabilitas ekonomi keluarga dan ketahanan fungsi keluarga dalam jangka panjang. - Literasi pengasuhan, kesehatan reproduksi, dan perencanaan keluarga yang belum merata membatasi optimalisasi fungsi pembinaan karakter dan perlindungan anak dalam keluarga. - Keterbatasan akses air minum layak, sanitasi, dan perumahan berkualitas pada sebagian keluarga rentan meningkatkan risiko gangguan kesehatan dan menurunkan kualitas hidup keluarga. - Mobilitas tenaga kerja berbasis perkebunan dan pertambangan mempengaruhi kontinuitas pengasuhan serta kohesi keluarga, terutama pada keluarga muda dan keluarga dengan remaja.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kalimantan Tengah tahun 2024 tercatat sebesar 62,7, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 61,4, dengan selisih 1,3 poin, yang menunjukkan bahwa secara agregat kualitas ketahanan dan kesejahteraan keluarga di provinsi ini relatif lebih baik dibanding nasional, namun tetap memerlukan penguatan aspek kemandirian ekonomi, kualitas pengasuhan, dan pemerataan capaian antarwilayah agar keunggulan tersebut berkelanjutan dan selaras dengan transformasi SDM unggul berbasis nilai Huma Betang.	- Penguatan program pembinaan keluarga berbasis komunitas dalam semangat Huma Betang akan diperluas untuk meningkatkan fungsi keagamaan, sosial, dan perlindungan dalam keluarga melalui pendekatan Betang Harmoni. - Integrasi intervensi kesehatan keluarga dan pencegahan stunting dalam kerangka Betang Sehat akan difokuskan pada keluarga berisiko rendah daya tahan kesehatan. - Penguatan literasi pengasuhan remaja dan pendidikan keluarga dalam kerangka Betang Cerdas akan dilakukan melalui sekolah, posyandu, dan Rumah Data Kependudukan. - Pemberdayaan ekonomi keluarga melalui penguatan UMKM dan akses pembiayaan mikro akan diprioritaskan dalam kerangka Betang Makmur untuk meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga. - Integrasi dukungan sosial melalui KHBS akan memastikan keluarga rentan memperoleh akses layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial secara tepat sasaran.	Peningkatan iBangga yang akan memperkuat ketahanan keluarga sebagai episentrum pembangunan kependudukan, meningkatkan kualitas generasi muda, dan mendukung transformasi wilayah inklusif serta berkeadilan menuju Kalteng Tangguh 2045.

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
19	Indeks Perlindungan Anak	- Disparitas akses layanan perlindungan anak antarwilayah menyebabkan respons terhadap kasus kekerasan dan eksploitasi anak belum merata. - Keterbatasan fasilitas layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak di wilayah pedalaman memperlambat penanganan kasus. - Faktor kemiskinan dan kerentanan sosial meningkatkan risiko pekerja anak dan perkawinan usia anak. - Literasi pengasuhan positif dan perlindungan anak di tingkat keluarga masih belum optimal pada sebagian komunitas. - Akses pendidikan dan layanan psikososial yang belum merata memperbesar risiko anak putus sekolah akibat kekerasan atau tekanan ekonomi. - Infrastruktur digital yang belum sepenuhnya aman meningkatkan paparan anak terhadap risiko kekerasan daring. - Keterbatasan data terintegrasi antar perangkat daerah menghambat sistem deteksi dini dan pencegahan. - Mobilitas tenaga kerja berbasis perkebunan dan pertambangan dapat berdampak pada lemahnya pengawasan terhadap kesejahteraan anak.	Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kalimantan Tengah tahun 2023 tercatat sebesar 60,37, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 63,83, dengan selisih 3,46 poin, yang menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak di provinsi ini masih memerlukan penguatan terutama pada aspek pencegahan kekerasan, akses layanan perlindungan terpadu, serta pemerataan kapasitas perlindungan antarwilayah agar sejalan dengan prinsip pembangunan inklusif berbasis nilai Huma Betang.	- Penguatan layanan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak akan diperluas hingga menjangkau klaster wilayah terpencil dalam kerangka Betang Harmoni. - Integrasi sistem pelaporan kasus berbasis digital akan dikembangkan untuk mempercepat respons dan koordinasi lintas sektor. - Program pengasuhan positif berbasis komunitas Huma Betang akan diperluas untuk memperkuat ketahanan keluarga. - Afirmasi pencegahan perkawinan usia anak akan diintegrasikan dengan program pendidikan dalam kerangka Betang Cerdas. - Penguatan literasi digital aman bagi anak akan didorong melalui kolaborasi sekolah dan orang tua. - Integrasi KHBS akan memastikan anak dari keluarga rentan memperoleh perlindungan sosial dan akses pendidikan. - Penguatan koordinasi desa ramah anak akan dilakukan melalui pendekatan berbasis data kewilayahan. - Monitoring dan evaluasi IPA berbasis kabupaten/kota akan diperkuat untuk menjaga konvergensi capaian provins- .	Peningkatan IPA Kalimantan Tengah sehingga memperkuat kualitas generasi muda, meningkatkan keberlanjutan pendidikan, dan mempercepat pembentukan SDM unggul menuju 2045.

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
20	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	- Disparitas pembangunan perumahan antarwilayah menyebabkan proporsi rumah tidak layak huni masih terkonsentrasi pada keluarga berpendapatan rendah di wilayah pedalaman dan pinggiran perkotaan. - Keterbatasan akses pembiayaan perumahan bagi keluarga berpenghasilan rendah menghambat kemampuan mereka memperoleh hunian yang memenuhi standar kesehatan dan keselamatan. - Pertumbuhan permukiman di sekitar pusat ekonomi dan kawasan perkebunan tidak selalu diikuti dengan perencanaan tata ruang dan infrastruktur dasar yang memadai. - Kualitas bahan bangunan dan konstruksi pada sebagian hunian masyarakat rentan meningkatkan risiko kesehatan dan kerentanan terhadap bencana. - Dampak perubahan iklim seperti banjir dan kebakaran hutan meningkatkan kerentanan hunian masyarakat berbasis lahan dan memperbesar risiko kerusakan tempat tinggal.	Proporsi rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Kalimantan Tengah tahun 2024 tercatat sebesar 59,92%, lebih rendah dibandingkan cakupan nasional sebesar 65,25%, dengan selisih 5,33 poin persentase, yang menunjukkan bahwa kualitas dan keterjangkauan hunian di provinsi ini masih menghadapi tantangan struktural terutama pada wilayah pedalaman dan keluarga berpenghasilan rendah, sehingga memerlukan percepatan intervensi berbasis kewilayahan dan integrasi pembangunan perumahan dengan infrastruktur dasar serta perlindungan sosial.	- Percepatan rehabilitasi rumah tidak layak huni akan diprioritaskan dalam kerangka Betang Harmoni untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal keluarga rentan. - Integrasi pembiayaan perumahan bersubsidi dan dukungan kredit mikro akan diperluas untuk meningkatkan keterjangkauan hunian bagi keluarga berpenghasilan rendah. - Sinkronisasi pembangunan perumahan dengan tata ruang dan infrastruktur dasar akan diperkuat dalam kerangka Betang Maju. - Penguatan standar konstruksi ramah lingkungan dan adaptif terhadap risiko bencana akan diintegrasikan untuk mendukung pembangunan hunian berkelanjutan. - Integrasi data perumahan dengan KHBS akan memastikan intervensi hunian tepat sasaran dan terhubung dengan program kesejahteraan keluarga.	Peningkatan akses hunian layak di Kalimantan Tengah guna memperkuat kesehatan keluarga, meningkatkan produktivitas ekonomi rumah tangga, dan mendukung pembangunan wilayah yang inklusif dan berkelanjutan.

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
21	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman(%)	- Ketimpangan pembangunan sanitasi antarwilayah menyebabkan sebagian rumah tangga di daerah pedalaman belum memiliki akses sanitasi aman sesuai standar kesehatan. - Keterbatasan jaringan pengelolaan air limbah domestik meningkatkan risiko pencemaran lingkungan dan penyakit berbasis air. - Kondisi geografis berbasis sungai dan rawa di Kalimantan Tengah mempengaruhi pola pembuangan limbah rumah tangga yang belum sepenuhnya memenuhi standar sanitasi aman. - Rendahnya literasi perilaku hidup bersih dan sehat pada sebagian masyarakat memperbesar risiko sanitasi tidak layak meskipun infrastruktur tersedia. - Pertumbuhan permukiman tanpa dukungan sistem drainase dan pengelolaan limbah terencana meningkatkan tekanan terhadap kualitas lingkungan permukiman.	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kalimantan Tengah tahun 2024 tercatat sebesar 11,07%, sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 10,25%, dengan selisih 0,82 poin persentase, yang menunjukkan bahwa meskipun capaian provinsi relatif berada di atas nasional, tingkat akses sanitasi aman secara absolut masih sangat rendah dan mengindikasikan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur sanitasi terstandar serta integrasi dengan agenda kesehatan lingkungan dan penurunan stunting berbasis kewilayahan	- Percepatan pembangunan sarana sanitasi aman berbasis desa akan diprioritaskan dalam kerangka Betang Maju untuk meningkatkan cakupan layanan dasar. - Pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik skala kawasan akan diperluas untuk mengurangi pencemaran lingkungan. - Edukasi perilaku hidup bersih dan sehat akan diperkuat melalui pendekatan komunitas Huma Betang dan kader desa. - Integrasi pembangunan sanitasi dengan program penurunan stunting dan kesehatan ibu-anak akan diperkuat dalam kerangka Betang Sehat. - Pemanfaatan data Rumah Data Kependudukan dan KHBS akan memastikan intervensi sanitasi tepat sasaran pada keluarga rentan.	Peningkatan akses sanitasi aman di Kalimantan Tengah sehingga menurunkan risiko penyakit berbasis lingkungan, mendukung penurunan stunting, dan memperkuat kualitas hidup keluarga sebagai fondasi SDM unggul Kalimantan Tengah.

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
22	Indeks Lansia Berdaya	- Peningkatan proporsi penduduk usia lanjut tanpa diimbangi sistem dukungan sosial yang memadai meningkatkan risiko ketergantungan ekonomi dan kesehatan. - Keterbatasan akses layanan kesehatan geriatri di wilayah pedalaman memperbesar risiko penyakit kronis tidak tertangani. - Infrastruktur publik yang belum sepenuhnya ramah lansia membatasi partisipasi sosial dan mobilitas kelompok usia lanjut. - Minimnya skema pemberdayaan ekonomi lansia produktif menghambat kontribusi sosial-ekonomi mereka. - Ketergantungan pada keluarga tanpa dukungan sistem perlindungan sosial yang kuat meningkatkan beban rumah tangga. - Akses jaminan sosial dan layanan administrasi bagi lansia belum sepenuhnya merata antarwilayah. - Rendahnya literasi kesehatan lansia dan keluarga memperbesar risiko penurunan kualitas hidup. - Urbanisasi dan migrasi tenaga kerja muda dapat mengurangi dukungan keluarga terhadap lansia di desa.	ndeks Lansia Berdaya Kalimantan Tengah tahun 2024 tercatat sebesar 59,33, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 58,00, dengan selisih 1,33 poin, yang menunjukkan bahwa secara agregat tingkat kemandirian sosial dan ekonomi lansia di provinsi ini relatif lebih baik dibanding nasional, namun tetap memerlukan penguatan layanan kesehatan geriatri, perlindungan sosial adaptif, serta pemberdayaan lansia produktif agar peningkatan tersebut berkelanjutan dan merata antarwilayah.	- Penguatan layanan kesehatan lansia dalam kerangka Betang Sehat akan diprioritaskan melalui pengembangan layanan geriatri dan skrining rutin. - Pengembangan ruang publik dan fasilitas umum ramah lansia akan dipercepat untuk meningkatkan mobilitas dan partisipasi sosial. - Pemberdayaan lansia produktif melalui pelatihan usaha mikro akan diintegrasikan dalam program Betang Makmur. - Integrasi lansia dalam skema perlindungan sosial KHBS akan memastikan jaminan akses kesehatan dan bantuan sosial tepat sasaran. - Penguatan posyandu lansia dan kader kesehatan desa akan diperluas untuk deteksi dini penyakit kronis. - Digitalisasi layanan administrasi kependudukan akan memudahkan lansia dalam mengakses hak-haknya. - Edukasi keluarga tentang perawatan lansia berbasis nilai Huma Betang akan diperkuat. - Monitoring indeks lansia berdaya berbasis wilayah akan dilakukan untuk menjaga konvergensi pembangunan ramah lansia.	- Peningkatan indeks lansia berdaya Kalimantan Tengah - Menguatnya kohesi sosial, meningkatnya kualitas hidup usia lanjut, dan terjaganya keseimbangan struktur demografi provinsi.

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
23	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	- Perubahan sosial dan digitalisasi meningkatkan tantangan pengawasan dan pengasuhan remaja di tingkat keluarga. - Keterbatasan literasi pengasuhan remaja berbasis kesehatan reproduksi dan kesehatan mental meningkatkan risiko perilaku berisiko. - Ketimpangan akses layanan konseling dan psikososial di wilayah terpencil memperbesar kerentanan remaja. - Beban ekonomi keluarga rentan mempengaruhi kualitas interaksi dan pengawasan orang tua terhadap remaja. - Mobilitas tenaga kerja orang tua mengurangi waktu pengasuhan langsung terhadap anak remaja. - Akses internet tanpa literasi digital memadai meningkatkan risiko paparan konten negatif. - Disparitas pendidikan orang tua mempengaruhi pola komunikasi dan pengambilan keputusan dalam keluarga. - Fragmentasi program lintas sektor membuat intervensi penguatan pengasuhan belum sepenuhnya terintegrasi.	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja Kalimantan Tengah tahun 2024 tercatat sebesar 84,76, sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 84,60, dengan selisih 0,16 poin, yang menunjukkan bahwa secara agregat kualitas pengasuhan remaja di provinsi ini relatif sejalan bahkan sedikit lebih baik dibanding nasional, namun selisih yang sangat tipis tersebut mengindikasikan perlunya penguatan berkelanjutan pada aspek komunikasi orang tua–remaja, literasi digital keluarga, serta ketahanan ekonomi rumah tangga agar capaian tetap stabil dan merata antarwilayah.	- Penguatan program pembinaan keluarga berbasis komunitas dalam semangat Huma Betang akan diperluas untuk meningkatkan kualitas pengasuhan remaja. - Integrasi edukasi kesehatan reproduksi dan kesehatan mental remaja dalam kerangka Betang Cerdas dan Betang Sehat akan diperkuat. - Pengembangan layanan konseling remaja di puskesmas dan sekolah akan diprioritaskan pada wilayah dengan indeks rendah. - Dukungan ekonomi keluarga melalui program Betang Makmur dan KHBS akan membantu menjaga stabilitas pengasuhan. - Peningkatan literasi digital keluarga akan dilakukan untuk memperkuat pengawasan penggunaan internet remaja. - Penguatan koordinasi lintas sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak akan dilakukan berbasis data kewilayahan. - Monitoring indeks pengasuhan berbasis kabupaten/kota akan diperkuat untuk menjaga konvergensi capaian provinsi. - Afirmasi peran ayah dan ibu dalam pengasuhan akan diperluas melalui kampanye keluarga harmonis berbasis desa melalui intensifikasi program GATI (Gerakan Ayah Teladan Indonesia).	Peningkatan indeks pengasuhan remaja Kalimantan tengah yang dapat menurunkan risiko perilaku berisiko, meningkatkan kualitas generasi muda, dan memperkuat fondasi SDM unggul Kalimantan Tengah.

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
24	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	- Disparitas akses fasilitas kesehatan dan kepesertaan JKN antarwilayah menyebabkan perlindungan kesehatan belum merata. - Mobilitas tenaga kerja sektor informal dan pekerja musiman menyulitkan kontinuitas kepesertaan JKN. - Literasi administrasi dan kependudukan yang belum optimal menghambat aktivasi dan pemanfaatan layanan kesehatan. - Keterbatasan konektivitas digital pada wilayah terpencil memperlambat proses pendaftaran dan validasi kepesertaan. - Ketergantungan keluarga miskin pada bantuan pemerintah meningkatkan kerentanan jika tidak terintegrasi dengan sistem data terpadu. - Jarak tempuh menuju fasilitas kesehatan rujukan meningkatkan biaya tidak langsung bagi peserta JKN. - Ketimpangan kualitas layanan kesehatan antarwilayah mempengaruhi efektivitas perlindungan kesehatan. - Pertumbuhan penduduk usia produktif tanpa perluasan cakupan kerja formal memperlambat peningkatan kepesertaan mandiri.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 telah mencapai 99,02%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 98,45%, yang menunjukkan bahwa secara agregat provinsi telah melampaui ambang universal health coverage, namun tetap memerlukan penguatan pada aspek keaktifan kepesertaan, kualitas layanan, serta pemerataan akses fasilitas kesehatan rujukan agar cakupan tinggi tersebut benar-benar efektif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.	- Perluasan integrasi data kependudukan dan kepesertaan JKN akan diperkuat melalui sinergi lintas perangkat daerah. - Optimalisasi KHBS akan memastikan keluarga rentan tetap terdaftar aktif sebagai peserta JKN. - Penguatan layanan pendaftaran digital dan jemput bola di wilayah terpencil akan mempercepat peningkatan cakupan. - Integrasi program ketenagakerjaan dan pelaku UMKM akan mendorong kepesertaan mandiri pekerja informal. - Pengembangan fasilitas kesehatan rujukan di klaster pembangunan akan meningkatkan akses dan kualitas layanan. - Edukasi literasi administrasi kesehatan berbasis komunitas Huma Betang akan diperluas untuk meningkatkan pemanfaatan layanan. - Monitoring wilayah dengan cakupan rendah akan dilakukan secara berkala berbasis data desa. - Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan akan diintegrasikan dalam kerangka Betang Sehat untuk memastikan manfaat kepesertaan optimal.	Peningkatan cakupan JKN yang akan memperkuat perlindungan sosial, menurunkan beban biaya kesehatan rumah tangga, dan mendukung peningkatan IPM secara berkelanjutan.

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
SASARAN 4 : PENATAAN PERSEBARAN DAN MOBILITAS PENDUDUK					
25	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	- Disparitas kapasitas kelembagaan dan pendampingan di tingkat desa menyebabkan tidak semua Kampung KB mampu berkembang menuju kategori mandiri secara berkelanjutan. - Keterbatasan integrasi program lintas sektor di tingkat desa membuat intervensi keluarga berkualitas belum sepenuhnya konvergen dan terukur dampaknya. - Infrastruktur digital dan sistem data desa yang belum merata membatasi pemanfaatan Rumah Data Kependudukan untuk perencanaan berbasis bukti. - Ketahanan ekonomi keluarga yang belum stabil pada sebagian wilayah memperlambat transformasi Kampung KB menuju kemandirian ekonomi dan sosial. - Variasi dukungan anggaran dan komitmen pemerintah kabupaten/kota mempengaruhi keberlanjutan pembinaan Kampung KB.	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri di Kalimantan Tengah tahun 2024 tercatat sebesar 18,78%, lebih rendah dibandingkan cakupan nasional sebesar 32,26%, dengan selisih 13,48 poin persentase, yang menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Kampung KB di provinsi ini masih menghadapi tantangan dalam aspek kelembagaan, integrasi program lintas sektor, serta keberlanjutan pemberdayaan ekonomi keluarga, sehingga memerlukan percepatan penguatan berbasis desa .	- Penguatan Implementasi Instruksi Gubernur nomor 400.13.26.2/151/DP3APPKB tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas oleh komponen lintas sektor Perangkat Daerah. - Penguatan integrasi program keluarga, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi desa akan diprioritaskan dalam kerangka Betang Harmoni untuk mempercepat kemandirian Kampung KB. - Peningkatan kapasitas pengelola Kampung KB dan Rumah Data Kependudukan akan diperluas melalui pelatihan berbasis Betang Cerdas. - Integrasi Kampung KB dengan pemberdayaan ekonomi desa dalam kerangka Betang Makmur akan diarahkan untuk memperkuat kemandirian keluarga. - Digitalisasi pemantauan dan evaluasi Kampung KB akan diperkuat untuk menjaga konsistensi capaian berbasis data. - Sinergi dengan KHBS akan memastikan keluarga rentan dalam Kampung KB memperoleh akses intervensi prioritas secara tepat sasaran.	Meningkatnya persentase Kampung KB Mandiri di Kalimantan Tengah yang dapat memperkuat ketahanan keluarga sebagai episentrum pembangunan kependudukan serta mendukung transformasi sosial-ekonomi berbasis komunitas Huma Betang.

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
26	Rate *Nett Recent Migration*/Poxy : Kepadatan Kependudukan	- Distribusi penduduk yang tidak merata antar kabupaten menyebabkan konsentrasi aktivitas ekonomi dan layanan publik pada klaster tertentu sementara wilayah luas lainnya relatif jarang penduduk. - Urbanisasi menuju pusat pertumbuhan dan kawasan industri meningkatkan tekanan terhadap infrastruktur perumahan, sanitasi, dan layanan dasar pada wilayah tersebut. - Karakter geografis Kalimantan Tengah yang luas dengan permukiman tersebar memperbesar biaya penyediaan layanan publik pada wilayah berkepadatan rendah. - Mobilitas tenaga kerja berbasis sektor perkebunan dan pertambangan mempengaruhi dinamika kepadatan secara temporer di wilayah tertentu. - Perencanaan tata ruang dan pengembangan pusat pertumbuhan yang belum sepenuhnya sinkron dapat memperlebar kesenjangan kepadatan dan akses layanan antar klaster wilayah.	Kepadatan penduduk Kalimantan Tengah tahun 2024 berada pada kisaran 25 - 26 jiwa per km², jauh lebih rendah dibanding rata-rata nasional yang melebihi 140 jiwa per km², menunjukkan karakter provinsi dengan wilayah sangat luas dan distribusi penduduk jarang, namun dengan variasi kepadatan antar kabupaten yang cukup signifikan terutama pada klaster perkotaan dan pusat ekonomi.	- Pada klaster perkotaan dan pusat pertumbuhan, penguatan perencanaan tata ruang dan pengembangan hunian vertikal akan diprioritaskan untuk mengelola tekanan kepadatan secara terkontrol. - Pada klaster wilayah pedalaman dan hinterland, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas akan diarahkan untuk mendorong pemerataan distribusi penduduk dan aktivitas ekonomi. - Pada klaster kawasan industri dan perkebunan, pengembangan permukiman terencana dan layanan dasar akan diintegrasikan untuk mengantisipasi lonjakan kepadatan temporer tenaga kerja. - Pada klaster rawan bencana dan degradasi lingkungan, pengendalian pemanfaatan ruang dan relokasi berbasis mitigasi risiko akan diperkuat untuk menjaga keseimbangan demografi dan ekologi. - Penguatan sistem informasi kependudukan berbasis digital akan dilakukan untuk memantau dinamika kepadatan dan migrasi internal secara real time dalam kerangka transformasi wilayah inklusif.	Pengelolaan kepadatan penduduk yang adaptif dan berbasis klaster pembangunan akan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, daya dukung lingkungan, dan pemerataan layanan publik menuju Kalteng Tangguh 2045.

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
SASARAN 5 : PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
27	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Balita	- Disparitas akses layanan Dukcapil antarwilayah terutama pada daerah pedalaman dan berbasis sungai menyebabkan keterlambatan pencatatan kelahiran balita. - Integrasi data antara fasilitas kesehatan dan sistem administrasi kependudukan yang belum sepenuhnya real time memperlambat penerbitan akta kelahiran. - Literasi administrasi kependudukan keluarga muda yang belum merata meningkatkan risiko anak tidak tercatat tepat waktu. - Mobilitas penduduk berbasis pekerjaan musiman menyulitkan pelacakan dan validasi data kelahiran balita. - Keterbatasan konektivitas digital pada desa tertentu menghambat pelayanan adminduk daring dan percepatan cakupan.	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran di Provinsi Kalimantan Tengah saat ini mencapai 97,81 %. Masih ditemukan masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yaitu yang berada di desa-desa terpencil.	Melakukan layanan "Jemput Bola" Inovasi seperti pendaftaran kolektif atau layanan langsung ke masyarakat (misalnya di rumah sakit bersalin atau desa terpencil) untuk mempermudah akses dan Melakukan Sosialisasi akan pentingnya kepemilikan Akta Kelahiran. Sosialisai terkait pencatatan sipil, penetapan kebijakan teknis di bidang pencatatan sipil, fasilitasi bidang pencatatan sipil ke kabupaten/kota, dan penataan tata kelola pelaksanaan pencatatan sipil skala provinsi.	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
28	Cakupan Kepemilikan Akta Cerai	- Rendahnya kesadaran pencatatan peristiwa perceraian menyebabkan sebagian pasangan tidak memiliki dokumen resmi yang berdampak pada hak hukum dan perlindungan anak. - Akses layanan pencatatan sipil dan pengadilan agama/sipil yang belum merata antarwilayah memperlambat penerbitan akta cerai. - Literasi hukum keluarga yang terbatas pada sebagian masyarakat memperbesar risiko tidak tercatatnya perceraian secara administratif. - Keterbatasan integrasi data antar lembaga peradilan dan Dukcapil menghambat pembaruan status kependudukan. - Hambatan biaya dan jarak tempuh bagi masyarakat pedalaman memperlambat pengurusan dokumen resmi.	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian di Provinsi Kalimantan Tengah saat ini mencapai 52,05 %. Masih rendahnya kesadaran penduduk pada umumya mereka menganggap prosedur pengurusan dokumen kependudukan : masih panjang (berbelit-belit), kurang transparan. Banyak pasangan yang enggan mengurus akta cerai karena menganggap prosesnya rumit dan memakan waktu.	Membuat layanan terintegrasi di kantor pengadilan atau Mal Pelayanan Publik (MPP). Pemohon cerai dapat langsung mengurus administrasi kependudukan pasca-perceraian (akta cerai, perubahan status KTP, dan KK baru) di satu tempat. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya status hukum yang jelas pasca-perceraian, Memastikan bahwa setiap penerbitan akta cerai diikuti dengan kewajiban pemutakhiran data pada KTP dan KK (perubahan status dari 'kawin' menjadi 'cerai hidup' atau 'cerai mati'). Sosialisai terkait pencatatan sipil, penetapan kebijakan teknis di bidang pencatatan sipil, fasilitasi bidang pencatatan sipil ke kabupaten/kota, dan penataan tata kelola pelaksanaan pencatatan sipil skala provinsi.	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian
29	Cakupan Kepemilikan Akta Nikah	- Sebagian pasangan di wilayah pedalaman belum mencatatkan pernikahan secara resmi karena hambatan akses layanan dan literasi administrasi. - Disparitas layanan pencatatan sipil antarwilayah memperlambat penerbitan dokumen pernikahan. - Praktik pernikahan adat atau keagamaan tanpa pencatatan resmi menyebabkan ketidaksesuaian status administratif. - Mobilitas penduduk antar kabupaten dapat menghambat pembaruan status perkawinan dalam sistem kependudukan. - Keterbatasan integrasi data antar instansi keagamaan dan Dukcapil memperlambat validasi dokumen.	Persentase Kepemilikan Akta Kematian di Provinsi Kalimantan Tengah saat ini mencapai 54,12 %. Anggapan bahwa mengurus pernikahan resmi itu rumit atau butuh banyak syarat, Adanya halangan hukum untuk menikah secara resmi, seperti status perkawinan salah satu pihak yang masih terikat pernikahan sah sebelumnya (poligami tidak resmi) atau usia yang belum mencukupi secara UU Perkawinan, Pasangan di daerah terpencil kesulitan mengakses KUA atau kantor pencatatan sipil terdekat.	Menerapkan sistem di mana pasangan yang menikah di KUA atau Catatan Sipil akan langsung mendapatkan Akta Nikah, Kartu Keluarga (KK) baru dengan status perkawinan yang diperbarui, dan KTP dengan status baru secara bersamaan dalam satu layanan terintegrasi, melakukan sosialisasi masif tentang pentingnya akta nikah untuk perlindungan hukum istri dan status legal anak (termasuk hak waris dan perdata), dan memastikan sosialisasi bahwa menikah di KUA pada jam kerja adalah gratis dan menindak tegas praktik pungutan liar, Sosialisai terkait pencatatan sipil, penetapan kebijakan teknis di bidang pencatatan sipil, fasilitasi bidang pencatatan sipil ke kabupaten/kota, dan penataan tata kelola pelaksanaan pencatatan sipil skala provinsi.	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Akta Nikah

No	Indikator	Pressure	State	Response	Impact
30	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	- Rendahnya kesadaran pelaporan kematian menyebabkan sebagian peristiwa kematian tidak tercatat secara resmi. - Hambatan geografis dan keterbatasan akses layanan Dukcapil di wilayah pedalaman memperlambat penerbitan akta kematian. - Integrasi data antara fasilitas kesehatan dan sistem adminduk belum sepenuhnya otomatis sehingga pembaruan data sering tertunda. - Ketergantungan pada pelaporan manual di desa tanpa dukungan digital memperbesar risiko keterlambatan pencatatan. - Ketidaktercatatan kematian mempengaruhi akurasi data kependudukan dan perencanaan layanan publik.	Persentase Kepemilikan Akta Kematian di Provinsi Kalimantan Tengah saat ini mencapai 99,34 %. Banyak masyarakat, terutama di pedesaan, belum sepenuhnya memahami bahwa akta kematian adalah dokumen penting yang memiliki konsekuensi hukum dan administratif yang luas. Sebagian masyarakat mengurus akta kematian hanya saat benar - benar dibutuhkan, seperti untuk pengurusan warisan atau pembagian harta peninggalan, penutupan rekening bank atau klaim asuransi, dan perubahan data KK dan ahli waris	"Jemput Bola" dan Integrasi Layanan, Mewajibkan Tempat Pemakaman Umum (TPU) atau otoritas desa/kelurahan untuk berkoordinasi langsung dengan Disdukcapil, data kematian langsung dikirim setelah proses pemakaman selesai, Memastikan rumah sakit dan puskesmas secara otomatis menerbitkan surat keterangan kematian yang terstandardisasi dan terhubung langsung dengan sistem Dukcapil, Memastikan penerbitan akta kematian secara otomatis diikuti dengan perubahan status KTP dan KK ahli waris (penghapusan NIK almarhum), Melakukan Sosialisasi akan pentingnya kepemilikan Akta Kematian. Sosialisai terkait pencatatan sipil, penetapan kebijakan teknis di bidang pencatatan sipil, fasilitasi bidang pencatatan sipil ke kabupaten/kota, dan penataan tata kelola pelaksanaan pencatatan sipil skala provinsi.	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Akta Kematian

G. Isu Strategis Pembangunan Kependudukan

Berdasarkan hasil kompilasi analisis *Pressure–State–Response–Impact* pada 5 sasaran dan 30 indikator utama PJPK, dapat diperoleh gambaran besar bahwa pembangunan kependudukan Kalimantan Tengah telah bergerak menuju konsolidasi kualitas SDM, tetapi masih menghadapi isu struktural pada aspek pemerataan wilayah dan penguatan kelembagaan lokal.

Berdasarkan telaah dinamika demografi, capaian indikator pembangunan, serta kebutuhan pelayanan publik, terdapat sejumlah isu strategis kependudukan yang perlu menjadi perhatian utama dalam penyusunan dan implementasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut.

1. *Pengelolaan Kuantitas Penduduk*

   Hasil analisis PSRI menunjukkan bahwa tekanan utama pada pengelolaan kuantitas penduduk di Kalimantan Tengah tidak lagi berada pada fase pertumbuhan penduduk yang tinggi, melainkan pada dinamika fertilitas spesifik usia muda dan pengelolaan struktur umur menuju fase penuaan bertahap. Penurunan Total Fertility Rate hingga 2,26 pada tahun 2024 mencerminkan keberhasilan pengendalian fertilitas secara umum, namun fluktuasi ASFR usia 15–19 menunjukkan bahwa risiko fertilitas remaja masih menjadi tekanan yang signifikan. Kondisi ini menandakan bahwa transisi demografi sedang berlangsung, namun belum sepenuhnya terkonsolidasi secara merata antarwilayah.

   Dari sisi kondisi aktual (state), rasio ketergantungan yang relatif stabil di kisaran 42 menunjukkan bahwa provinsi ini masih berada dalam jendela peluang demografis. Proporsi penduduk usia produktif yang dominan merupakan modal strategis bagi percepatan pembangunan. Namun, tanpa peningkatan kualitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja produktif, bonus demografi berpotensi tidak termanfaatkan secara optimal. Respons kebijakan yang telah dilakukan melalui penguatan pelayanan KB, peningkatan akses MKJP, serta edukasi kesehatan reproduksi menunjukkan arah yang tepat, tetapi perlu diperluas secara lebih intensif pada wilayah dengan risiko fertilitas usia muda yang tinggi.

   Dampak yang diharapkan dari konsolidasi pengelolaan kuantitas penduduk adalah stabilisasi pertumbuhan jangka panjang dan optimalisasi komposisi usia produktif sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Dengan demikian, tantangan strategis pada sasaran ini terletak pada kemampuan menjaga keseimbangan antara

pengendalian fertilitas, penguatan kualitas generasi muda, dan persiapan menghadapi peningkatan proporsi lansia di masa mendatang.

Isu strategis utama:

- Penguatan pengendalian fertilitas remaja untuk menjaga momentum transisi demografi.
- Antisipasi pergeseran struktur umur menuju peningkatan proporsi lansia.
- Optimalisasi jendela bonus demografi melalui peningkatan kualitas tenaga kerja produktif.
- Penguatan layanan KB modern dan MKJP secara merata di wilayah terpencil.
- Integrasi kebijakan kependudukan dalam perencanaan ekonomi jangka menengah.

2. *Peningkatan Kualitas Penduduk*

Pada sasaran ini, tekanan utama bersumber dari ketimpangan kualitas SDM antarwilayah, kemiskinan struktural yang masih bertahan di kisaran lima persen, serta keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan pada wilayah tertentu. Meskipun IPM meningkat menjadi 74,28 pada tahun 2024, dan angka harapan hidup serta rata-rata lama sekolah menunjukkan tren membaik, disparitas antar kabupaten/kota masih menjadi tantangan substantif. Penurunan stunting hingga 22,1 persen menunjukkan kemajuan, tetapi angka tersebut masih mengindikasikan adanya persoalan gizi dan sanitasi yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Kondisi aktual (state) menggambarkan bahwa kualitas penduduk secara agregat mengalami peningkatan, namun belum sepenuhnya merata. Struktur ekonomi berbasis sektor primer membuat sebagian rumah tangga rentan terhadap fluktuasi ekonomi, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga. Respons kebijakan yang difokuskan pada percepatan penurunan stunting, penguatan pendidikan menengah dan vokasi, serta perluasan perlindungan sosial telah memberikan dampak positif, tetapi masih memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor.

Dampak yang mulai terlihat adalah membaiknya indikator pembangunan manusia dan stabilitas sosial yang relatif terjaga. Namun demikian, peningkatan kualitas SDM harus dipandang sebagai proses jangka panjang yang memerlukan konsistensi

intervensi dan pemerataan akses layanan dasar agar transformasi wilayah berlangsung secara inklusif dan berkeadilan.

Isu strategis utama:

- Percepatan penurunan stunting berbasis keluarga dan sanitasi.
- Peningkatan kualitas pendidikan menengah dan vokasi untuk mendukung transformasi ekonomi.
- Pengurangan kemiskinan struktural berbasis peningkatan produktivitas keluarga.
- Penguatan perlindungan sosial adaptif di wilayah rentan.
- Pemerataan kualitas SDM antarwilayah sebagai prasyarat pembangunan inklusif.

3. *Pembangunan Keluarga*

Tekanan pada sasaran pembangunan keluarga terutama bersumber dari perubahan struktur sosial, dinamika ekonomi rumah tangga, serta tantangan pengasuhan pada era modernisasi dan digitalisasi. Meskipun Indeks Pembangunan Keluarga meningkat signifikan hingga 62,7 pada tahun 2024, masih terdapat kerentanan pada dimensi kemandirian ekonomi keluarga dan kapasitas pengasuhan remaja. Di sisi lain, peningkatan proporsi lansia hingga 8,81 persen memperkuat kebutuhan penguatan dukungan keluarga lintas generasi.

Kondisi aktual menunjukkan bahwa kualitas lingkungan keluarga juga mengalami perbaikan, dengan akses rumah layak huni mencapai 59,92 persen dan akses sanitasi layak 78,15 persen pada tahun 2024. Namun, masih terdapat kesenjangan yang menunjukkan bahwa tidak seluruh keluarga menikmati lingkungan hidup yang sehat dan layak. Respons kebijakan melalui penguatan Kampung Keluarga Berkualitas, edukasi pengasuhan, serta perluasan jaminan kesehatan telah memperkuat fondasi ketahanan keluarga, tetapi perlu ditingkatkan kualitas dan pemerataannya.

Dampak yang diharapkan adalah terbentuknya keluarga yang mandiri secara ekonomi, sehat secara fisik dan sosial, serta mampu menjadi pusat pembentukan karakter dan kualitas generasi penerus. Dengan demikian, pembangunan keluarga menjadi fondasi strategis yang menentukan keberlanjutan capaian sasaran kuantitas dan kualitas penduduk.

Isu strategis utama:

- Penguatan kapasitas pengasuhan keluarga dalam menghadapi tantangan sosial remaja.
- Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga berbasis potensi lokal.
- Integrasi layanan lansia dalam sistem dukungan keluarga.
- Percepatan peningkatan kualitas lingkungan hunian keluarga.
- Konsolidasi Kampung Keluarga Berkualitas sebagai simpul ketahanan sosial.

4. *Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk*

Tekanan pada sasaran ini muncul dari karakteristik geografis Kalimantan Tengah yang luas dengan kepadatan penduduk rendah, namun mengalami konsentrasi pertumbuhan di beberapa pusat perkotaan. Kepadatan penduduk yang berada pada kisaran 18 jiwa/km² secara agregat menyembunyikan ketimpangan distribusi ruang. Di sisi lain, persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri yang baru mencapai 18,78 persen—jauh di bawah rata-rata nasional 32,26 persen—menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan berbasis wilayah masih perlu diperkuat.

Kondisi aktual memperlihatkan adanya kecenderungan urbanisasi yang berpotensi meningkatkan tekanan pada infrastruktur perkotaan, sementara wilayah pedalaman masih menghadapi keterbatasan akses layanan. Respons kebijakan yang diarahkan pada penguatan kampung mandiri dan pengembangan pusat pertumbuhan baru menjadi strategi penting untuk mengurangi ketimpangan spasial.

Dampak yang diharapkan adalah terciptanya keseimbangan pembangunan antarwilayah, di mana mobilitas penduduk tidak lagi menciptakan ketimpangan, melainkan menjadi instrumen pemerataan ekonomi dan sosial. Dengan demikian, penataan persebaran penduduk harus terintegrasi dengan kebijakan tata ruang dan pengembangan kawasan strategis daerah.

Isu strategis utama:

- Pengurangan ketimpangan pembangunan antarwilayah melalui penguatan pusat pertumbuhan baru.
- Akselerasi peningkatan Kampung KB Mandiri sebagai instrumen pemerataan layanan.
- Pengelolaan urbanisasi agar tidak menimbulkan tekanan infrastruktur.

- Integrasi kebijakan kependudukan dalam perencanaan tata ruang dan kawasan strategis.
- Penguatan ekonomi wilayah pedalaman untuk menahan arus migrasi keluar.

5. *Penataan Administrasi Kependudukan*

Kondisi aktual penataan administrasi kependudukan di Kalimantan Tengah menunjukkan perbaikan tata kelola berbasis kependudukan, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi dalam seluruh siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Respons kebijakan yang diarahkan pada digitalisasi layanan, interoperabilitas data, serta penguatan perencanaan berbasis data mikro keluarga menjadi langkah strategis yang harus dipercepat.

Dampak jangka panjang yang diharapkan adalah terbangunnya sistem pembangunan daerah yang presisi, adaptif, dan berbasis bukti, di mana setiap kebijakan dirumuskan berdasarkan data kependudukan yang akurat dan mutakhir. Tanpa fondasi administrasi kependudukan yang kuat, keberlanjutan seluruh sasaran pembangunan kependudukan akan sulit dicapai secara optimal.

Isu strategis utama:

- Percepatan universalitas dokumen kependudukan.
- Digitalisasi dan interoperabilitas data lintas perangkat daerah.
- Peningkatan literasi kependudukan masyarakat.
- Penguatan perencanaan berbasis data mikro keluarga.
- Konsolidasi mainstreaming kependudukan dalam seluruh dokumen perencanaan daerah.

BAB II

SASARAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Pembangunan kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029 diarahkan untuk memperkuat kualitas penduduk sebagai modal utama transformasi daerah menuju Kalimantan Tengah Tangguh 2045. Sasaran pembangunan kependudukan disusun sebagai turunan operasional dari lima pilar GDPK Provinsi Kalimantan Tengah dan selaras dengan strategi pembangunan daerah dalam RPJMD 2025–2029, dengan menempatkan manusia dan keluarga sebagai episentrum pembangunan.

Kelima sasaran berikut dirumuskan untuk menjawab isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya, sekaligus memastikan keterpaduan antara pengelolaan kuantitas penduduk, peningkatan kualitas SDM, penguatan keluarga, pemerataan wilayah, serta tata kelola berbasis data yang presisi dan berkeadilan.

A. Sasaran 1 – Pengelolaan Kuantitas Penduduk

Pengelolaan kuantitas penduduk diarahkan pada penguatan konsolidasi transisi demografi secara berkelanjutan, melalui stabilisasi fertilitas, pengendalian kelahiran usia remaja, serta optimalisasi komposisi penduduk usia produktif. Kebijakan ini bertujuan memastikan bahwa dinamika jumlah dan struktur umur penduduk menjadi kekuatan strategis bagi pembangunan ekonomi daerah, bukan menjadi beban sosial di masa depan.

Pendekatan yang ditempuh menekankan keseimbangan antara hak reproduksi, edukasi kesehatan, dan tanggung jawab sosial keluarga, dengan memperhatikan karakteristik geografis Kalimantan Tengah yang luas dan heterogen. Pengelolaan kuantitas penduduk tidak hanya dimaknai sebagai pengendalian angka kelahiran, tetapi sebagai upaya membangun perencanaan keluarga yang sadar, sehat, dan bertanggung jawab.

Tabel 2. Target Sasaran Pengelolaan Kuantitas Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah 2025 - 2029

NO	INDIKATOR	BASELINE (2023-2024)	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Total Fertility Rate (TFR)	2,26	2,24	2,23	2,22	2,21	2,20
2	Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun	38,40	38,07	37,74	37,42	37,12	36,81

NO	INDIKATOR	BASELINE (2023-2024)	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
3	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi	88,72	88,80	88,81	88,82	88,83	88,84

Arah Kebijakan :

1. Mengonsolidasikan transisi demografi melalui stabilisasi fertilitas dan penguatan perencanaan keluarga yang sehat dan bertanggung jawab.
2. Mengendalikan kelahiran usia remaja melalui edukasi kesehatan reproduksi berbasis sekolah, keluarga, dan komunitas.
3. Mengoptimalkan bonus demografi dengan menyiapkan penduduk usia produktif yang kompeten, sehat, dan adaptif terhadap transformasi ekonomi daerah.
4. Mengantisipasi peningkatan proporsi lansia melalui kebijakan kependudukan yang berorientasi jangka panjang.
5. Mengintegrasikan variabel demografi dalam perencanaan ekonomi, pendidikan, dan ketenagakerjaan daerah.

Strategi Utama :

- Memperluas akses dan kualitas pelayanan KB modern, khususnya MKJP, hingga wilayah terpencil dan perbatasan.
- Mengembangkan sistem informasi dan proyeksi demografi berbasis data terkini untuk mendukung perencanaan pembangunan.
- Memperkuat advokasi dan komunikasi perubahan perilaku terkait usia kawin pertama dan perencanaan keluarga.
- Mengintegrasikan kebijakan kependudukan dengan program peningkatan keterampilan tenaga kerja muda.
- Mendorong sinergi lintas perangkat daerah dalam pengelolaan struktur umur penduduk.

B. Sasaran 2 – Peningkatan Kualitas Penduduk

Peningkatan kualitas penduduk diarahkan pada percepatan pembangunan manusia yang inklusif, berdaya saing, dan berkeadilan wilayah. Kebijakan ini bertujuan memperkuat kualitas pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan produktivitas tenaga kerja sebagai fondasi daya saing daerah.

Sejalan dengan arah pembangunan daerah dalam RPJMD, peningkatan kualitas SDM ditempatkan sebagai prioritas utama dalam kerangka Betang Cerdas, Betang Sehat, dan

Betang Makmur, dengan memastikan bahwa seluruh penduduk, termasuk di wilayah pedalaman dan perbatasan, memperoleh akses layanan dasar yang setara.

Tabel 3. Target Sasaran Peningkatan Kualitas Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah 2025 - 2029

NO	INDIKATOR	BASELINE (2023-2024)	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (tahun)	9,4	9,41	9,51	9,61	9,71	9,82
2	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%) / Proxy : Proporsi Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	11	11,23	11,35	11,47	11,59	11,71
3	Persentase Penduduk Bersertifikat Keahlian / Proxy : Jumlah Tenaga Kerja Tersertifikasi Kompetensi Kerja	8565	8812	9059	9306	9553	9800
4	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	22,1	20,6	18,8	17,2	15,5	14,2
5	Angka Kematian Bayi (kematian per 1.000 kelahiran hidup)	8,6	8,5	8,4	8,3	8,2	8,0
6	Angka Kematian Ibu (kematian per 100.000 kelahiran hidup)	116	114	109	97	86	77
7	Tingkat Kemiskinan (%)	5,17	4,61	4,19	3,77	3,35	2,93
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita (%)	49.6	52,03	52,77	53,52	54,26	55,00
9	Persentase Pekerja Informal (%)	69,35	69,02	67,59	66,16	64,73	63,30
10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	13,16	40,00	42,50	45,00	47,50	50,00
11	Gini Ratio	0,301	0,311	0,294	0,277	0,259	0,242
12	PDRB Perkapita (juta rupiah)	79,319	82,4	92,6	100	110	124
13	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4.01	3,91	3,85	3,79	3,72	3,61
14	Persentase Kepemilikan NPWP / Proxy : Persentase Peningkatan Pajak daerah hasil ekstensifikasi (%)	18,65	18,65	6,17	9,92	9,93	9,93

Arah Kebijakan :

1. Mempercepat peningkatan kualitas SDM melalui penguatan akses dan mutu pendidikan serta layanan kesehatan yang merata.
2. Mengurangi ketimpangan kualitas penduduk antarwilayah sebagai prasyarat pembangunan yang inklusif.

3. Menurunkan prevalensi stunting secara berkelanjutan melalui pendekatan keluarga dan lingkungan.
4. Mengurangi kemiskinan dan kerentanan ekonomi rumah tangga berbasis peningkatan produktivitas.
5. Mengintegrasikan pembangunan manusia dengan transformasi ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Strategi Utama :

- Memperluas pendidikan menengah dan vokasi yang relevan dengan kebutuhan sektor unggulan daerah.
- Memperkuat intervensi spesifik dan sensitif stunting berbasis keluarga, sanitasi, dan gizi.
- Mengoptimalkan jaminan kesehatan dan perlindungan sosial adaptif berbasis data kependudukan.
- Mendorong kewirausahaan dan ekonomi produktif berbasis potensi lokal dan desa.
- Menguatkan kolaborasi multipihak dalam peningkatan kualitas SDM.

C. Sasaran 3 – Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga diarahkan pada penguatan ketahanan dan kemandirian keluarga sebagai unit sosial dasar pembentuk kualitas generasi. Keluarga diposisikan sebagai pusat pembentukan karakter, nilai, dan produktivitas ekonomi, sekaligus sebagai ruang perlindungan sosial pertama bagi anak, remaja, dan lansia.

Kebijakan ini berlandaskan nilai kebersamaan, toleransi, dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, yang menjadi ciri khas sosial budaya Kalimantan Tengah. Dengan demikian, pembangunan keluarga tidak hanya berorientasi pada indikator kesejahteraan material, tetapi juga pada harmoni sosial dan kekuatan relasi antaranggota keluarga.

Tabel 4. Target Sasaran Pembangunan Keluarga Provinsi Kalimantan Tengah 2025 - 2029

NO	INDIKATOR	BASELINE (2023-2024)	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Indeks Pembangunan Keluarga (i-bangga)	62,72	64,63	66,41	68,06	69,6	71,02
2	Indeks Perlindungan Anak	60,37	67,55	67,55	69,57	71,65	73,79

NO	INDIKATOR	BASELINE (2023-2024)	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
3	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan(%)	59,92	64,53	67,25	69,77	72,38	75,00
4	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman(%)	11,07	11,16	13,37	15,58	17,79	20,00
5	Indeks Lansia Berdaya	59,33	61,04	62,64	64,13	65,52	66,81
6	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	84,76	85,86	86,88	87,83	88,71	89,52
7	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	99,02	99,25	99,30	99,35	99,40	99,45

Arah Kebijakan :

1. Memperkuat keluarga sebagai pusat pembentukan karakter, ketahanan sosial, dan produktivitas ekonomi.
2. Meningkatkan kualitas pengasuhan anak dan remaja dalam menghadapi tantangan sosial dan digital.
3. Mendorong kemandirian ekonomi keluarga berbasis potensi lokal dan kewirausahaan.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hunian keluarga yang sehat dan layak.
5. Memperkuat perlindungan keluarga terhadap risiko sosial, termasuk kekerasan dan ketimpangan gender.

Strategi Utama :

- Mengakselerasi pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas sebagai simpul pemberdayaan komunitas.
- Memperluas program BKB, BKR, dan BKL secara terpadu lintas sektor.
- Mendorong peningkatan akses rumah layak huni dan sanitasi aman bagi keluarga rentan.
- Mengintegrasikan layanan perlindungan perempuan dan anak dalam sistem pembangunan keluarga.
- Menguatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan keluarga berbasis nilai kebersamaan dan gotong royong.

D. Sasaran 4 – Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Penataan persebaran dan mobilitas penduduk diarahkan pada pengurangan ketimpangan spasial serta penguatan pusat-pusat pertumbuhan baru yang berkelanjutan. Dengan karakter wilayah yang luas dan kepadatan rendah, kebijakan ini bertujuan memastikan

bahwa mobilitas penduduk mendukung pemerataan ekonomi dan tidak menciptakan tekanan berlebihan pada kawasan perkotaan tertentu.

Pendekatan kewilayahan dilaksanakan secara terintegrasi dengan kebijakan tata ruang, pengembangan kawasan strategis, serta penguatan desa dan perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi lokal.

Tabel 5. Target Sasaran Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah 2025 - 2029

NO	INDIKATOR	BASELINE (2023-2024)	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (%)	18,78	22,24	26,35	31,21	36,96	43,78
2	Rate *Nett Recent Migration* / Proxy : Kepadatan Penduduk (jlh penduduk per Km2)	18	18,22	18,71	18,93	19,14	19,35

Arah Kebijakan :

1. Mengurangi ketimpangan spasial melalui pemerataan pembangunan berbasis klaster wilayah.
2. Mengendalikan dampak urbanisasi agar tidak menimbulkan tekanan berlebih pada infrastruktur perkotaan.
3. Memperkuat desa dan kawasan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan kampung dalam pelayanan kependudukan dan keluarga.
5. Mengintegrasikan kebijakan kependudukan dalam perencanaan tata ruang dan pengembangan kawasan strategis.

Strategi Utama :

- Meningkatkan persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri secara bertahap dan terukur.
- Mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi wilayah.
- Memperluas akses infrastruktur dasar pada wilayah dengan kepadatan rendah.
- Mengintegrasikan data mobilitas penduduk dalam perencanaan kewilayahan.
- Mendorong kebijakan afirmatif bagi wilayah tertinggal dan terpencil.

E. Sasaran 5 – Penataan Administrasi Kependudukan

Penataan administrasi kependudukan diarahkan pada penguatan tata kelola pembangunan berbasis data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Administrasi kependudukan dipandang sebagai fondasi sistem perencanaan daerah yang presisi dan adaptif terhadap perubahan demografi.

Kebijakan ini mendukung transformasi digital pemerintahan daerah dan memperkuat integrasi data kependudukan dengan sistem perencanaan, penganggaran, serta perlindungan sosial.

Tabel 6. Target Sasaran Penataan Administrasi Kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah 2025 - 2029

NO	INDIKATOR	BASELINE (2023-2024)	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Balita (%)	96	97	97,25	97,50	97,75	98
2	Cakupan Kepemilikan Akta Cerai (%)	50	51	51,50	52	52,50	53
3	Cakupan Kepemilikan Akta Nikah (%)	50	51	51,50	52	52,50	53
4	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian (%)	64	65	65,50	66	66,50	67

Arah Kebijakan :

1. Mewujudkan tata kelola pembangunan berbasis data kependudukan yang akurat dan terintegrasi.
2. Mempercepat universalitas kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.
3. Menguatkan literasi kependudukan sebagai bagian dari budaya administrasi masyarakat.
4. Mendukung transformasi digital pemerintahan daerah.
5. Mengarusutamakan perspektif kependudukan dalam seluruh dokumen perencanaan daerah.

Strategi Utama :

- Mengembangkan interoperabilitas data kependudukan lintas perangkat daerah.
- Meningkatkan digitalisasi layanan administrasi kependudukan hingga tingkat desa.
- Memanfaatkan data mikro keluarga untuk perencanaan dan perlindungan sosial yang presisi.
- Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi berbasis data real time.

- Mengintegrasikan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah.

BAB III
RENCANA AKSI

Pembangunan kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029 dilaksanakan sebagai bagian integral dari transformasi wilayah menuju Kalimantan Tengah Tangguh 2045. Rencana aksi ini dirancang tidak hanya sebagai turunan teknokratis dari sasaran pembangunan kependudukan, tetapi sebagai instrumen konsolidasi kebijakan yang menyinergikan penguatan SDM unggul dengan nilai kebersamaan, harmoni sosial, serta keberlanjutan lingkungan hidup.

Rencana aksi ini mengintegrasikan lima pilar pembangunan kependudukan dalam GDPK dengan arah pembangunan RPJMD 2025–2029, khususnya melalui program prioritas Betang Maju, Betang Makmur, Betang Cerdas, Betang Sehat, Betang Harmoni, serta implementasi Kartu Huma Betang Sejahtera sebagai instrumen perlindungan sosial terpadu.

A. Tata Kelola Pembangunan Kependudukan

Tata kelola pembangunan kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah disusun berdasarkan prinsip integrasi kebijakan, kolaborasi multipihak, dan penguatan perencanaan berbasis data. Pendekatan ini menempatkan isu kependudukan bukan sebagai urusan sektoral yang terpisah, melainkan sebagai kerangka integratif yang menjiwai seluruh kebijakan pembangunan daerah.

Pembangunan kependudukan diarusutamakan dalam seluruh dokumen perencanaan daerah, mulai dari RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, hingga penganggaran tahunan. Setiap indikator pembangunan manusia, keluarga, dan kewilayahan dianalisis berdasarkan struktur, komposisi, dan dinamika penduduk.

Pendekatan ini memastikan bahwa:

- Program Betang Cerdas memperhitungkan proyeksi usia sekolah dan kualitas generasi produktif;
- Program Betang Sehat berbasis pada distribusi risiko kesehatan dan kerentanan keluarga;
- Program Betang Makmur terintegrasi dengan struktur angkatan kerja dan bonus demografi;
- Program Betang Maju mempertimbangkan persebaran penduduk dan daya dukung wilayah;

- Program Betang Harmoni memperkuat kohesi sosial dan ketahanan keluarga lintas generasi.

Selanjutnya, nilai kebersamaan dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah menjadi fondasi tata kelola pembangunan kependudukan. Oleh karena itu, pelaksanaan PJPK dilaksanakan melalui sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan komunitas adat.

Kampung Keluarga Berkualitas, desa, dan kelurahan menjadi simpul implementasi program, sehingga pembangunan kependudukan tidak bersifat top-down, melainkan tumbuh dari partisipasi masyarakat. Pendekatan ini memperkuat rasa kepemilikan sosial terhadap agenda pembangunan.

Selain itu, tata kelola kependudukan didukung oleh integrasi data administrasi kependudukan dengan sistem perencanaan dan perlindungan sosial daerah. Digitalisasi layanan menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan ketepatan sasaran program. Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) berperan sebagai instrumen integrasi data keluarga dalam mendukung perlindungan sosial adaptif, memastikan intervensi berbasis kebutuhan riil keluarga dan wilayah.

Terakhir, Pelaksanaan PJPK dipantau melalui indikator kinerja yang terukur dan dievaluasi secara periodik. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan menjadi salah satu instrumen evaluasi integrasi kebijakan kependudukan dalam pembangunan daerah.

Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan prinsip akuntabilitas, keterbukaan, dan pembelajaran berkelanjutan, sehingga setiap kebijakan dapat disesuaikan secara adaptif terhadap dinamika demografi dan sosial ekonomi.

B. Rencana Aksi PJPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 - 2029

Dalam rangka mewujudkan pembangunan kependudukan yang komprehensif dan terukur, berikut Rencana Aksi PJPK Provinsi Kalimantan Tengah 2025 – 2029 dijabarkan secara terperinci sebagaimana matriks di bawah ini.

Tabel 7. Matriks Rencana Aksi PJPK Provinsi Kalimantan Tengah 2025 – 2029

No	Indikator	Baseline (2023-2024)	Target					Sumber Data	Dinas Pengampu	Dinas Terkait	Rencana Aksi
			2025	2026	2027	2028	2029				
SASARAN 1 : PENGELOLAAN KUANTITAS PENDUDUK											
1	Total Fertility Rate (TFR)	2,26	2,24	2,23	2,22	2,21	2,20	Pendataan Keluarga	DP3APPKB	Dinkes	- Penguatan layanan KB pascapersalinan dan pascakeguguran melalui standar pelayanan terpadu di seluruh fasilitas kesehatan akan diprioritaskan dalam kerangka Betang Sehat. - Optimalisasi distribusi dan keberlanjutan metode kontrasepsi modern, termasuk MKJP, akan diperluas ke wilayah pedalaman melalui pendekatan jemput bola dan dukungan logistik daerah. - Integrasi edukasi kesehatan reproduksi dalam program Betang Cerdas akan diperkuat melalui sekolah dan komunitas agar preferensi fertilitas selaras dengan peningkatan kualitas SDM. Intervensi ini mengedepankan pendekatan keluarga berbasis nilai Huma Betang. - Sinkronisasi program pemberdayaan ekonomi keluarga dalam skema Betang Makmur dan KHBS (Kartu Huma Betang Sejahtera) akan memperkuat kapasitas keluarga dalam merencanakan kelahiran secara sehat dan bertanggung jawab. - Penguatan sistem monitoring dan evaluasi lintas perangkat daerah akan memastikan intervensi fertilitas berjalan terkoordinasi dan berbasis data. Pendekatan ini memperkuat tata kelola pembangunan kependudukan yang adaptif. - Pelibatan tokoh adat/agama untuk perubahan norma fertilitas tinggi.

No	Indikator	Baseline (2023-2024)	Target					Sumber Data	Dinas Pengampu	Dinas Terkait	Rencana Aksi
			2025	2026	2027	2028	2029				
2	Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun	38,40	38,07	37,74	37,42	37,12	36,81	Pendataan Keluarga	DP3APPKB	Dinkes	- Pencegahan putus sekolah melalui afirmasi akses pendidikan menengah dalam program Betang Cerdas akan diperkuat sebagai instrumen protektif terhadap kehamilan dini. - Pengembangan layanan kesehatan ramah remaja di seluruh puskesmas akan diintegrasikan dalam kerangka Betang Sehat untuk memastikan konseling yang aman dan tidak diskriminatif. - Pendampingan keluarga berbasis nilai Huma Betang akan diperluas untuk memperkuat komunikasi orang tua–remaja dan membangun ketahanan keluarga. - Intervensi tersegmentasi pada kabupaten/kota dengan ASFR tinggi akan dilaksanakan melalui program terpadu pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak. - Integrasi dukungan sosial melalui KHBS akan menyasar keluarga rentan agar remaja tetap memiliki akses pendidikan dan layanan kesehatan secara berkelanjutan. - Penguatan Kampung KB sebagai pusat edukasi keluarga. - Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan & tokoh adat/agama. - Penguatan Forum Anak, PIK-R & Forum GenRe untuk edukasi remaja.

No	Indikator	Baseline (2023-2024)	Target					Sumber Data	Dinas Pengampu	Dinas Terkait	Rencana Aksi
			2025	2026	2027	2028	2029				
3	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi	88,72	88,80	88,81	88,82	88,83	88,84	Pendataan Keluarga	DP3APPKB	Dinkes	- Peningkatan kualitas konseling dan tindak lanjut pengguna kontrasepsi akan diperkuat dalam kerangka Betang Sehat. - Distribusi metode kontrasepsi modern termasuk MKJP akan diperluas melalui pelayanan mobile dan dukungan logistik daerah. - Edukasi perencanaan keluarga berbasis komunitas Huma Betang akan diperkuat untuk meningkatkan penerimaan sosial terhadap KB modern. - Sinergi dengan pembangunan konektivitas dan infrastruktur dasar RPJMD. - Monitoring berbasis data lintas sektor akan ditingkatkan.
SASARAN 2 : PENINGKATAN KUALITAS PENDUDUK											
4	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	9,4	9,41	9,51	9,61	9,71	9,82	RPJMD Kalteng 2025-2029	Disdik	BAPPERIDA, Diskominfo	- Penguatan akses dan afirmasi pendidikan menengah dalam program Betang Cerdas akan difokuskan pada wilayah dengan RLS rendah melalui dukungan biaya, transportasi, dan fasilitas asrama. - Integrasi Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) untuk keluarga rentan akan memastikan keberlanjutan pendidikan anak melalui bantuan pendidikan berbasis data terpadu. - Pengembangan pembelajaran berbasis digital dan penguatan konektivitas sekolah akan dipercepat. - Peningkatan kualitas dan distribusi tenaga pendidik akan dilakukan melalui skema insentif dan redistribusi berbasis kebutuhan wilayah. - Penguatan kolaborasi dengan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja

No	Indikator	Baseline (2023-2024)	Target					Sumber Data	Dinas Pengampu	Dinas Terkait	Rencana Aksi
			2025	2026	2027	2028	2029				
5	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%) / Proxy : Proporsi Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	11	11,23	11,35	11,47	11,59	11,71	RPJMD Kalteng 2025-2029	Disdik	Biro Kesra	- Afirmasi pendidikan tinggi dalam kerangka Betang Cerdas akan diperluas melalui skema beasiswa daerah dan kemitraan dengan perguruan tinggi nasional. - Penguatan program “satu keluarga satu sarjana” akan didorong melalui integrasi dukungan KHBS bagi keluarga berpenghasilan rendah untuk mendukung meningkatnya akses pendidikan tinggi, secara khusus bagi keluarga berpenghasilan rendah. - Pengembangan pendidikan vokasi dan politeknik berbasis kebutuhan industri lokal akan dipercepat untuk meningkatkan relevansi pendidikan tinggi. - Kerja sama antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam skema magang terintegrasi akan meningkatkan daya tarik pendidikan tinggi. - Pemanfaatan pembelajaran daring dan hybrid akan diperluas untuk menjangkau mahasiswa dari wilayah terpencil secara lebih inklusif.

No	Indikator	Baseline (2023-2024)	Target					Sumber Data	Dinas Pengampu	Dinas Terkait	Rencana Aksi
			2025	2026	2027	2028	2029				
6	Persentase Penduduk Bersertifikat Keahlian / Proxy : Proxy : Persentase pekerja lulusan menengah dan tinggi yang bekerja di keahlian menengah dan tinggi / Proxy : Jumlah Tenaga Kerja Tersertifikasi Kompetensi Kerja (BLK)	8565	8812	9059	9306	9553	9800	Kemnaker	Disnakertrans	Disdik	- Penguatan pelatihan vokasi dan sertifikasi berbasis kebutuhan industri dalam kerangka Betang Makmur akan diprioritaskan pada sektor unggulan daerah seperti agroindustri dan energi terbarukan. - Kolaborasi dengan dunia usaha dan lembaga sertifikasi profesi akan diperluas untuk meningkatkan akses uji kompetensi bagi tenaga kerja muda. - Integrasi program pelatihan kerja dengan dukungan KHBS akan menyasar keluarga rentan agar memperoleh akses peningkatan kompetensi secara inklusif. - Pengembangan balai latihan kerja berbasis wilayah klaster pembangunan akan mempercepat pemerataan peningkatan keterampilan. - Peningkatan literasi digital dan sertifikasi berbasis teknologi akan dipercepat untuk mendukung transformasi ekonomi hijau dan digital provinsi.

No	Indikator	Baseline (2023-2024)	Target					Sumber Data	Dinas Pengampu	Dinas Terkait	Rencana Aksi
			2025	2026	2027	2028	2029				
7	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	22,1	20,6	18,8	17,2	15,5	14,2	SSGI, SKI, ePPGBM	Dinkes	BAPPERIDA, DP3APPKB	- Penguatan intervensi spesifik dan sensitif gizi dalam kerangka Betang Sehat akan diprioritaskan pada desa dengan prevalensi tinggi berbasis data by name by address. - Integrasi program sanitasi dan air minum layak melalui sinergi dengan kebijakan infrastruktur dasar RPJMD akan memperbaiki determinan lingkungan stunting. - Penguatan edukasi gizi dan pola asuh berbasis keluarga Huma Betang akan diperluas melalui kader desa dan posyandu. - Dukungan sosial melalui Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) akan difokuskan pada keluarga berisiko untuk menjamin kecukupan pangan dan akses layanan kesehatan ibu-anak. - Intensifikasi program pemberian TTD bagi remaja putri / ibu hamil dan juga pemberian makanan tambahan (PMT) - Monitoring konvergensi lintas sektor akan diperkuat untuk memastikan penurunan stunting berlangsung konsisten dan terukur.

No	Indikator	Baseline (2023-2024)	Target					Sumber Data	Dinas Pengampu	Dinas Terkait	Rencana Aksi
			2025	2026	2027	2028	2029				
8	Angka Kematian Bayi (AKB)	8,6	8,5	8,4	8,3	8,2	8,0	Komunikasi Data Kesehatan Masyarakat (Komdat)	Dinkes	DP3APPKB	- Penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak dalam kerangka Betang Sehat akan diprioritaskan pada wilayah dengan AKB tinggi. - Integrasi program penurunan stunting dan perbaikan gizi keluarga akan diperluas melalui pendekatan lintas sektor. - Percepatan akses air minum dan sanitasi layak akan dilakukan melalui sinergi dengan kebijakan infrastruktur dasar RPJMD. - Peningkatan cakupan imunisasi dan kunjungan neonatal akan diperkuat melalui monitoring berbasis data desa. - Dukungan sosial melalui KHBS akan memastikan keluarga rentan memiliki akses layanan kesehatan bayi secara berkelanjut.
9	Angka Kematian Ibu (AKI)	116	114	109	97	86	77	Komunikasi Data Kesehatan Masyarakat (Komdat)	Dinkes	DP3APPKB	- Penguatan layanan obstetri dan neonatal emergensi komprehensif akan dipercepat dalam kerangka Betang Sehat melalui peningkatan kapasitas rumah sakit rujukan. - Optimalisasi sistem rujukan terintegrasi berbasis digital akan dilakukan untuk mempercepat respons kasus kegawatdaruratan maternal. - Edukasi perencanaan kehamilan dan jarak kelahiran akan diperkuat melalui integrasi layanan KB dalam pendekatan keluarga Huma Betang. - Penyediaan rumah tunggu kelahiran di wilayah terpencil akan diperluas untuk mengurangi risiko keterlambatan persalinan aman. - Integrasi dukungan sosial KHBS akan membantu keluarga rentan mengakses layanan kesehatan maternal tanpa hambatan biaya.

No	Indikator	Baseline (2023-2024)	Target					Sumber Data	Dinas Pengampu	Dinas Terkait	Rencana Aksi
			2025	2026	2027	2028	2029				
10	Tingkat Kemiskinan	5,17	4,61	4,19	3,77	3,35	2,93	BPS	BAPPERIDA	TP2K (Tim Percepatan Penanggulan Kemiskinan)	- Percepatan peningkatan persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap serta penguatan konektivitas antar klaster pembangunan akan diprioritaskan. - Pembangunan dan rehabilitasi jembatan strategis, dermaga sungai, serta akses transportasi darat menuju sentra produksi akan dipercepat. - Penguatan jaringan irigasi, infrastruktur pertanian, dan fasilitas pascapanen akan diintegrasikan dalam program Betang Makmur. - Peningkatan rasio elektrifikasi dan stabilitas pasokan listrik akan diprioritaskan pada wilayah dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi untuk mendukung pengembangan UMKM dan industri pengolahan lokal. - Percepatan akses air minum layak dan sanitasi aman melalui sinergi lintas perangkat daerah. - Program rehabilitasi rumah tidak layak huni dan peningkatan kualitas hunian. - Perluasan infrastruktur digital dan konektivitas internet pada wilayah blank spot akan dipercepat. - Penguatan infrastruktur mitigasi bencana, rehabilitasi lahan, dan pengelolaan lingkungan berbasis ekonomi hijau.

No	Indikator	Baseline (2023-2024)	Target					Sumber Data	Dinas Pengampu	Dinas Terkait	Rencana Aksi
			2025	2026	2027	2028	2029				
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita	49.6	52,03	52,77	53,52	54,26	55,00	RPJMD Kalteng 2025-2029	Disnakertrans	DP3APPKB	- Penguatan pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi bagi perempuan dalam kerangka Betang Makmur. - Pengembangan dukungan layanan pengasuhan anak dan ruang kerja ramah perempuan akan didorong melalui sinergi Betang Harmoni dan kebijakan ketenagakerjaan inklusif. - Afirmasi akses pendidikan tinggi dan pelatihan digital bagi perempuan akan diperluas dalam kerangka Betang Cerdas untuk meningkatkan kesiapan memasuki sektor formal. - Penguatan kewirausahaan perempuan berbasis UMKM dan koperasi akan difasilitasi melalui akses pembiayaan dan pendampingan usaha. - Integrasi perlindungan sosial melalui KHBS akan memastikan perempuan kepala keluarga memperoleh dukungan untuk mempertahankan partisipasi kerja secara berkelanjutan.
12	Persentase Pekerja Informal	69,35	69,02	67,59	66,16	64,73	63,30	BPS	Disnakertrans	Dinas Koperasi dan UMKM	- Pengembangan kawasan industri dan klaster ekonomi berbasis kewilayahan. - Program sertifikasi kompetensi dan pelatihan kerja akan diperluas untuk memfasilitasi transisi pekerja informal ke sektor formal. - Fasilitasi legalitas usaha, digitalisasi UMKM, dan akses pembiayaan formal akan diperkuat untuk mendorong formalisasi usaha kecil. - Integrasi pekerja informal dalam skema perlindungan sosial dan JKN akan diperluas untuk meningkatkan keamanan kerja. - Penguatan literasi keuangan dan administrasi usaha berbasis desa akan dilakukan untuk meningkatkan kesiapan usaha mikro menjadi formal.

No	Indikator	Baseline (2023-2024)	Target					Sumber Data	Dinas Pengampu	Dinas Terkait	Rencana Aksi
			2025	2026	2027	2028	2029				
13	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	13,16	40,00	42,50	45,00	47,50	50,00	BPS	Disnakertrans	Dinsos	- Penguatan pelatihan vokasi inklusif dan sertifikasi kompetensi bagi penyandang disabilitas akan diprioritaskan dalam kerangka Betang Makmur dan Betang Cerdas. - Peningkatan aksesibilitas infrastruktur publik dan tempat kerja akan diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan fisik RPJMD. - Pemberian insentif dan fasilitasi kepada perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas akan didorong melalui regulasi daerah. - Integrasi data disabilitas dalam sistem ketenagakerjaan berbasis digital akan diperkuat untuk mendukung perencanaan intervensi. - Penguatan kampanye inklusi kerja berbasis nilai Huma Betang akan dilakukan untuk mengurangi stigma dan meningkatkan kesadaran dunia usaha.

No	Indikator	Baseline (2023-2024)	Target					Sumber Data	Dinas Pengampu	Dinas Terkait	Rencana Aksi
			2025	2026	2027	2028	2029				
14	Gini Ratio	0,301	0,311	0,294	0,277	0,259	0,242	BPS	BAPPERIDA	Disnakertrans, Dinas PUPR, DPMD, Dinas Koperasi dan UKM, Disdagperin	- Pengembangan hilirisasi komoditas unggulan dalam kerangka Betang Makmur akan dipercepat untuk meningkatkan distribusi nilai tambah di tingkat lokal. - Penguatan akses pembiayaan UMKM melalui koperasi dan lembaga keuangan daerah akan diperluas untuk mendorong pemerataan kesempatan usaha. - Pengembangan klaster ekonomi berbasis kewilayahan RPJMD akan diarahkan untuk mengurangi konsentrasi pertumbuhan pada satu pusat kota. - Peningkatan sertifikasi kompetensi dan pelatihan kerja akan dilakukan untuk mempersempit kesenjangan upah antarwilayah. - Penguatan literasi dan inklusi keuangan berbasis desa akan didorong untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. - Percepatan pembangunan infrastruktur pasar dan rantai distribusi akan mendukung peningkatan margin usaha masyarakat kecil. - Integrasi program KHBS akan memastikan kelompok rentan memperoleh akses peluang ekonomi secara berkelanjutan. - Monitoring ketimpangan berbasis data wilayah akan diperkuat untuk menjaga konvergensi distribusi pendapatan secara terukur.

No	Indikator	Baseline (2023-2024)	Target					Sumber Data	Dinas Pengampu	Dinas Terkait	Rencana Aksi
			2025	2026	2027	2028	2029				
15	PDRB Perkapita	79,319	82,4	92,6	100	110	124	BPS	BAPPERIDA	Disdagperin, Disdik, Dinas PUPR, DLH, Disbun, Dinas ESDM	- Percepatan hilirisasi komoditas unggulan daerah seperti kelapa sawit, hasil hutan, dan mineral akan diprioritaskan dalam kerangka Betang Makmur untuk meningkatkan nilai tambah lokal. - Pengembangan kawasan industri dan klaster ekonomi berbasis kewilayahan RPJMD akan diperluas guna mendorong diversifikasi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja formal. - Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi dan sertifikasi kompetensi akan diperkuat dalam kerangka Betang Cerdas untuk mendukung transformasi ekonomi bernilai tambah tinggi. - Percepatan pembangunan infrastruktur jalan, energi, dan konektivitas digital dalam kerangka Betang Maju akan diarahkan untuk menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing wilayah. - Penguatan ekonomi hijau dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan akan diintegrasikan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi selaras dengan prinsip pembangunan inklusif dan berkeadilan wilayah menuju Kalteng Tangguh 2045.

No	Indikator	Baseline (2023-2024)	Target					Sumber Data	Dinas Pengampu	Dinas Terkait	Rencana Aksi
			2025	2026	2027	2028	2029				
16	Tingkat Pengangguran Terbuka	4.01	3,91	3,85	3,79	3,72	3,61	BPS	Disnakertrans	Disdik, Diskop UKM	- Penguatan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri dalam kerangka Betang Makmur akan diprioritaskan pada sektor unggulan seperti agroindustri dan energi terbarukan. - Pengembangan kawasan ekonomi berbasis klaster pembangunan RPJMD akan diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja formal di luar pusat kota. - Integrasi sertifikasi kompetensi dan program magang dengan dunia usaha akan diperluas untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja muda. - Dukungan kewirausahaan berbasis UMKM akan diperkuat untuk mendorong penciptaan lapangan kerja mandiri. - Sinkronisasi data ketenagakerjaan lintas perangkat daerah akan memastikan intervensi pengurangan pengangguran berbasis kebutuhan riil wilayah.
17	Persentase Kepemilikan NPWP (Proxy : Persentase Peningkatan Pajak daerah hasil ekstensifikasi)	18,65	18,65	6,17	9,92	9,93	9,93	Bapenda	Bapenda	BKAD	- Digitalisasi dan integrasi data objek pajak berbasis sistem informasi terpadu akan diperkuat untuk mempercepat identifikasi dan validasi wajib pajak baru dalam kerangka modernisasi tata kelola fiskal daerah. - Optimalisasi pendataan kendaraan bermotor dan objek pajak potensial pada sektor perkebunan dan pertambangan. - Penguatan literasi dan edukasi perpajakan berbasis komunitas serta pendekatan jemput bola. - Peningkatan pengawasan dan pemanfaatan teknologi berbasis data analytics akan dilakukan untuk meminimalkan kebocoran potensi pajak. - Pengenaan pajak alat berat dan pajak mineral bukan logam / batuan mulai 2026

No	Indikator	Baseline (2023-2024)	Target					Sumber Data	Dinas Pengampu	Dinas Terkait	Rencana Aksi
			2025	2026	2027	2028	2029				
SASARAN 3 : PEMBANGUNAN KELUARGA											
18	Indeks Pembangunan Keluarga (i-bangga)	62,72	64,63	66,41	68,06	69,6	71,02	Pendataan Keluarga	DP3APPKB	Disdik, Dinkes, Dinsos	- Penguatan program pembinaan keluarga berbasis komunitas dalam semangat Huma Betang akan diperluas untuk meningkatkan fungsi keagamaan, sosial, dan perlindungan dalam keluarga melalui pendekatan Betang Harmoni. - Integrasi intervensi kesehatan keluarga dan pencegahan stunting dalam kerangka Betang Sehat akan difokuskan pada keluarga berisiko rendah daya tahan kesehatan. - Penguatan literasi pengasuhan remaja dan pendidikan keluarga dalam kerangka Betang Cerdas akan dilakukan melalui sekolah, posyandu, dan Rumah Data Kependudukan. - Pemberdayaan ekonomi keluarga melalui penguatan UMKM dan akses pembiayaan mikro akan diprioritaskan dalam kerangka Betang Makmur. - Integrasi dukungan sosial melalui KHBS.

No	Indikator	Baseline (2023-2024)	Target					Sumber Data	Dinas Pengampu	Dinas Terkait	Rencana Aksi
			2025	2026	2027	2028	2029				
19	Indeks Perlindungan Anak	60,37	67,55	67,55	69,57	71,65	73,79	Renstra DP3APPKB	DP3APPKB	Kemenag, Dinsos, DPMD, Diskominfo, DAD (Dewan Adat Dayak)	- Penguatan layanan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak akan diperluas hingga menjangkau klaster wilayah terpencil dalam kerangka Betang Harmoni. - Integrasi sistem pelaporan kasus berbasis digital akan dikembangkan untuk mempercepat respons dan koordinasi lintas sektor. - Program pengasuhan positif berbasis komunitas Huma Betang akan diperluas untuk memperkuat ketahanan keluarga. - Afirmasi pencegahan perkawinan usia anak akan diintegrasikan dengan program pendidikan dalam kerangka Betang Cerdas. - Penguatan literasi digital aman bagi anak akan didorong melalui kolaborasi sekolah dan orang tua. - Integrasi KHBS akan memastikan anak dari keluarga rentan memperoleh perlindungan sosial dan akses pendidikan. - Penguatan koordinasi desa ramah anak akan dilakukan melalui pendekatan berbasis data kewilayahan. - Monitoring dan evaluasi IPA berbasis kabupaten/kota akan diperkuat untuk menjaga konvergensi capaian provins- .

No	Indikator	Baseline (2023-2024)	Target					Sumber Data	Dinas Pengampu	Dinas Terkait	Rencana Aksi
			2025	2026	2027	2028	2029				
20	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan(%)	59,92	64,53	67,25	69,77	72,38	75,00	Renstra 2025-2029 Dinas Perkimtan	Dinas Perkimtan	Dinas PUPR	- Percepatan rehabilitasi rumah tidak layak huni akan diprioritaskan dalam kerangka Betang Harmoni untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal keluarga rentan. - Integrasi pembiayaan perumahan bersubsidi dan dukungan kredit mikro akan diperluas untuk meningkatkan keterjangkauan hunian bagi keluarga berpenghasilan rendah. - Sinkronisasi pembangunan perumahan dengan tata ruang dan infrastruktur dasar akan diperkuat dalam kerangka Betang Maju. - Penguatan standar konstruksi ramah lingkungan dan adaptif terhadap risiko bencana akan diintegrasikan untuk mendukung pembangunan hunian berkelanjutan. - Integrasi data perumahan dengan KHBS akan memastikan intervensi hunian tepat sasaran dan terhubung dengan program kesejahteraan keluarga.

No	Indikator	Baseline (2023-2024)	Target					Sumber Data	Dinas Pengampu	Dinas Terkait	Rencana Aksi
			2025	2026	2027	2028	2029				
21	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman(%)	11,07	11,16	13,37	15,58	17,79	20,00	RPJMD Kalteng 2025-2029	Dinas PUPR	Dinas Perkimtan	- Percepatan pembangunan sarana sanitasi aman berbasis desa akan diprioritaskan dalam kerangka Betang Maju untuk meningkatkan cakupan layanan dasar. - Pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik skala kawasan akan diperluas untuk mengurangi pencemaran lingkungan. - Edukasi perilaku hidup bersih dan sehat akan diperkuat melalui pendekatan komunitas Huma Betang dan kader desa. - Integrasi pembangunan sanitasi dengan program penurunan stunting dan kesehatan ibu-anak akan diperkuat dalam kerangka Betang Sehat. - Pemanfaatan data Rumah Data Kependudukan dan KHBS akan memastikan intervensi sanitasi tepat sasaran pada keluarga rentan.

No	Indikator	Baseline (2023-2024)	Target					Sumber Data	Dinas Pengampu	Dinas Terkait	Rencana Aksi
			2025	2026	2027	2028	2029				
22	Indeks Lansia Berdaya	59,33	61,04	62,64	64,13	65,52	66,81	Pendataan Keluarga	DP3APPKB	Dinsos, Dinkes	- Penguatan layanan kesehatan lansia dalam kerangka Betang Sehat akan diprioritaskan melalui pengembangan layanan geriatri dan skrining rutin. - Pengembangan ruang publik dan fasilitas umum ramah lansia akan dipercepat untuk meningkatkan mobilitas dan partisipasi sosial. - Pemberdayaan lansia produktif melalui pelatihan usaha mikro akan diintegrasikan dalam program Betang Makmur. - Integrasi lansia dalam skema perlindungan sosial KHBS akan memastikan jaminan akses kesehatan dan bantuan sosial tepat sasaran. - Penguatan posyandu lansia dan kader kesehatan desa akan diperluas untuk deteksi dini penyakit kronis. - Digitalisasi layanan administrasi kependudukan akan memudahkan lansia dalam mengakses hak-haknya. - Edukasi keluarga tentang perawatan lansia berbasis nilai Huma Betang akan diperkuat. - Monitoring indeks lansia berdaya berbasis wilayah akan dilakukan untuk menjaga konvergensi pembangunan ramah lansia.

No	Indikator	Baseline (2023-2024)	Target					Sumber Data	Dinas Pengampu	Dinas Terkait	Rencana Aksi
			2025	2026	2027	2028	2029				
23	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	84,76	85,86	86,88	87,83	88,71	89,52	Pendataan Keluarga	DP3APPKB	Disdik, Dinkes, Diskominfo, DPMD	- Penguatan program pembinaan keluarga berbasis komunitas dalam semangat Huma Betang akan diperluas untuk meningkatkan kualitas pengasuhan remaja. - Integrasi edukasi kesehatan reproduksi dan kesehatan mental remaja dalam kerangka Betang Cerdas dan Betang Sehat akan diperkuat. - Pengembangan layanan konseling remaja di puskesmas dan sekolah akan diprioritaskan pada wilayah dengan indeks rendah. - Dukungan ekonomi keluarga melalui program Betang Makmur dan KHBS akan membantu menjaga stabilitas pengasuhan. - Peningkatan literasi digital keluarga akan dilakukan untuk memperkuat pengawasan penggunaan internet remaja. - Penguatan koordinasi lintas sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak akan dilakukan berbasis data kewilayahan. - Monitoring indeks pengasuhan berbasis kabupaten/kota akan diperkuat untuk menjaga konvergensi capaian provinsi. - Afirmasi peran ayah dan ibu dalam pengasuhan akan diperluas melalui kampanye keluarga harmonis berbasis desa melalui intensifikasi program GATI (Gerakan Ayah Teladan Indonesia).

No	Indikator	Baseline (2023-2024)	Target					Sumber Data	Dinas Pengampu	Dinas Terkait	Rencana Aksi
			2025	2026	2027	2028	2029				
24	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	99,02	99,25	99,30	99,35	99,40	99,45	Dinas Kesehatan	Dinkes	Dinsos, Disdukcapil	- Perluasan integrasi data kependudukan dan kepesertaan JKN akan diperkuat melalui sinergi lintas perangkat daerah. - Optimalisasi KHBS akan memastikan keluarga rentan tetap terdaftar aktif sebagai peserta JKN. - Penguatan layanan pendaftaran digital dan jemput bola di wilayah terpencil akan mempercepat peningkatan cakupan. - Integrasi program ketenagakerjaan dan pelaku UMKM akan mendorong kepesertaan mandiri pekerja informal. - Pengembangan fasilitas kesehatan rujukan di klaster pembangunan akan meningkatkan akses dan kualitas layanan. - Edukasi literasi administrasi kesehatan berbasis komunitas Huma Betang akan diperluas untuk meningkatkan pemanfaatan layanan. - Monitoring wilayah dengan cakupan rendah akan dilakukan secara berkala berbasis data desa. - Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan akan diintegrasikan dalam kerangka Betang Sehat untuk memastikan manfaat kepesertaan optimal.
SASARAN 4 : PENATAAN PERSEBARAN DAN MOBILITAS PENDUDUK											

No	Indikator	Baseline (2023-2024)	Target					Sumber Data	Dinas Pengampu	Dinas Terkait	Rencana Aksi
			2025	2026	2027	2028	2029				
25	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	18,78	22,24	26,35	31,21	36,96	43,78	Kemendukbangga / BKKBN	DP3APPKB	DPMD	- Penguatan Implementasi Instruksi Gubernur nomor 400.13.26.2/151/DP3APPKB tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas oleh komponen lintas sektor Perangkat Daerah. - Penguatan integrasi program keluarga, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi desa akan diprioritaskan dalam kerangka Betang Harmoni untuk mempercepat kemandirian Kampung KB. - Peningkatan kapasitas pengelola Kampung KB dan Rumah Data Kependudukan akan diperluas melalui pelatihan berbasis Betang Cerdas. - Integrasi Kampung KB dengan pemberdayaan ekonomi desa dalam kerangka Betang Makmur akan diarahkan untuk memperkuat kemandirian keluarga. - Digitalisasi pemantauan dan evaluasi Kampung KB akan diperkuat untuk menjaga konsistensi capaian berbasis data. - Sinergi dengan KHBS akan memastikan keluarga rentan dalam Kampung KB memperoleh akses intervensi prioritas secara tepat sasaran.

No	Indikator	Baseline (2023-2024)	Target					Sumber Data	Dinas Pengampu	Dinas Terkait	Rencana Aksi
			2025	2026	2027	2028	2029				
26	Rate *Nett Recent Migration* / Proxy : Kepadatan Penduduk	18	18,22	18,71	18,93	19,14	19,35	BPS	DP3APPKB	BAPPERIDA, Disdukcapil	- Pada klaster perkotaan dan pusat pertumbuhan, penguatan perencanaan tata ruang dan pengembangan hunian vertikal akan diprioritaskan untuk mengelola tekanan kepadatan secara terkontrol. - Pada klaster wilayah pedalaman dan hinterland, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas akan diarahkan untuk mendorong pemerataan distribusi penduduk dan aktivitas ekonomi. - Pada klaster kawasan industri dan perkebunan, pengembangan permukiman terencana dan layanan dasar akan diintegrasikan untuk mengantisipasi lonjakan kepadatan temporer tenaga kerja. - Pada klaster rawan bencana dan degradasi lingkungan, pengendalian pemanfaatan ruang dan relokasi berbasis mitigasi risiko akan diperkuat untuk menjaga keseimbangan demografi dan ekologi. - Penguatan sistem informasi kependudukan berbasis digital akan dilakukan untuk memantau dinamika kepadatan dan migrasi internal secara real time dalam kerangka transformasi wilayah inklusif.
SASARAN 5 : PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN											

No	Indikator	Baseline (2023-2024)	Target					Sumber Data	Dinas Pengampu	Dinas Terkait	Rencana Aksi
			2025	2026	2027	2028	2029				
27	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Balita	96	97	97,25	97,50	97,75	98	Renstra 2025-2029	Disdukcapil	Dinkes	Melakukan layanan "Jemput Bola" Inovasi seperti pendaftaran kolektif atau layanan langsung ke masyarakat (misalnya di rumah sakit bersalin atau desa terpencil) untuk mempermudah akses dan Melakukan Sosialisasi akan pentingnya kepemilikan Akta Kelahiran. Sosialisai terkait pencatatan sipil, penetapan kebijakan teknis di bidang pencatatan sipil, fasilitasi bidang pencatatan sipil ke kabupaten/kota, dan penataan tata kelola pelaksanaan pencatatan sipil skala provinsi.
28	Cakupan Kepemilikan Akta Cerai	50	51	51,50	52	52,50	53	Renstra 2025-2029	Disdukcepil	DPMPTSP, Pengadilan Agama, Kemenag	Membuat layanan terintegrasi di kantor pengadilan atau Mal Pelayanan Publik (MPP). Pemohon cerai dapat langsung mengurus administrasi kependudukan pasca-perceraian (akta cerai, perubahan status KTP, dan KK baru) di satu tempat. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya status hukum yang jelas pasca-perceraian, Memastikan bahwa setiap penerbitan akta cerai diikuti dengan kewajiban pemutakhiran data pada KTP dan KK (perubahan status dari 'kawin' menjadi 'cerai hidup' atau 'cerai mati'). Sosialisai terkait pencatatan sipil, penetapan kebijakan teknis di bidang pencatatan sipil, fasilitasi bidang pencatatan sipil ke kabupaten/kota, dan penataan tata kelola pelaksanaan pencatatan sipil skala provinsi.

No	Indikator	Baseline (2023-2024)	Target					Sumber Data	Dinas Pengampu	Dinas Terkait	Rencana Aksi
			2025	2026	2027	2028	2029				
29	Cakupan Kepemilikan Akta Nikah	50	51	51,50	52	52,50	53	Renstra 2025-2029	Disdukcapil	Kemenag	Menerapkan sistem di mana pasangan yang menikah di KUA atau Catatan Sipil akan langsung mendapatkan Akta Nikah, Kartu Keluarga (KK) baru dengan status perkawinan yang diperbarui, dan KTP dengan status baru secara bersamaan dalam satu layanan terintegrasi, melakukan sosialisasi masif tentang pentingnya akta nikah untuk perlindungan hukum istri dan status legal anak (termasuk hak waris dan perdata), dan memastikan sosialisasi bahwa menikah di KUA pada jam kerja adalah gratis dan menindak tegas praktik pungutan liar, Fasilitasi bidang pencatatan sipil ke kabupaten/kota, dan penataan tata kelola pelaksanaan pencatatan sipil skala provinsi.
30	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	64	65	65,50	66	66,50	67	Renstra 2025-2029	Disdukcapil	Dinkes	"Jemput Bola" dan Integrasi Layanan, Mewajibkan Tempat Pemakaman Umum (TPU) atau otoritas desa/kelurahan untuk berkoordinasi langsung dengan Disdukcapil, data kematian langsung dikirim setelah proses pemakaman selesai, Memastikan rumah sakit dan puskesmas secara otomatis menerbitkan surat keterangan kematian yang terstandardisasi dan terhubung langsung dengan sistem Dukcapil, Memastikan penerbitan akta kematian secara otomatis diikuti dengan perubahan status KTP dan KK ahli waris (penghapusan NIK almarhum), Melakukan Sosialisasi akan pentingnya kepemilikan Akta Kematian., Fasilitasi bidang pencatatan sipil ke kabupaten/kota, dan penataan tata kelola pelaksanaan pencatatan sipil skala provinsi.

C. Kerangka Kelembagaan dan Pembagian Peran Perangkat Daerah dalam Pencapaian Indikator PJPK

Pembangunan kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan melalui tata kelola kolaboratif lintas perangkat daerah, dengan pendekatan integratif yang menempatkan dinamika penduduk sebagai variabel utama dalam perencanaan pembangunan. Setiap perangkat daerah memiliki peran substantif yang saling terhubung dalam mewujudkan SDM unggul, keluarga tangguh, wilayah inklusif, serta transformasi ekonomi hijau dan berkeadilan.

Berikut penjabaran peran masing-masing perangkat daerah:

1. **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB)**
   - Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh indikator PJPK pada aspek pengelolaan kuantitas penduduk dan pembangunan keluarga.
   - Memperluas akses dan kualitas pelayanan KB, termasuk MKJP, terutama di wilayah terpencil dan perbatasan.
   - Mengembangkan dan memperkuat Kampung Keluarga Berkualitas menuju kategori Mandiri.
   - Melaksanakan program BKB, BKR, dan BKL secara terpadu untuk meningkatkan kualitas pengasuhan anak, remaja, dan lansia.
   - Mengintegrasikan data keluarga dalam sistem perencanaan berbasis mikro sebagai bagian dari penguatan KHBS.

2. **Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)**
   - Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana aksi indikator PJPK yang bersifat lintas sektor
   - Mengintegrasikan indikator PJPK dalam RPJMD, RKPD, dan dokumen perencanaan perangkat daerah.
   - Mengawal pengarusutamaan perspektif kependudukan dalam kebijakan pembangunan wilayah dan sektor.
   - Melakukan monitoring dan evaluasi capaian indikator pembangunan berwawasan kependudukan.
   - Mengembangkan sistem perencanaan berbasis proyeksi demografi dan analisis spasial.

3. **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
   - Meningkatkan universalitas kepemilikan dokumen administrasi kependudukan (akta kelahiran, akta kematian, akta nikah, KIA, KTP-el).

- Mengembangkan interoperabilitas data kependudukan lintas perangkat daerah untuk mendukung perencanaan presisi.
- Mempercepat digitalisasi layanan administrasi kependudukan hingga tingkat desa/kelurahan.
- Mendukung integrasi data kependudukan dengan sistem perlindungan sosial dan KHBS.

4. **Dinas Pendidikan**
   - Meningkatkan akses dan mutu pendidikan menengah dan vokasi untuk mendukung bonus demografi.
   - Mengintegrasikan edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan perkawinan anak dalam kurikulum dan kegiatan sekolah.
   - Mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah melalui kebijakan afirmatif.
   - Mendukung penguatan literasi keluarga dan pendidikan karakter berbasis nilai kebersamaan sosial.
5. **Dinas Kesehatan**
   - Mempercepat penurunan stunting melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif berbasis keluarga.
   - Memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi remaja.
   - Meningkatkan cakupan JKN dan layanan kesehatan preventif–promotif.
   - Mengintegrasikan data kesehatan dengan sistem informasi kependudukan.
6. **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
   - Meningkatkan kompetensi tenaga kerja muda melalui pelatihan berbasis kebutuhan pasar.
   - Mengembangkan kewirausahaan dan penempatan kerja berbasis potensi lokal.
   - Mengintegrasikan kebijakan ketenagakerjaan dengan proyeksi struktur umur penduduk.
   - Mendukung mobilitas penduduk produktif yang terencana dan adaptif.
7. **Dinas Sosial**
   - Mengintegrasikan data keluarga rentan dalam KHBS dan program perlindungan sosial adaptif.
   - Memberikan intervensi bagi kelompok rentan (lansia, disabilitas, keluarga miskin).
   - Menguatkan sistem rujukan sosial berbasis data kependudukan.
   - Mendukung pengurangan kemiskinan berbasis keluarga.
8. **Dinas PUPR dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
   - Meningkatkan akses rumah layak huni dan sanitasi aman.
   - Mengembangkan infrastruktur dasar di wilayah dengan kepadatan rendah.
   - Mengintegrasikan kebijakan kependudukan dalam perencanaan tata ruang.

- Mendukung pembangunan kawasan permukiman yang sehat dan berkelanjutan.

9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)

- Mengintegrasikan indikator PJPK dalam perencanaan dan penganggaran desa.
- Memperkuat kapasitas kelembagaan desa dalam pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas.
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan keluarga dan kependudukan.
- Mengembangkan ekonomi desa berbasis potensi lokal untuk menahan urbanisasi berlebihan.

10. Dinas Koperasi dan UKM

- Mengembangkan kewirausahaan keluarga dan UMKM berbasis komunitas.
- Memperkuat akses pembiayaan bagi usaha keluarga produktif.
- Mengintegrasikan program pemberdayaan ekonomi dengan penguatan ketahanan keluarga.
- Mendukung transformasi ekonomi lokal menuju sektor bernilai tambah.

11. Dinas Perdagangan dan Perindustrian

- Mengembangkan hilirisasi produk lokal dan industri berbasis sumber daya daerah.
- Memperluas akses pasar bagi UMKM keluarga.
- Mendukung penciptaan lapangan kerja berbasis sektor unggulan daerah.
- Mengintegrasikan pembangunan industri dengan daya dukung wilayah dan lingkungan.

12. Dinas Lingkungan Hidup

- Mengintegrasikan prinsip pembangunan hijau dalam kebijakan kependudukan.
- Mengendalikan dampak lingkungan akibat urbanisasi dan pertumbuhan kawasan.
- Mendukung pengelolaan sanitasi dan lingkungan sehat bagi keluarga.
- Mendorong literasi lingkungan sebagai bagian dari pembangunan keluarga berkelanjutan.

13. Dinas Perkebunan

- Mengembangkan produktivitas sektor perkebunan berbasis tenaga kerja lokal.
- Mendukung transformasi ekonomi keluarga petani menuju model berkelanjutan.
- Mengintegrasikan kebijakan perkebunan dengan pengendalian mobilitas penduduk dan pemerataan wilayah.

14. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

- Memastikan akses energi yang merata untuk mendukung kualitas hidup keluarga.
- Mengembangkan energi terbarukan pada wilayah terpencil.
- Mendukung transformasi ekonomi hijau berbasis potensi energi daerah.

15. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)

- Mengoptimalkan pendapatan daerah (pajak daerah) untuk mendukung pembiayaan program kependudukan.
- Mengintegrasikan basis data pajak daerah dengan data kependudukan untuk akurasi perencanaan fiskal.
- Mendukung keberlanjutan fiskal program prioritas RPJMD.

16. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

- Mengalokasikan anggaran berbasis kinerja indikator PJPK.
- Mengintegrasikan penganggaran responsif kependudukan dalam siklus APBD.
- Mengawal efisiensi dan akuntabilitas pembiayaan program.

17. Dinas Komunikasi dan Informatika

- Mengembangkan sistem informasi kependudukan terintegrasi dan interoperabel.
- Mendukung digitalisasi layanan publik berbasis data kependudukan.
- Menguatkan literasi digital masyarakat dalam administrasi dan layanan publik.
- Mengelola komunikasi publik terkait program kependudukan dan keluarga.

BAB IV
PENUTUP

Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029 merupakan instrumen strategis yang dirancang untuk memastikan bahwa dinamika kependudukan menjadi fondasi utama transformasi pembangunan daerah. Dokumen ini tidak hanya memuat arah kebijakan dan rencana aksi teknis, tetapi menjadi kerangka integratif yang menempatkan manusia dan keluarga sebagai pusat pembangunan, serta menghubungkan pengelolaan demografi dengan agenda pembangunan wilayah yang inklusif, hijau, dan berkeadilan.

Keberhasilan implementasi PJPK sangat ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan, efektivitas koordinasi lintas sektor, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjadikan isu kependudukan sebagai arus utama kebijakan daerah. Oleh karena itu, sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan disusun secara terstruktur untuk menjamin akuntabilitas, pembelajaran berkelanjutan, serta adaptasi kebijakan terhadap perubahan dinamika demografi dan sosial ekonomi.

A. Monitoring Pelaksanaan Peta Jalan dan Rencana Aksi

Monitoring pelaksanaan Peta Jalan dan Rencana Aksi dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan berjalan sesuai dengan sasaran, indikator, dan target yang telah ditetapkan. Monitoring tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan administratif, tetapi sebagai mekanisme pengendalian strategis yang memastikan keterkaitan antara pelaksanaan program dengan tujuan pembangunan kependudukan jangka menengah dan panjang.

Proses monitoring dilaksanakan melalui pendekatan berbasis data dan kinerja, dengan memanfaatkan integrasi sistem informasi kependudukan, data sektoral perangkat daerah, serta data perlindungan sosial yang terhubung dengan Kartu Huma Betang Sejahtera. Setiap indikator pembangunan kependudukan—baik terkait kuantitas, kualitas, pembangunan keluarga, persebaran penduduk, maupun administrasi kependudukan—dipantau secara berkala untuk mengidentifikasi capaian, hambatan, serta kebutuhan penyesuaian kebijakan.

Monitoring juga dilakukan secara kolaboratif melalui forum koordinasi lintas perangkat daerah, sehingga setiap capaian dan tantangan dapat dibahas secara komprehensif.

Pendekatan ini mencerminkan nilai kebersamaan dan tanggung jawab kolektif dalam pembangunan, di mana keberhasilan satu sektor tidak dapat dipisahkan dari kontribusi sektor lainnya. Dengan demikian, monitoring menjadi instrumen konsolidasi kebijakan yang memperkuat sinergi antarprogram prioritas daerah, termasuk Betang Maju, Betang Makmur, Betang Cerdas, Betang Sehat, dan Betang Harmoni.

B. Evaluasi Pelaksanaan Peta Jalan dan Rencana Aksi

Evaluasi pelaksanaan PJPK dilaksanakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, relevansi, dan keberlanjutan kebijakan pembangunan kependudukan. Evaluasi tidak hanya berfokus pada pencapaian target numerik, tetapi juga pada kualitas dampak kebijakan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan antarwilayah.

Evaluasi dilakukan secara periodik melalui analisis capaian indikator, pengukuran Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan, serta penilaian keterpaduan kebijakan kependudukan dalam dokumen perencanaan daerah. Pendekatan evaluasi berbasis *evidence* memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memiliki landasan data yang kuat dan mampu menjawab isu strategis yang berkembang.

Selain evaluasi internal oleh pemerintah daerah, mekanisme evaluasi juga membuka ruang partisipasi publik dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini penting untuk menjaga transparansi dan memastikan bahwa pembangunan kependudukan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Evaluasi yang adaptif memungkinkan pemerintah daerah melakukan penyesuaian strategi secara tepat waktu, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi, perubahan struktur umur penduduk, dan tantangan lingkungan.

Dengan demikian, evaluasi menjadi instrumen pembelajaran kebijakan (*policy learning*) yang berkelanjutan, sehingga PJPK tidak bersifat statis, melainkan responsif terhadap perubahan dan perkembangan wilayah.

C. Pelaporan Pelaksanaan Peta Jalan dan Rencana Aksi

Pelaporan pelaksanaan PJPK merupakan bagian integral dari sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Laporan disusun secara periodik dan terintegrasi dengan sistem pelaporan pembangunan daerah, sehingga capaian indikator kependudukan menjadi bagian dari laporan kinerja RPJMD dan evaluasi program prioritas daerah.

Pelaporan mencakup capaian indikator per sasaran, analisis deviasi terhadap target, kendala pelaksanaan, serta rekomendasi tindak lanjut. Laporan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis, perbaikan perencanaan tahun berikutnya, serta penguatan alokasi anggaran berbasis kinerja.

Dalam konteks transformasi digital pemerintahan, pelaporan juga didukung oleh sistem informasi terintegrasi yang memungkinkan pemantauan capaian secara real time. Transparansi pelaporan memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan pembangunan serta memastikan bahwa pengelolaan kependudukan berjalan secara terbuka dan bertanggung jawab.

Pada akhirnya, monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang dilaksanakan secara konsisten akan memastikan bahwa Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah benar-benar menjadi instrumen transformasi sosial dan wilayah. Melalui penguatan SDM unggul, ketahanan keluarga, pemerataan wilayah, dan tata kelola berbasis data, pembangunan kependudukan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan berdaya saing dalam kerangka Kalimantan Tengah Tangguh 2045.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2021–2024). *Laporan perkembangan pembangunan kependudukan*. BKKBN.

Badan Pusat Statistik. (2024). *Indikator kependudukan dan pembangunan manusia*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. (2025). *Provinsi Kalimantan Tengah dalam angka 2025*. BPS Provinsi Kalimantan Tengah.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. (2025). *Statistik daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2025*. BPS Provinsi Kalimantan Tengah.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah*. Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN. (2025). *Panduan penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025 – 2029*. Kemendukbangga/BKKBN.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. (2024). *Grand design pembangunan kependudukan lima pilar Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 – 2045*. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. (2024). *Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2045*. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. (2025). *Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029*. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*. Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan 2010–2035*. Lembaran Negara Republik Indonesia.

Presiden Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

United Nations Population Fund. (2014). *Population dynamics in the post-2015 development agenda*. UNFPA.